



Kalatirta, nama buletin Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten. Kalatirta terdiri dari dua suku kata yang masing-masing memiliki makna, yakni *kala* dan *tirta*. *Kala* adalah hiasan kepala raksasa pada ambang pintu masuk candi, simbol penolak bala. *Kala* juga berarti waktu. Adapun kata *tirta* bermakna air sebagai sumber dari kehidupan yang memiliki sifat dinamis, bergerak teratur, dan memberi kesejukan. Namun air juga berbahaya karena itu harus dikelola dengan benar. Dalam kaitan buletin ini, Kalatirta bermakna karya yang dihasilkan, merupakan sesuatu yang bernilai filosofis, terkontrol, dinamis, dan memberi manfaat.

Salam Redaksi

Daftar Isi :

- 6** **PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA UNTUK KEPENTINGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
- 12** **PENATAAN CANDI BLANDONGAN DARI PANDANGAN ARKEOLOGIS**
- 20** **POLEMIK DI BUKIT BADETO RATU: KASUS BUNKER JEPANG, PANGANDARAN DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI**
- 28** **FUNGSI DAN PERANAN ARCA MEGALITIK BATU GAJAH DAN KERBAU PADA SITUS BATU GAJAH, KABUPATEN TANGGAMUS, PROVINSI LAMPUNG**
- 36** **BAGAIMANAKAH STRUKTUR PEMERINTAHAN DI KERAJAAN BANTEN GIRANG ?**
- 44** **PULAU SANGIANG: PULAU MELINTANG DI TENGAH JALAN PANGKALAN ANGKATAN LAUT JEPANG DI SELAT SUNDA**
- 48** **TATA KOTA PANDEGLANG: WARISAN KOLONIAL RASA LOKAL**
- 58** **KAWASAN SANGKULIRANG MANGKALIHAT MENUJU WARISAN BUDAYA DUNIA**
- 78** **LOMBA KARYA TULIS ILMIAH PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DI PROVINSI BANTEN, TINGKAT**

Usianya masih muda baru tiga tahun dan baru pula terbit volume ketiga Buletin Kalatirta ini. Di usia yang masih relatif muda ini, semangat untuk berkarya mengisi lembaran-lembaran putih sehingga membentuk bingkai literasi dari beragam ide-ide, pemikiran, pendapat, dan pengalaman dari para penulis yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya hadir di hadapan pembaca.

Volume ketiga Buletin Kalatirta ini secara umum, tulisan-tulisan yang ada memiliki nuansa sedikit berbeda dengan dua volume sebelumnya. Dalam volume ini tim redaksi memberi ruang kepada dua penulis muda yang masih berstatus siswa SMA. Kedua tulisan tersebut merupakan tulisan yang memenangkan lomba menulis tentang pelestarian cagar budaya di Provinsi Banten yang dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang Tahun 2014. Meskipun ada nuansa baru, namun secara garis besar semua tulisan dalam volume ini semuanya masih berkaitan pelestarian cagar budaya dan diharapkan tetap menjadi inspirasi dalam pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Inspirasi tersebut mudah-mudahan seirama dengan makna logo Kalatirta yaitu bernilai filosofis, terkontrol, dinamis, dan memberi manfaat.

Sebagai pengantar sebelum membuka lembaran-lembaran buletin ini, kami sampaikan beberapa tema tulisan yang sekiranya menarik bagi pembaca. Beberapa tulisan berupa konsep pelestarian seperti pada tulisan Syarif Achmadi yang mengulas pemanfaatan cagar budaya untuk kepentingan pendidikan dan kebudayaan, demikian pula tulisan Bayu Aryanto yang menyampaikan satu pendekatan penataan situs berdasarkan data arkeologinya, dalam hal ini mengambil kasus Situs Candi Blandongan di Karawang. Berbagai konflik kepentingan yang bersentuhan langsung dengan cagar budaya terutama jika cagar budaya tersebut mengalami keterancaman kerusakan menjadi perhatian Padma Indranila pada kasus situs Bukit Badeto Ratu di Pangandaran dengan pendekatan antropologi, tulisannya berjudul Polemik di Bukit Badeto Ratu: Kasus Bunker Jepang Pangandaran dalam Perspektif Antropologi.

Selain konsep dan ide-ide, tulisan lainnya ingin menyampaikan potensi-potensi cagar budaya. Di antara tulisan itu adalah Pulau Sangiang: Pulau Melintang di Tengah Jalan Pangkalan Angkatan Laut Jepang di Selat Sunda yang merupakan karya Juliadi, ada pula tulisan Tata Kota Pandeglang: Warisan Kota Kolonial Rasa Lokal oleh Adita Nofiandi. Kemudian Rico Fajirian mengulas Fungsi dan Peranan arca megalitik di Situs Batu Gajah, Kab. Tanggamus dan Dewi Puspito Rini menawarkan satu pendekatan untuk melihat struktur pemerintahan di Kerajaan Banten Girang dengan melempar tawaran pendekatan toponimi. Tak kalah menarik, ada satu tulisan mengenai pengalaman Hendri Prasetyo ketika melakukan kegiatan deliniasi di Kawasan Sangkulirang Mangkalihat Kalimantan Timur yang diperkaya banyak foto.

Demikian gambaran isi volume ketiga Buletin Kalatirta ini sebagai pengantar bagi pembaca semoga dapat memperkaya referensi dan bermanfaat dalam upaya pelestarian cagar budaya.

Kalatirta

DITERBITKAN OLEH:

Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten
Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan
Permuseuman
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pelindung
Direktur Pelestarian Cagar Budaya
dan Permuseuman

Penanggungjawab
Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang

Pemimpin Redaksi
Zakaria Kasimin

Redaktur
Elly Suryaningsih
Syarif Achmadi

Editor
Dewi Puspito Rini

Desain dan Layout
Alpi Syahri

Fotografer
Hendri Prasetyo

Sekretariat
Yanuar Mandiri
Meti Sri Hapsah
Tiardi Marjuki

Alamat Redaksi
Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten
Jl. Letnan Djidun (Komplek Perkantoran)
Kepandean, Kota Serang, Banten 42115
No. Tlp/Fax: 0254 203428
Email: kalatirta@gmail.com

Tahun 2015



Lukisan Keraton Kaibon



PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA

UNTUK KEPENTINGAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

Keraton Kaibon

Pendahuluan

Pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi telah menghasilkan perubahan dan kemakmuran. Akan tetapi di sisi lain, pembangunan itu juga ikut andil dalam mengorbankan lingkungan alam dan warisan budaya. Warisan budaya yang terkena dampak langsung pembangunan terutama berupa bangunan-bangunan dan peninggalan-peninggalan kuna lainnya, yang dikenal sebagai cagar budaya. Padahal secara kognitif dan cultural, cagar budaya menandai tata nilai, perjalanan, sejarah dan tradisi bangsa.

Memori yang masih membekas dan berdampak dengan kehidupan masyarakat dan bangsa menjadi memori bangsa, baik secara kelompok, komunitas atau masyarakat, maupun kolektif, bangsa. Sangat memprihatinkan bahwa masih ada instansi dan atau oknum pemerintahan daerah yang seharusnya menjaga kelestarian cagar budaya di daerahnya, seringkali justru menjadi pelopor pembongkaran, sedangkan protes dari masyarakat setempat tidak ditanggapi, dan dianggap angin lalu. Kemungkinan besar hal ini terjadi karena banyak pimpinan daerah dihindangi "obsesi membangun," bahwa kemajuan daerah identik dengan pesatnya pembangunan baru dan modernisasi di segala bidang.

Sebuah ilustrasi bagaimana konsep yang mengandung nilai-nilai luhur diterabas, khususnya oleh kalangan birokrat, akan diuraikan di bawah ini. Sebelum Provinsi Banten berdiri tahun 2000, kita masih dapat menyaksikan pintu gerbang di kantor-kantor pemerintah menggunakan bentuk gapura bantar Keraton Kaibon. Sekarang nilai-nilai filosofis bentuk gerbang itu diabaikan. Gapura paduraksa digunakan seandainya tanpa memperhatikan nilai yang terkandung. Padahal secara filosofis, gapura Keraton Kaibon menunjukkan kesempurnaan baik lahir maupun batin. Betapa tidak, bila diperhatikan bentuk gapura bantar merupakan pembatas antara masyarakat dengan keraton.

Gapura bantar ini secara simbolik melambangkan batas antara dunia yang masih didominasi keinginan-keinginan duniawi. Disebut dengan duniawi karena gapura itu dibuat terpisah atau tidak menyatu. Pada areal ini, masyarakat masih

dapat melakukan aktivitas sesuai dengan keinginannya. Adapun nilai rohaninya tampak pada gapura paduraksa yang bagian atas menyatu membentuk kerucut sebagai manifestasi menuju satu yang di atas. Dalam konsep kerajaan, keraton merupakan manifestasi dari makrokosmos, sedang raja merupakan wakil yang kuasa. Sehingga wajar jika pada areal keraton banyak aturan yang mengikat sehingga orang tidak dapat berbuat sekehendak hati.

Terkait cagar budaya yang merupakan salah satu hasil karya para leluhur bangsa Indonesia, hendaknya dapat diperlakukan sebaik mungkin. Untuk menumbuhkembangkan rasa ikut memiliki tentang khasanah ragam budaya bangsa Indonesia yang salah satunya dengan mengetahui, memahami dan menelusuri hasil karya budaya bangsa melalui tinggalkan masa lalu, yang dewasa ini lebih dikenal sebagai cagar budaya. Rasa memiliki akan mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut melestarikan aset budaya bangsa. Suatu kepunahan cagar budaya memang diakui disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya alam, binatang dan manusia. Oleh sebab itu, bila sumber daya manusianya (SDM) mampu memahami pentingnya pelestarian cagar budaya, maka kepunahan sedini mungkin akan dapat dicegah.

Cagar budaya sebagai salah satu warisan leluhur apabila dipahami secara mendalam melalui proses belajar yang tekun, maka akan sangat membantu dalam membentuk nilai-nilai *adiluhung*. Nilai *adiluhung* dapat dijabarkan berupa tata-krama, kesantunan dalam menempatkan diri pada keluarga, sekolah, serta pergaulan sehari-hari dalam hidup bermasyarakat. Lebih luas lagi jika sejak dini para pelajar sudah ditanamkan nilai-nilai pribadi budaya bangsa dengan intensif, maka semangat untuk ikut memiliki (*handarbeni*) serta menjaga (*hangayomi*) bangsa negara yang memiliki aneka ragam budaya akan tercipta dengan baik. Bila tercipta suatu nuansa kepemilikan dan kebanggaan akan budaya bangsa, sudah selayaknya bila seluruh rakyat Indonesia menyatukan diri dalam keanekaragaman suku bangsa.

Ketentuan Pemanfaatan

Dalam kegiatan Pemanfaatan Cagar Budaya, perizinan meliputi: (1) izin pemanfaatan cagar budaya, (2) izin pendokumentasian cagar budaya untuk kepentingan komersial, dan (3) izin perbanyakan cagar budaya. UUCB 2010 Pasal 1 Butir 33 memberikan pengertian bahwa pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. Selengkapny, dasar hukum dalam kegiatan pemanfaatan cagar budaya merujuk pada pasal-pasal seperti di bawah ini:

pelajaran muatan lokal. Namun demikian, disadari bahwa realitasnya pembangunan pendidikan dan pariwisata budaya hanya dilakukan 'tebang pilih' artinya pembangunan suatu objek warisan budaya hanya dilakukan jikalau sejak awal membawa keuntungan secara ekonomi. Benar bahwa ekonomi merupakan hal penting yang tidak bisa dikesampingkan begitu saja demi pelestarian warisan budaya bangsa. Namun demikian, rasa nasionalisme yang menjadi bagian dari manifestasi pembentukan karakter dan memperkokoh jatidiri bangsa adalah penting untuk selalu dipupuk, dan inilah sebenarnya semangat dari pelestarian warisan budaya bangsa.

1.	Pasal 85 1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata; 2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang; 3. Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan; 4. Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.
2.	Pasal 87 1. Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. 2. Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peringkat Cagar Budaya dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya.
3.	Pasal 88 1. Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya. 2. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan kerusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya. 3. Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan. 4. Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

Pemanfaatan warisan budaya sebagai bagian dari pelestarian warisan budaya untuk kepentingan pembangunan karakter bangsa seperti pendidikan dan pariwisata budaya, bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Konsep pembangunan pendidikan dan pariwisata budaya mulai dilakukan secara serius pada beberapa tahun ke belakang, yakni adanya mata

Seperti ditulis oleh Aminuddin Kasdi dalam Pembangunan Moral Bangsa (Sujana:2005) bahwa prinsip-prinsip kebangsaan sebagai asas tujuan pendidikan nasional terdiri dari: 1) *Unity*, melalui proses integrasi bahwa solidaritas nasional di atas solidaritas lokal, etnis dan tradisional; 2) *Liberty*, setiap individu dilindungi hak-hak asasinya,



Pemanduan siswa di keraton Surosowan

kebebasan berpendapat, berkelompok, kebebasan yang dihayati dengan penuh tanggung jawab; 3) *Equality*, hak kewajiban, persamaan kesempatan; 4) Berkaitan dengan poin 2 dan 3 yakni prinsip kepribadian atau individualitas. Pribadi perorang dilindungi oleh hukum, di antaranya oleh hak milik, kontrak, pembebasan dari ikatan komunal dan primordial; 5) *Performan*, baik secara individual maupun kolektif. Setiap kelompok membutuhkan rangsangan dan inspirasi untuk memacu prestasi yang membanggakan.

Paradigma pembangunan berwawasan pelestarian warisan budaya yang bersifat kebendaan atau bendawi/ragawi atau berwujud) tidak terlepas dari arti penting warisan budaya bangsa, yaitu sebagai rekaman dasar dan pengikat nilai sekaligus sebagai bukti dari pemikiran dan aktivitas manusia di masa sebelumnya. Sebagai rekaman dasar, tentunya warisan budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan menggali ilmu pengetahuan, sejarah, dan kebudayaan serta dapat berdampak pada bidang ekonomi dan pariwisata. Sementara itu, ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini realistis, mengingat cagar budaya dapat berfungsi untuk memperjelas identitas suatu bangsa karena hasil-hasil budaya yang khas dan dimiliki secara bersama oleh bangsa tersebut. Hasil-hasil budaya tersebut dapat merupakan warisan dari masa yang lalu dan dapat pula hasil cipta masa kini.

Cagar budaya diturunkan dan dimiliki secara bersama, meski kadang mengalami keterputusan tradisi atau mengalami perpindahan kepemilikan. Cagar budaya juga berfungsi sebagai peneguh jati diri bangsa, yakni adanya kesadaran perjalanan sejarah bangsa itu sendiri. Kesadaran sejarah dapat diukur melalui pengetahuan umum yang beredar luas yang menjelaskan fakta-fakta sejarah bangsa sendiri, maupun dinamika hubungannya dengan bangsa lain, baik dalam upaya memahami masa lalu maupun sekarang. Kesadaran sejarah yang diperlukan bagi suatu bangsa bukanlah sekedar pengetahuan mengenai data sejarah, melainkan juga harus beserta wawasan dan perspektif yang tepat yang pada gilirannya memberikan sumbangan bagi pembentukan citra diri bangsa tersebut sebagai bangsa yang dapat dibanggakan dan disegani.

Penutup

Bahwa cagar budaya merupakan kekayaan bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional. Untuk menjaga kelestarian cagar budaya, telah dikeluarkan peraturan

berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang mengatur tentang pemilikan dan penguasaan, penemuan dan pencarian, registrasi nasional, penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, penelitian, revitalisasi, adaptasi, pemanfaatan, kewenangan, pendanaan, pengawasan dan penyidikan.

Untuk ikut membantu melestarikan warisan budaya bangsa yang cukup beragam, pelajar akan dengan mudah mengetahui dan meresapi jika melalui cara melihat, memahami, mengerti dan menelusuri serta melindungi. Dengan demikian, diharapkan akan timbul dan terbentuk rasa ikut memiliki (*handarbeni*). Kesadaran ini akan membentuk dan menumbuhkan rasa toleransi terhadap sesama individu atau kelompok. Sebagai pelajar, kurang lengkap apabila hanya menonjolkan kepandaian, rasional, dan logika. Oleh karena itu sangat penting bagi pelajar sebagai generasi penerus bangsa dengan memahami, melaksanakan dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa yang membentuk kepribadian sebagai jati diri bangsa. Pada akhirnya, fungsi kebudayaan adalah sebagai penunjang proses survival dengan menciptakan serta membangun budaya itu sendiri, dengan komponen di antaranya nasionalisme, kebudayaan nasional, kepribadian nasional, dan etos bangsa akan terwujud.

Daftar Pustaka:

- <http://elib.pdii.lipi.go.id/katalog/index.php/searchkatalog/byld/57064>
- http://djodigowes-fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-42324-Akademis-Peran%20Benda%20Cagar%20Budaya.html
- <http://joemarbun.wordpress.com/2011/12/27/keterlibatan-masyarakat-dalam-pelestarian-warisan-budaya-sebagai-li>
- <http://duniaartikelartikel.blogspot.com/2010/01/pelestarian-dan-pemanfaatan-bangunan.html>

PENATAAN CANDI BLANDONGAN

DARI PANDANGAN ARKEOLOGIS

Kajian terhadap rencana pengembangan dan pemanfaatan Situs Candi Blandongan dalam bentuk kajian pertamanan yang dilakukan Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang merupakan bagian dari rencana besar penataan kawasan Situs Purbakala Batujaya. Bagaimana memberikan nilai tambah untuk tujuan pariwisata adalah hal yang menjadi perhatian utama dalam kajian pertamanan Candi Blandongan. Selain itu, perhatian utama perencanaan yang dibuat haruslah tidak melupakan konteks sejarah dan nilai arkeologis obyek bangunan Candi Blandongan sendiri. Taman dalam pengertian arkeologi adalah sebagai taman asli yang ada pada masa lalu, ataupun taman yang dibuat pada masa kini dengan memilih situs sebagai lokasi. Pada masa kini pembuatan taman purbakala bertujuan selain untuk mempertahankan nilai keaslian tinggalan arkeologi juga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pariwisata, sarana pengembangan pendidikan, dan penelitian arkeologi murni (Mundardjito, 1984; Dradjat, 1992).

Hal yang paling mendasar dan menjadi tujuan dalam kajian adalah bagaimana menata lingkungan dalam lahan Candi Blandongan yang difungsikan untuk:

- Memberikan perlindungan yang bersifat permanen pada situs dari bahaya alamiah;
- Memberikan perlindungan terhadap tinggalan purbakala yang mungkin masih tersimpan di dalam tanah;
- Memberikan fasilitas untuk kenyamanan wisatawan.

Candi Blandongan Dan Arsitektural Keagamaannya

Perbedaan ketinggian dari gambaran umum wilayah Batujaya bukan saja rekayasa lingkungan yang berhubungan dengan mengatasi kondisi alami lingkungan dan teknis semata yang berhubungan dengan pendirian bangunan. Masyarakat masa lalu hampir pada setiap aspek kehidupannya didasarkan pada aspek religi, sehingga tentunya kondisi tersebut juga harus dilihat dan dipahami dari sudut religi. Pemahaman akan konsep

religi akan sangat membantu dalam memahami dan merancang satu konsep penataan yang dapat memberikan makna dari simbol-simbol yang berbentuk arsitektural ataupun lingkungan Candi Blandongan.

Bentuk lingkungan alam selalu berubah seiring waktu yang berjalan dengan perlahan tapi pasti. Adapun bagian yang tidak atau kecil perubahannya adalah air dan fitur fisik yang berada di permukaan. Berbeda dengan vegetasinya yang merupakan bagian paling mudah mengalami perubahan. Karena itu, lingkungan akan terlihat berbeda dari tiap generasi ke generasi. Generasi berikutnya akan melihat satu lingkungan berbeda dengan yang dilihat oleh pendahulunya. Bilamana lingkungan itu adalah lingkungan hasil rekayasa, tentunya perubahan-perubahan alam juga akan merubah persepsi dan interpretasi terhadap obyek dalam satu lingkungan tertentu.

Sebagai bangunan berlatar agama Buddha, saat ini Candi Blandongan adalah salah satu bangunan dalam Percandian Batujaya yang diketahui dan dapat ditampilkan sebagai bangunan yang memiliki proses pembangunan kembali pada masa lalunya. Melihat Candi Blandongan dan lingkungannya, haruslah bersama dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat pendukungnya yang memiliki keterkaitan dengan religi, termasuk juga dalam pembangunan satu bangunan, apalagi satu bangunan peribadatan. Ada sejumlah aturan yang harus dipenuhi dalam pembangunan bangunan ibadah dalam agama Buddha, dimana bangunan dan lingkungannya adalah simbol-simbol keagamaan yang memiliki karakter berbeda-beda.

Bangunan Candi Blandongan memiliki denah dasar berbentuk empat persegi (bujur sangkar). Dalam arsitektur India, bentuk bujur sangkar adalah sesuatu yang sangat syarat nilai dan merupakan bentuk yang melambangkan kesempurnaan (Ferdinandus, 2002). Pada dasarnya, Candi Blandongan memiliki konsep dasar arsitektur yang menggambarkan alam mikrokosmos dan makrokosmos Hindu-Buddha, yang dibangun di atas mandala.

Bangunan beserta halaman di sekitarnya sesuai dengan arsitektur yang didasarkan pada konsep mikrokosmos-makrokosmos dibagi menjadi empat bagian, yaitu: 1) Brahma sebagai pencipta alam semesta disimbolkan oleh *garbha grha*, 2) alam kedewataan, disimbolkan oleh selasar di sisi luar *garbha grha* yang digunakan untuk ritual *pradaksinapatha*, 3) alam manusia, disimbolkan oleh dinding pagar langkan, 4) alam gaib atau alam makhluk-makhluk demonis adalah halaman candi pada batas tertentu, sesuai dengan mandala yang digunakan sebagai konsep dasar pembangunan Candi Blandongan.

Banyak pendapat mengenai batu-batu besar dengan permukaan datar yang berada di permukaan selasar dan di halaman Candi Blandongan. Banyak argumen didasarkan pada

fungsi teknis, sedangkan dari sudut pandang religi lebih banyak dugaan-dugaan. Keberadaan batuan tersebut sesungguhnya tidak terlepas dari konsep mandala dalam keletakannya. Begitu juga keletakan pintu dan bagian yang diduga sebagai jendela, semua ditempatkan sesuai konsep mandala. Batu sendiri, selain berfungsi teknis sebagian lainnya adalah alat bantu sebagai penanda keberadaan bagian-bagian mandala dimana satu bagian bangunan harus diposisikan. Dengan demikian, Candi Blandongan bukan semata satu bangunan teknis arsitektural namun sesuatu yang memiliki 'roh'.

Keberadaan struktur bangunan di halaman barat laut dan barat daya, artefak menhir di halaman tenggara, serta unur kecil di sisi timur laut tidak terlepas pula dari konsep mandala. Meskipun dalam penempatannya mandala yang digunakan berbeda dengan mandala arsitektur bangunan Candi Blandongan, sehingga ada perbedaan antara mandala arsitektur bangunan dengan konsep penempatan bangunan lain di sekitar bangunan inti. Konsep mandala pada arsitektur bangunan Candi Blandongan juga menentukan dalam menempatkan arah hadap bangunan dan keletakan pintu utamanya. Hal tersebut berhubungan dengan fungsi dan alur ritual keagamaan yang dilakukan pada bangunan Candi Blandongan.

Permasalahannya adalah bagaimana melakukan penataan yang dapat mempertahankan obyek dalam konteks sejarahnya namun tetap tidak melupakan estetika. Proses pekerjaan menata suatu obyek purbakala adalah sesuatu yang sangat menyesuaikan dengan keadaan. Interpretasi dan persepsi terhadap satu keadaan dipengaruhi oleh perubahan fisik, sosial dan ekonomi, dan perubahan opini publik yang akan berlangsung seiring waktu berjalan. Permasalahan yang hampir selalu terjadi adalah pada rekonstruksi atau restorasi yang terkadang memberikan bentuk baru, berbeda dengan aslinya. Proses adaptasi satu taman pada bentuk baru yang digunakan secara tetap meliputi perubahan-perubahan substansial seperti sebagai berikut:

1. Perubahan radikal yang dengan sengaja merubah bentuk atau komposisi
2. Gangguan oleh pendirian bangunan baru di dalam situs
3. Perubahan oleh pembangunan jalan dan pembuatan sarana publik
4. Perubahan yang dipengaruhi oleh penambahan jumlah pengunjung.

Upaya mengatasi dan mejembatani permasalahan antara teori dan praktek pelestarian cagar budaya, keperluan masa kini dan masa depan, maka karakter perubahan pada bentuk aslinya diusahakan memberikan solusi pelestarian sumber daya yang dilakukan melalui analisa terhadap sejarah masa lalu (kondisi masa lalu) dengan kondisi saat ini yang masih

tersisa. Didasarkan pada konsep mandala yang menjadi dasar pembangunan Candi Blandongan dan pembentukan lingkungan yang masuk dalam halamannya, dapat dikatakan bahwa penataan lingkungan Candi Blandongan semestinya dapat dibuat mendekati kondisi asli didasarkan pada konsep mandalanya. Hal ini dikarenakan satu obyek purbakala dan lingkungannya dari tiap masa memiliki gaya dalam sejarah arsitekturnya dan disesuaikan dengan ruang yang digunakannya, yang dapat memberikan gambaran umum lingkungan pada masa tersebut.

Fungsi Taman Purbakala Situs Candi Blandongan

Dipandang secara ekologi, Situs Candi Blandongan dan lingkungannya dianggap sebagai satu ekosistem. Masing-



Taman di sekitar candi

masing komponen penyusunnya berhubungan secara timbal balik. Pemanfaatan sumber daya alam telah dilakukan manusia sejak masa lampau. Manusia sebagai komponen utama dalam ekosistem telah memanfaatkan komponen-komponen lainnya guna kelangsungan hidupnya. Situs Candi Blandongan merupakan tinggalan dari bentuk ekosistem masa lampau dan contoh pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia pada masanya yang masih tersisa dan dapat bertahan hingga saat ini.

Keseluruhan fungsi dari taman purbakala dan penataan lingkungan Situs Candi Blandongan adalah *architectural landscape* yang ditunjukkan sebagai *cultural landscape* dengan beberapa bagiannya ditampilkan sebagai *archaeological landscape*, yaitu suatu cakupan lingkungan fisik dan budaya

Temuan pada Candi Blandongan



yang dapat mencerminkan suasana kehidupan manusia dalam satu zaman tertentu.

Penataan Situs Candi Blandongan: Gambaran Masa Lalu Untuk Masa Yang Akan Datang

Penataan yang sementara dapat dilakukan adalah semi mikro yang terbatas pada luasan tertentu dengan cakupan satu situs, yaitu Situs Candi Blandongan. Terlepas dari lingkungan masa lalu, mandala lingkungan candi pada dasarnya memberikan gambaran luasan yang dibutuhkan dalam penataan sehingga tidak melepaskan konteks arkeologi, sejarah dan arsitektur Candi Blandongan sendiri. Dampak lanjutan lainnya akan berkenaan dengan pemahaman lingkungan dan konsep penataan situs lainnya. Pelestarian Situs Candi Blandongan yang berada dalam Kawasan Percandian Batujaya merupakan pelestarian dalam satu sistem yang tidak dapat hanya melestarikan sebagian dari sistem dan mengabaikan komponen yang lain, atau menghilangkan inti dari sistem.

Nilai pelestarian satu situs atau kawasan yang merupakan satu sistem yang terkait akan menjadi berkurang bahkan ada kemungkinan tidak memiliki makna lagi, kecuali untuk tujuan atau kepentingan tertentu saja. Ruang adalah konteks yang tidak dapat terlepas dari konsep mandala lingkungan Candi Blandongan. Tata ruang dan keletakan artefak merupakan dasar dari penetapan cakupan lahan dan *setting* taman purbakala Candi Blandongan sebagai bagian dari usaha pelestarian situs dan nilai yang terkandung di dalamnya. Permasalahan yang ada adalah: 1) lahan direncanakan tertata tidak cukup untuk memberikan gambaran konsep dasar mandala lingkungan Candi Blandongan sesungguhnya karena bentuknya yang tidak simetris sesuai dengan mandalanya; 2) artefak berupa struktur yang secara teknis kecil kemungkinannya untuk ditampilkan.

Pengenalan terhadap konsep dasar bangunan dan lingkungan Candi Blandongan membantu dalam pemahaman akan arah pandang bangunan dan *setting* ritual yang didasarkan pada kepercayaan pendukung kebudayaan pada masanya. Perbedaan kondisi lingkungan saat ini yang berbeda dengan masa lalu dan ketersediaan sarana yang telah ada menjadi permasalahan tersendiri dalam mengatasi *setting* yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan, lahan, dan keperluan masa kini dan juga masa depan dalam mengarahkan aliran pengunjung.

Keberadaan obyek purbakala yang berada lebih rendah dibandingkan dengan permukaan tanah sekelilingnya memerlukan *setting* yang tetap dapat menampilkan obyek sebagai bangunan yang megah dan tidak terkesan tenggelam dan dikecilkan oleh lingkungannya. Mengusahakan *setting*

yang memberikan jarak pandang luas bagi pengunjung untuk melihat obyek sebagai bangunan yang memiliki nilai keagungan. Mengintegrasikan potensi lahan, lingkungan, dan prasarana yang telah ada adalah salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam kajian pertamanan Candi Blandongan.

Bagaimana merencanakan taman Candi Blandongan yang sesuai dengan konsep dasarnya, lingkungan dan mempertahankan keterkaitan dengan situs lain dalam kawasan tersebut sebagai satu sistem adalah tantangan tersendiri. Berangkat dari permasalahan yang ada, hal yang paling penting dalam rencana penataan Candi Blandongan adalah dalam memaksimalkan fungsi lahan, baik untuk keperluan teknis pelestarian, pelestarian nilai, dan akomodasi keperluan pengunjung. Dengan demikian dianggap perlu untuk melakukan pemintakatan lahan dalam satuan ruang terbatas sesuai dengan konsep penataan sistem sel.

Analisa arkeologis terhadap bangunan dan lingkungan yang didasarkan pada konsep mandala, lahan Situs Blandongan adalah 12.747 m². Keletakan obyek inti dan penyerta disesuaikan pada pembagian berdasarkan konsep mandalanya. Didasarkan pada potensi lahan dan kondisi lingkungan sekitar situs, serta analisa arkeologis lingkungan berdasarkan konsep mandala sesungguhnya dari Situs Candi Blandongan, pemintakatan di dalam lahan Situs Candi Blandongan dapat dilakukan secara ideal karena seluruh luasan tanah yang direncanakan ditata seluas 20.891 m², namun karena bentuk lahan yang ada tidak sesuai dengan mandalanya hal tersebut tidak dapat dilakukan. Mandala Candi Blandongan dimana terdapat obyek bangunan induk beserta obyek penyerta lain di sekelilingnya masuk dalam luasan lahan tertata.

1. Mintakat inti

Luas mintakat inti adalah 1.585 m². Dalam mintakat inti terdapat obyek bangunan inti dan lahan terbuka di sekeliling bangunan yang memiliki fungsi teknis dan estetika, dan konsep arkeologis. Fungsi teknis dengan menjadikan permukaan tanah di mintakat ini memiliki daya serap air yang tinggi terhadap curah air hujan, dan melengkapinya dengan lapisan tanah mudah menyerap air, jaringan penyerap, penyaring dan pembuang air yang tergenang, sedangkan fungsi estetika dihadirkan melalui permukaan yang datar menampilkan sosok bangunan yang proporsional secara teknis.

2. Mintakat Penyangga

Mintakat penyangga dalam lahan Situs Candi Blandongan adalah seluruh bagian di luar mintakat inti. Adanya lahan penyangga ditujukan untuk dapat memberikan fungsi menyejukkan, pengamanan, dan memberi keindahan panorama

hijau kepada pengunjung, serta melindungi bangunan cagar budaya dan situsnya dari pengaruh alam. Penataan mintakat penyangga dilakukan dalam usaha tetap menjaga nilai hubungan situs dengan lingkungan alam sekitarnya yang berada dalam kawasan percandian Batujaya, bukan sekedar ruang. Hal tersebut dimaksudkan sebagai usaha memberikan gambaran akan kearifan lingkungan masyarakat masa lalu dalam hal penempatan situs. Dengan kata lain, lahan penyangga juga merupakan lahan preservasi dan konservasi lingkungan.

Latar arkeologis berupa konsep mandala lingkungan Candi Blandongan masih terliput di dalam lahan penyangga. Adapun permasalahan bahwa konsep tersebut tidak ditampilkan secara utuh karena kebutuhan teknis yang memerlukan adaptasi dan juga untuk keperluan mengakomodasi keperluan pengunjung.

Konsep pertamanan untuk penataan Candi Blandongan disesuaikan dengan luas lahan, sebaran obyek artefaktual yang memiliki konteks dengan bangunan inti dan lingkungannya di dalam lahan situs, serta alokasi ruang dan kontrol pengunjung. Kondisi lingkungan alam dan sebaran obyek artefaktual sebagai bangunan atau obyek penyerta di lahan situs menjadikan penanganannya disesuaikan dengan teknis pelestarian yang memungkinkannya. Sebaran yang relatif terpisah dalam rentang jarak relatif cukup jauh, ± 25 m, cukup memberi ruang untuk penanganan teknis dan mempertahankan *setting* obyek penyerta sesuai data arkeologis yang ada. Bagaimana pengunjung dapat memahami dan menikmati obyek penyerta secara bersamaan adalah hal lain yang memerlukan solusi tersendiri.

Terlepas dari keterbatasan lahan yang bentuknya tidak simetris menyulitkan dalam menghadirkan konsep arkeologis lingkungan yang berhubungan dengan mandala bangunan dan lingkungannya, lahan situs yang relatif terbuka memudahkan dalam rencana penataan tanaman. Solusi untuk mengatasi permasalahan teknis pelestarian bangunan berkenaan dengan ancaman alam, kondisi lingkungan dan keperluan pemanfaatannya dilakukan dengan memaksimalkan tataguna lahan dan pemanfaatan ruang dalam lahan situs, serta menyesuaikan jenis tanaman yang akan ditata sesuai *setting* situs yang terfokus pada obyek cagar budaya beserta nilai-nilai yang dikandungnya.

Secara sederhana, penyesuaian antara nilai-nilai yang dikandung situs dengan keperluan sekarang dan masa yang akan datang dilakukan dengan penyediaan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk menunjang usaha pengalokasian dan kontrol pengunjung serta mendukung pula usaha dan konservasi lingkungan.

Tanaman pada taman Candi Blandongan direncanakan dengan mempertimbangkan bahwa taman yang dibuat adalah

bagian dari lingkungan yang ditata sebagai taman purbakala dengan melihat pada aspek lingkungan fisik situs, klimatologi, dan budaya setempat. Lingkungan fisik Situs Candi Blandongan yang berada pada dataran rendah yang tidak jauh dari pesisir pantai memiliki ciri alamiah tertentu yang hingga saat ini di tengah perubahan alam dan lingkungannya masih dapat dilihat jejaknya. Ciri tersebut dapat dilihat dari tanaman yang khas berada pada wilayah tersebut, seperti putat, sepat, serut, kendal, kawista, pandan, dan kelapa.

Putat, serut, kendal, kawista dan pandan merupakan tanaman yang hidup di habitat yang dekat dengan air dan dapat beradaptasi terhadap garam yang tinggi, khas sebagai tanaman di lingkungan dataran rendah, rawa, berperairan payau. Bahkan persebaran bibitnya pun seringkali melalui perantaraan air. Sedangkan kelapa adalah tanaman yang umum di dataran rendah. Tanaman berupa pohon yang tampaknya bukan merupakan tanaman asli wilayah tersebut, namun memiliki kekhasan yang konteks dengan obyek kepurbakalaan Batujaya adalah kosambi.

Menghadirkan karakter khas lingkungan berupa tanaman maka cara yang dapat dilakukan adalah menanam pohon-pohon tersebut pada posisi dan keletakan yang disesuaikan dengan peruntukan lahan dan konteksnya dengan obyek inti berupa bangunan purbakala. Letak situs yang berada di tengah pesawahan menjadikan situs perlu dilindungi dari terpaan angin. Untuk tujuan tersebut maka pada tepian situs ditanami pohon yang dianggap kokoh dan memiliki tajuk yang cukup luas.

Pengertian taman tentunya menggambarkan adanya tanaman yang memberikan nilai estetika, sehingga di dalam lahan taman juga ditanam beberapa tanaman hias dengan jenis yang disesuaikan dengan fungsinya. Tanaman yang berupa pohon, perdu, dan semak tersebut dapat dipilih sesuai keperluan dan fungsinya pada lahan Candi Blandongan.

Jalan Setapak

Pembuatan jalan setapak dalam taman Situs Candi Blandongan dimaksudkan sebagai satu jaringan yang dapat mengarahkan pengunjung memahami nilai kepurbakalaan obyek bangunan dan lingkungannya serta menikmati seluruh lingkungan lahan dan alam sekitarnya. Selain itu dimaksudkan dengan tujuan untuk menghindari adanya pemusatan pengunjung pada satu lokasi di dalam lahan situs. Jalan setapak yang dibuat juga menjadi batas mintakat lahan antara inti dengan penyangga. Didasarkan pada tujuan tersebut dalam perencanaan dibuat dua jalan setapak yang berbentuk seperti 'ring'.

Jalan setapak yang terdekat dengan obyek bangunan

(ring 1) dibuat mengelilingi obyek bangunan. Jalan setapak ini mendekati ukuran sesungguhnya dari mandala bangunan dan halamannya yang pada beberapa bagian hanya selisih 0,74 m sampai 1,50 m di luar tanggul penahan tanah halaman inti obyek. Menjembatani antara konsep arkeologis, keperluan teknis pelestarian, dan keperluan lain untuk masa sekarang dan masa mendatang, jalan setapak dibuat sedikit bergeser ke luar sejauh 4,7 m dari bibir tanggul yang tidak menjorok ke luar.

Jalan setapak kedua (ring 2) berada di sisi luar jalan setapak pertama. Meskipun dasarnya adalah mandala lingkungan Candi Blandongan, namun perencanaan jalan setapak ini lebih dimaksudkan untuk mengatur sirkulasi pengunjung dan mengakomodasi kebutuhan pengunjung untuk menikmati lingkungan dalam lahan Situs Candi Blandongan dan penghubung titik ruang terbuka dimana pengunjung dapat menikmati lingkungan sekitar situs.

Embung Air Sebagai Taman Air

Berdasarkan pada analisa lingkungannya, pemilihan lokasi pembangunan Candi Blandongan pada masa lalu tidak lepas dari nilai penting air sebagai sumber kehidupan dan juga kepercayaan masyarakat pendukungnya. Meskipun berdasarkan

pada analisa lingkungannya pula air menjadi permasalahan dalam kelestarian bangunan dan lingkungan Candi Blandongan dari masa ke masa. Maka penataan lahan dan lingkungan Situs Candi Blandongan haruslah ikut melestarikan alam dan lingkungan situs didasarkan pada data arkeologi dan keperluan masa sekarang serta masa mendatang.

Adaptasi yang akan terlihat radikal dalam penataan dan rencana desain Taman Situs Candi Blandongan adalah adanya prasarana berupa embung air di sisi tenggara mengarah selatan dan timur laut mengarah timur. Didasarkan pada konsep mandala dan lingkungan Candi Blandongan keberadaan embung dapat disesuaikan pada data dan interpretasi arkeologis, serta keperluan teknis pelestarian obyek beserta lingkungannya.

Dengan demikian penataan taman dalam lahan Candi Blandongan dapat memiliki hubungan dengan lingkungan sekitar dan memberikan sinergi dalam pemanfaatan lahannya. Hubungan dengan alam sekitar dapat diperlihatkan dengan penanaman tanaman yang sesuai dengan perkiraan vegetasi lingkungan masa lalunya. Selain itu dimaksudkan untuk memberikan nilai tambah estetika dalam penataan lahan dan lingkungan situs serta pemanfaatannya bagi masyarakat sekitar yang bermatapencarian utama sebagai petani.

Secara teknis, drainase pada lahan situs adalah tergenang akibat kondisi alamnya. Diperlukan bantuan mekanis untuk menggerakkan air mengalir menjauh dari lahan inti situs. Permasalahannya, air tidak selamanya dapat langsung dialirkan ke luar situs, karena sawah di sekitar situs pada musim tertentu tidak boleh diairi. Embung adalah wadah sementara untuk menampung air sebelum kemudian tentunya juga harus dialirkan keluar. Adapun sangat bagus bila air yang dikeluarkan dari embung langsung terhubung dengan saluran irigasi.

Pembuatan embung dilakukan dengan melihat pada penataan lahan dalam skala yang lebih luas, yaitu kawasan. Bila itu dilakukan maka embung yang dibuat tidak harus berada dalam lahan Candi Blandongan, ditempatkan pada lokasi yang memungkinkan untuk tetap dapat berfungsi saluran irigasi yang ada dan sekaligus menampung buangan air dari beberapa lokasi situs yang tentunya juga didasarkan pada kajian arkeologis dan teknis dalam penentuan lokasinya. Dengan terangkai melalui saluran irigasi, pompa mekanis langsung membuang air ke saluran irigasi yang mengalir ke embung. Dalam artian, embung air yang dibuat berfungsi utama sebagai kantong air pada saluran irigasi yang ada.

Penutup

Pada akhirnya, penataan lahan dan lingkungan Situs Candi Blandongan harus melihat pada latar belakang lingkungan, kepercayaan dan aspek sosial ekonomi. Penataan lahan situs dan lingkungannya, termasuk air bukan hanya dimaksudkan sebagai bagian dari latar sejarah, namun menjadikannya bagian dalam menjaga keseimbangan alam, preservasi dan konservasi lingkungan dalam usaha pemanfaatan situs yang bersentuhan dengan masyarakat dan pelestarian lingkungan alam secara langsung.

Rencana desain yang dihasilkan dari kajian pertamanan yang dilakukan Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang diusahakan sebaik mungkin, seperti ungkapan yang menyatakan bahwa desain taman situs purbakala yang baik adalah yang dapat memberikan bentuk cerminan dari satu produk berwawasan seni dan lingkungan tanpa keluar dari konteks sejarahnya yang juga menjadi taman arsitektural, taman rasional, taman yang natural, taman tiruan yang indah. Hal tersebut akan menghasilkan tindakan-tindakan obyektif dalam memperlakukan alam dan hubungan yang harmonis antara alam dengan manusia. Ini juga akan menjadikan pembuatan satu taman purbakala sebagai satu proses pembangunan yang permanen dan berkesinambungan, tidak hanya berorientasi untuk masa sekarang tapi juga untuk masa depan. Setiap perubahan dapat dilihat sebagai hasil dari hal-hal baru di tiap peristiwa sejarah hubungan manusia dengan alam lingkungannya (Micoulina, 1993).

Daftar Pustaka

- Ferdinandus, Peter. 2002. "Recent Archaeological Excavations In Blandongan Site, Batujaya, Karawang, West Java" dalam Aspek-Aspek Arkeologi Indonesia (Aspects of Indonesian Archaeology), Nomor 25. Jakarta: Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, Bagian Proyek Penelitian dan Pengembangan Arkeologi.
- Heriyanti, Untoro Drajat. 1986. "Aspek Ekologi Dalam Penelitian Arkeologi", dalam Pertemuan Ilmiah Arkeologi IV, jilid IV hlm 17-26. Jakarta: Puslitarkenas.
- Micoulina, Elena. 1993. "The History of Gardens and The Evolutions of The Environment", dalam Historic Garden And Sites, hlm. 71-79. ICOMOS International Committee On Historic Gardens And Sites. Sri Lanka: State Printing Corporations Panaluwa.
- Moendardjito. 1993. Pertimbangan Ekologi dalam Penempatan Situs Hindu-Buddha di daerah Yogyakarta: Kajian Arkeologi Ruang Skala Makro. Disertasi Universitas Indonesia.

Ilustrasi contoh Embung Air, Sumber: <http://radionewongtani.blogspot.co.id>



POLEMIK DI BUKIT BADETO RATU:

Kasus Bunker Jepang, Pangandaran dalam
Perspektif Antropologi

Padma Indranila



Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, maka seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan, sehingga diperlukan kebijakan yang tegas dari pemerintah untuk menjamin eksistensinya. Selanjutnya, penanganan Cagar Budaya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Sebagai warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya perlu dipertahankan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Seperti yang diungkapkan oleh Herry Yogaswara (2014) dalam "Pengelolaan Sumber Daya Kebudayaan: Pengalaman Banten Lama", bahwa suatu situs Cagar Budaya maupun kawasan situs, tidak hanya berfungsi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kelestarian semata, tetapi juga untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dipertahankan keberadaannya.

Benda Cagar Budaya mempunyai hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Untuk itu, benda Cagar Budaya tidak hanya penting bagi disiplin ilmu arkeologi saja, tetapi juga bagi disiplin ilmu lainnya yang dapat melakukan analisis terhadapnya, seperti Antropologi yang dapat melihat keterkaitan



Sumber: naxpangandaran.blokspot.co.id



Potensi Pariwisata di Pangandaran

antara benda Cagar Budaya dengan aspek socio-cultural masyarakat. Tulisan ini mencoba melihat interelasi ancaman kelestarian Cagar Budaya yakni situs bunker Jepang oleh pengusaha dalam rangka pendirian hotel di kawasan Badeto Ratu, Pangandaran, dan kondisi sosial masyarakat dalam perspektif Antropologi. Seperti apa respon masyarakat dalam menanggapi ancaman kelestarian situs Cagar Budaya di lingkungannya? Bagaimana upaya pemerintah dalam hal ini BPCB Serang, untuk mengantisipasi ancaman kelestarian Cagar Budaya? Apakah selama ini masyarakat turut dilibatkan sebagai mitra pemerintah dalam penanggulangan ancaman kelestarian Cagar Budaya? Dengan melihat relasi yang ada, kita dapat menemukan beberapa factor penyebab dan solusi yang tepat dalam menangani persoalan ini.

Potensi Pariwisata di Pangandaran

Kabupaten Pangandaran yang tak lain merupakan hasil pemekaran wilayah dari Kabupaten Ciamis, memiliki banyak potensi wisata. Selain keindahan pantainya, Pangandaran juga memiliki kekayaan flora, fauna, dan keindahan alamnya. Dengan beragam flora, kawasan Cagar Alam di Pangandaran merupakan habitat yang cocok bagi kehidupan satwa liar seperti monyet, banteng, tando, rusa, landak, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, Pangandaran juga mempunyai daya tarik lainnya seperti Batu Kalde, salah satu peninggalan sejarah zaman Hindu. Selain itu, banyak terdapat gua alam dan gua buatan yang dahulu sering dimanfaatkan oleh tentara Jepang sebagai tempat pertahanan, persembunyian, perlindungan, dan juga tempat penyimpanan senjata semasa Perang Dunia ke II.

Sayangnya, objek wisata sejarah ini kurang mendapat perhatian dari masyarakat sekitar. Para wisatawan pun mengaku tidak berminat untuk melakukan kunjungan/ wisata sejarah.

“Kalau diranking, tempat wisata menarik di Pangandaran, pertama yang jelas pantai, tempat berenang ya, yang kedua mungkin Cagar Alam, yang ketiga Grand Canyon... Kalau situs... kurang ada minat sebetulnya, hanya orang-orang tertentu saja.” (petikan wawancara dengan Bp. Arif, Bandung)

“Yang saya tau dari Pangandaran ya Pasir Putih, Cagar Alam, sama Grand Canyon...” (petikan wawancara dengan Ibu Rina, Bandung)

“About Pangandaran... I know nothing, hahaha. Well, my wife said, actually it is nice place, and we're back to Bandung tonight, so we want to go to see the beach. I don't have a time, but I will come back later, longer stay, and explore the nature, and the area...” (petikan wawancara dengan turis asing, Dave, Norway)

Beberapa petikan wawancara dengan para wisatawan di atas, memperlihatkan kurangnya minat para wisatawan, baik turis domestik maupun mancanegara untuk mengunjungi situs-situs bersejarah yang ada di sekitar Pangandaran. Beberapa di antara mereka bahkan tidak mengetahui bahwa Pangandaran juga memiliki potensi wisata sejarah.

Ancaman terhadap Kelestarian Situs Bunker Jepang di Kawasan Badeto Ratu

Minimnya kepedulian masyarakat terhadap keberadaan Cagar Budaya di lingkungannya, menjadi salah satu factor penyebab terjadinya ancaman pembongkaran situs di kawasan Badeto Ratu, Pangandaran. Perlu diakui pula bahwa terjadinya kasus ini juga akibat dari lemahnya pengawasan/ monitoring keberadaan situs yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Serang.

“Kalo pendapat saya (tentang kasus Badeto Ratu), kenapa dulu ngga dibeli (dibebaskan) dari pemerintah! Dijualnya kan udah lama itu dijual! Kenapa ngga dibeli kalo pemerintah membutuhkan itu? Ada peninggalan Jepangnya, itu mah terserah yang punya uang... Kalo sejarahnya Ibu mah ngga tau, cuma denger 'di sini ada goa Jepang', katanya dari jaman Jepang, udah aja... Kalo hotel itu jadi dibangun, ya seneng sih seneng, nanti rame ke sana.” (petikan wawancara dengan Ibu Nur warga Pangandaran)

“Tentang sejarahnya, pernah sih dengar, tapi... lupa lah! Banyak ceritanya, tapi kurang paham lah... Tentang hotel yang mau dibangun, ada bunker Jepang kan, dulu mah dari pihak pemerintah teh ngga peduli dulu mah, peduli-peduli sekarang, waktu ini dibeli sama itu, ini kan tanah pribadi. Waktu udah dibeli sama C*na, grup itu mah, bukan perorangan, baru (pemerintah)

pada datang ke sini gitu. Ngga tau dibongkar, ngga tau engga, kan ada tiga itu (bunker). Kalo pendapat saya, kenapa ngga dari dulu gitu, itu diurusin, diberesin gimana gitu buat anak-anak cucu kita lah, bukan sekarang udah dibeli baru muncul dari pemerintah, kepolisian. Kan dekat ini yang punya hotel, sering ngobrol di sini, akrab gitu. Ada bunker Jepang katanya, ya dari pihak pemerintah ngga peduli gitu, baru sekarang ini, pas udah dibeli sama C*na. Kalo saya sih pengennya hotel itu tetep dibangun, tapi itunya (situs) jangan dimusnahkan, kan ada pengunjung bisa liat ke situ. Mudah-mudahan tambah rame di sini karena banyak pengunjung yang nginep di situ.” (petikan wawancara dengan Ibu Yati warga Pangandaran)

“Kalo hotel (di kawasan Badeto Ratu) dibangun, ya pasti (dampaknya) positif (ke bisnis hotel kami) masalahnya bakal lebih rame kan ke sananya gitu. Ya pasti jalur ini rame Bu! Masalahnya ini kan belum bisa dibuka... mubazir kan. Pastinya lebih menguntungkan (kalau hotel itu dibangun). Untuk pedagang-pedagang mungkin ada pemasukannya... Kalo untuk kasus itu, mungkin saya ngga bisa kasih pendapat, tergantung yang di atasnya (pejabat yang berkepentingan) gitu... tapi... lebih baik dibangun jadi rame, tambah rame. Jadi ini, jalan ini hidup nantinya gitu. Kalo masalah bunker-bunker itu mah... hahaha... kalo sebelah sini kan dataran, kalo mau bikin hotel ya udah jadi rame, kalo itu (kasus bunker) mah... biarin aja, itu urusan yang punya dengan yang ngurus di atasnya (pemerintah) gitu.” (petikan wawancara dengan Bp. Dodi pengurus salah satu hotel di kawasan Badeto Ratu)

Sungguh ironis, masyarakat pun terkesan apatis dalam menanggapi keberadaan benda peninggalan sejarah di lingkungannya. Saat ditanya pendapat mereka tentang kasus pendirian hotel di kawasan Badeto Ratu yang notabene merupakan kawasan Cagar Budaya, mereka nampak tidak peduli pada keberadaan situs Bunker Jepang. Pengetahuan mereka tentang nilai sejarah Bunker Jepang pun nihil. Maka, tidak heran jika agenda pembongkaran situs Bunker Jepang oleh para pengusaha hotel yang sekaligus menjadi ancaman bagi kelestarian benda peninggalan bersejarah di kawasan tersebut, justru diacuhkan oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena hilangnya “sense of belonging” antarmasyarakat dengan lingkungannya. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi alasan ketidakpedulian masyarakat terhadap situs peninggalan sejarah di lingkungannya.

Di lain sisi, perhatian justru datang dari kelompok pemuda yang menamakan dirinya “Paguyuban Pemandu Wisata Pangandaran.”

“Secara tidak langsung, kita sebagai pemandu, yang pertama,

yang kita jual dulu kan pasti alam, nah setelah alam, peninggalan-peninggalan sejarah. Nah peninggalan sejarah di Cagar Alam kan tidak hanya satu, ada beberapa peninggalan, salah satunya Gua Jepang, Batu Kalde, terus ada lagi situs petilasan Syekh Mahsen Muhammad, sambil guiding, sambil bawa tamu, terus ketika kita berhubungan dengan masyarakat bahwa ini peninggalan yang potensi untuk kita manfaatkan, dan kita juga punya kewajiban untuk menjaga. Secara tidak langsung kita harus menjaganya, karena kalau Gua Jepangnya rusak, Batu Kaldenya ngga ada, apa yang mau kita sampaikan? Apa yang mau kita jual?” (Petikan wawancara dengan Asep, ketua Paguyuban Pemandu Wisata Pangandaran)

Seperti yang diakui Asep, bahwa segala bentuk aktivitas berupa pengelolaan organisasi, pengumpulan data/ materi, promosi pariwisata, sampai saat ini masih dilakukan secara swadaya. Bahkan, inisiatif pembuatan papan informasi berupa objek wisata unggulan yang di antaranya juga termasuk situs Cagar Budaya, justru dilakukan oleh Paguyuban, bukan lah Pemda/ instansi terkait.

Eksistensi organisasi ini otomatis turut mendukung pula kelestarian objek-objek pariwisata Pangandaran, baik Cagar Alam maupun Cagar Budaya. Terlebih lagi, keprihatinan atas terungkapnya kasus pembongkaran situs Bunker Jepang di kawasan Badeto Ratu oleh pengusaha hotel, pada awalnya justru datang dari komunitas ini.

“Selama satu bulan, saya berusaha secara persuasive dengan pemilik lahan (untuk menghentikan aktivitas) tapi memang nggak digubris, (kemudian) saya bikin berita, kebetulan saya freelance di Radar (Pangandaran) karena saya kalo ngandalin di sini kan lumayan bingung, dari BPCB (Serang) nggak ada datang-dateng. Kebetulan ada yang nawarin freelance di Radar, ya udah saya ambil aja... Saya tulis langsung (kasus ini). Dua bulan kemudian saya bikin e-mail, ke Dirjen, sama foto-fotonya saya kirim. Saya punya tanggung jawab! Di sini saya sebagai ketua pemandu, saya yang berjuang, yang nge-bentuk, yah... sempat kontra juga dengan masyarakat... Uh... saya dimusuhi satu RW, kan (aparatur) memutar balik. Jadi gini, isu yang dihembuskan ke masyarakat bahwa nanti kalau dibangun hotel di sini, masyarakat ekonominya bisa terbantu, bisa keangkat, bisa wah... segala rupa... terus... beliau kan ngasih (?) ke lingkungan, jadi masyarakat kan... wah... dukung semua. Awalnya masyarakat kan fokus ini semua, saya kan ngelawan, tapi saya gini, saya lapor Sekda, ngga mempan, saya bawa Bupati ke sini! Saya bawa juga ormas! Saya komporin ormas, ayo! Jadi, kelompok masyarakat yang kontra itu diluar (komunitas) guide ini, di luar pemandu, karena mereka ngga paham bahwa nilai

sejarah itu penting. Mereka ngga paham bahwa peninggalan sejarah harus dilindungi itu sangat penting. Jadi ketika saya bilang, ini peninggalan sejarah, kita harus menjaganya. Mereka jawab, 'ya kan udah jaman dulu!' wah susah! Karena awalnya memang mereka sudah terdoktrin, jadi ketika ada hotel di sini masyarakat bisa... padahal yang sudah-sudah juga, masyarakat mah... ditinggalin.” (Petikan wawancara dengan Asep, ketua Paguyuban Pemandu Wisata Pangandaran)

Bersama komunitasnya, Asep berjuang untuk melakukan upaya penyelamatan situs dari ancaman kerusakan. Tindakan ini tentu mendapat respon pro dan kontra dari masyarakat. Sebagian besar kelompok masyarakat justru malah mendukung dilakukannya pembangunan hotel di kawasan Badeto Ratu. Banyaknya tekanan dan intimidasi dari pihak pengusaha serta masyarakat, akhirnya membuat Asep memutuskan untuk melakukan 'perlawanan' melalui media. Cara ini dianggap sebagai 'senjata' paling ampuh dalam memobilisasi publik untuk mendukung kepentingannya. Melalui media, kasus ini lantas menjadi 'booming' seketika di kalangan masyarakat, pemerhati sosial, sejarah dan budaya, serta pemerintah. Sejak saat itu, baru lah muncul perhatian dari kalangan masyarakat luas dan pemerintah terhadap keberadaan situs di Pangandaran, khususnya kawasan Badeto Ratu.

“Untuk masalah situs, memang kita menyadari bahwa (persoalan) situs itu baru terbuka pencerahan (dari) kita baru kemarin-kemarin lah, sejak kasus ini (ancaman kelestarian situs Badeto Ratu). Kita baru terbuka bahwa di sana memang ada situs yang merupakan tanggung jawab kita. Selama ini kan situs itu ada di Hutan Lindung, kita tidak concern ke sana karena memang sudah ada yang menanganinya. Tapi setelah sekarang terbuka gitu, ada informasi baru kita ngeh, bahwa di sana ternyata ada situs yang tentu juga harus menjadi perhatian pemerintahan desa. Karena pengetahuan kita tentang ini baru sekarang ini lah, mungkin itu salah satu kekurangan kita semua, karena informasinya kan baru kita terima sekarang. Ya kalau misalnya perhatian ke depan, berarti ini salah satu perhatian kita juga. Sebelumnya memang belum ada (program desa) khusus untuk situs.” (Petikan wawancara dengan Drs. Iwan Herdiawan, Kepala Desa Pangandaran).

Perlu dipahami bahwa tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk terlibat langsung dalam upaya pelestarian Cagar Budaya, tidak lahir secara instan. Dibutuhkan tahapan-tahapan yang dapat diawali dengan melakukan agenda sosialisasi kepada masyarakat, untuk menumbuhkan semangat kepedulian, yang mungkin dapat dilanjutkan dengan mobilisasi melalui pembentukan forum komunitas pelestarian situs Cagar

Budaya. Beberapa langkah ini sekiranya dapat memberikan persepsi baru bagi masyarakat agar masyarakat mau terlibat secara aktif dalam upaya penyelamatan dan pelestarian situs Cagar Budaya di lingkungannya.

Model Pengelolaan Biota Cagar Alam vs Situs Cagar Budaya

Lemahnya pengawasan serta kontrol terhadap pengelolaan situs Cagar Budaya oleh BPCB Serang, menjadi alasan utama terjadinya ancaman pembongkaran situs di kawasan Badeto Ratu, Pangandaran. Hal ini tidak hanya disampaikan oleh masyarakat sekitar, tetapi juga aparat keamanan di Hutan Lindung, kawasan Cagar Alam milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Jika dibandingkan, sistem pengawasan dan pengelolaan biota Cagar Alam sudah selangkah lebih maju daripada sistem pengawasan dan pengelolaan situs Cagar Budaya yang ada selama ini.

"Pengelolaan kawasan itu, beratnya adalah, dalam hal pengamanan. Sebagus apapun potensinya, kalau pengamanan lemah, rusak. Di sini tugas pokoknya pengamanan kawasan, di samping pelayanan. Kalau ada ini (ancaman) ada Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat, itu diturunkan langsung dari Jakarta. Jadi itu... tempat mana yang rawan, 'disikat'! Jadi kan gini, kalau (ada ancaman) hutan, banyak (elemen masyarakat) yang bereaksi... seharusnya Cagar Budaya seperti itu juga. Pokoknya jangan khawatir, selama (situs) ada di dalam kawasan (Cagar Alam), itu pasti aman, karena itu di dalam kawasan... Kalau di luar kawasan... itu kan bukan ranah kita untuk ke arah situsnya, walau pun berbatasan dengan (kawasan) kita. Batas-batas kawasan juga harus jelas! Untuk menghindari terjadinya konflik (dengan masyarakat). Kayak (persoalan) kita nih, ada perahu masuk kawasan, itu tadinya ada pembiaran! Harusnya ngga boleh. Itu salah satunya, dari rekan-rekan yang dulu dibiarkan. Seharusnya tidak boleh, karena perahu itu kan merusak karang-karang. Jadi kalau surut, perahunya digitukan (didorong) karang-karang kan mati, karena itu tempat tumbuhnya ikan. Saya sudah melakukan pembebasan di depan kali (sungai) situ sudah dibebaskan dari perahu, cuman yang ini nanti kalau dua bulan jadi, Insya Allah (akan dibebaskan), karena kita sudah berkoordinasi... Persoalan (tantangan) pelestarian situs yang ada di tengah-tengah lingkungan masyarakat memang itu hal yang berat, mendingan dikeramatkan saja. Kalau dikeramatkan itu pasti aman karena masyarakat takut (merusak). Sama dengan (yang dilakukan dalam pelestarian) hutan juga, kalau hutan dikeramatkan, pasti masyarakat takut." (Wawancara dengan Bp. Yana, Kepala BKSDA Kab. Pangandaran).

Berbagai cara ditempuh oleh BKSDA untuk melakukan monitoring/ pengawasan dan pengamanan biota yang ada di

dalam kawasan Cagar Alam, baik melalui penerjunan pasukan keamanan yakni *Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat* jika terjadi ancaman di suatu kawasan; negosiasi dan koordinasi secara intensif dengan masyarakat lokal untuk melakukan pembebasan kawasan yang rawan dengan tidak perusakan; bahkan BKSDA tidak segan menempuh jalur negosiasi dengan masyarakat secara kultural, yakni dengan cara mengubah paradigma masyarakat tentang konsep lingkungan 'keramat'. Dalam hal ini, konsep 'keramat' merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat yang memiliki dampak bagi kelestarian kawasan secara tidak langsung. Jika BKSDA berani melakukan pendekatan budaya sebagai sistem pengelolaan Cagar Alam, mengapa BPCB tidak?

Beberapa langkah yang telah ditempuh BKSDA tersebut setidaknya dapat menjadi contoh bagi BPCB untuk melakukan pengawasan dan pengamanan situs Cagar Budaya.

Mekanisme Kerjasama Antar lembaga Pemerintah

Pengelolaan suatu kawasan akan berjalan dengan baik apabila diawali dengan manajemen perencanaan yang baik pula, apalagi jika di suatu kawasan tersebut terdapat sejumlah objek yang menjadi kewenangan beberapa instansi/ lembaga. Oleh karena itu, nota kesepahaman atau yang biasa disebut *Memorandum of Understanding* (MoU) sangat lah penting untuk dilakukan agar tercipta keamanan, ketertiban kerjasama yang dilakukan antar lembaga, serta kejelasan atas pembagian tanggungjawab dalam pengelolaan kawasan. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Yana selaku Kepala BKSDA Kab. Pangandaran.

"Antara BKSDA (Pangandaran) dengan BPCB (Serang), satu sama lain saling tahu, belum ada MoU. Kita mempunyai tujuan yang sama, untuk pelestarian dan dimanfaatkan (sebagai sarana) penelitian (dan) pendidikan, namun kendalanya beda aturan. Menurut aturan BKSDA, ada aturan yang melarang tentang pemotongan kayu, akar... Semacam (pembicaraan) tadi, tumbuhnya akar yang ada di area situs, dikhawatirkan akan merusak situs, sehingga harus di tebang, tapi menurut aturan kita kan (akar itu) tidak boleh ditebang. Ya harus ada (MoU) lah, jadi kita bisa mengatakan ke rekan petugas 'ini sudah ada MoU', kita harus sama-sama berkoordinasi. Saya kan orang lapangan, tidak bisa ambil kebijakan begitu saja. MoU harus dilakukan supaya ada kejelasan di antara kita. Karena kita punya tujuan yang sama, tapi aturan yang berbeda. Ya itu tadi contohnya, tumbuhnya akar yang ada di area situs, menurut BPCB harus ditebang karena merusak situs, tapi menurut kami, itu tidak boleh ditebang, itu yang harus disamakan persepsi dalam MoU. Hutan kita itu Hutan Pelestarian, tidak bisa diperbarui. Walaupun

kita mengalami longsor di Cagar Alam, biarkan saja! Nanti bisa tumbuh dengan sendirinya. Jadi dibiarkan saja." (Wawancara dengan Bp. Yana, Kepala BKSDA Kab. Pangandaran)

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Yana di atas, bahwa MoU merupakan langkah penting untuk menjalankan kerjasama antar lembaga yang bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang pengelolaan kawasan. Dalam kesepakatan ini, sebaiknya rambu-rambu juga harus diterapkan dalam setiap kerjasama, sebagai dasar untuk menentukan pilihan kebijakan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Dengan adanya MoU, maka kerjasama yang terjalin antara BPCB Serang dengan BKSDA Kab. Pangandaran/ instansi pemerintah lainnya, diharapkan dapat berjalan sesuai dengan dasar hukum yang ada.

Penutup

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam upaya pelestarian Cagar Budaya. Hal ini juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, pasal 2 huruf h, bahwa di samping kewenangan pemerintah, pengelolaan Cagar Budaya juga memerlukan partisipasi masyarakat bagi kepentingan yang luas, dengan kata lain paradigma pengelolaan Cagar Budaya saat ini telah diarahkan pada pelibatan masyarakat secara aktif (Mulyadi, 2011). Namun dalam prakteknya, belum ada kerjasama yang terjalin secara sinergis antara pemerintah (BPCB Serang) dan masyarakat, sebab selama ini pendekatan 'top-down' (implementasi kebijakan dari level atas) lebih sering digunakan dalam pengelolaan Cagar Budaya. Padahal, penanganan spasial kawasan bersejarah yang berada di tengah-tengah masyarakat juga memerlukan upaya pendekatan 'bottom-up', yang artinya perencanaan pengelolaan Cagar Budaya sebaiknya dimulai pada tataran masyarakat untuk selanjutnya disusun sebagai rencana pengelolaan di tingkat pusat.

Ancaman terhadap kelestarian benda Cagar Budaya hanya dapat dicegah jika berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, LSM, dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) bisa berkoordinasi dengan baik dan saling bahu-membahu untuk mencapai tujuan bersama yakni pelestarian aset budaya agar dapat berfungsi optimal untuk peningkatan pemahaman peradaban dan kesejahteraan masyarakat.

**Beberapa nama informan dalam tulisan ini telah disamarkan sebagai bentuk proteksi.*

Referensi

Mulyadi, Yadi. 2011. "Optimalisasi Peran Komunitas dalam Pengelolaan Cagar Budaya Kompleks Benteng Otanaha

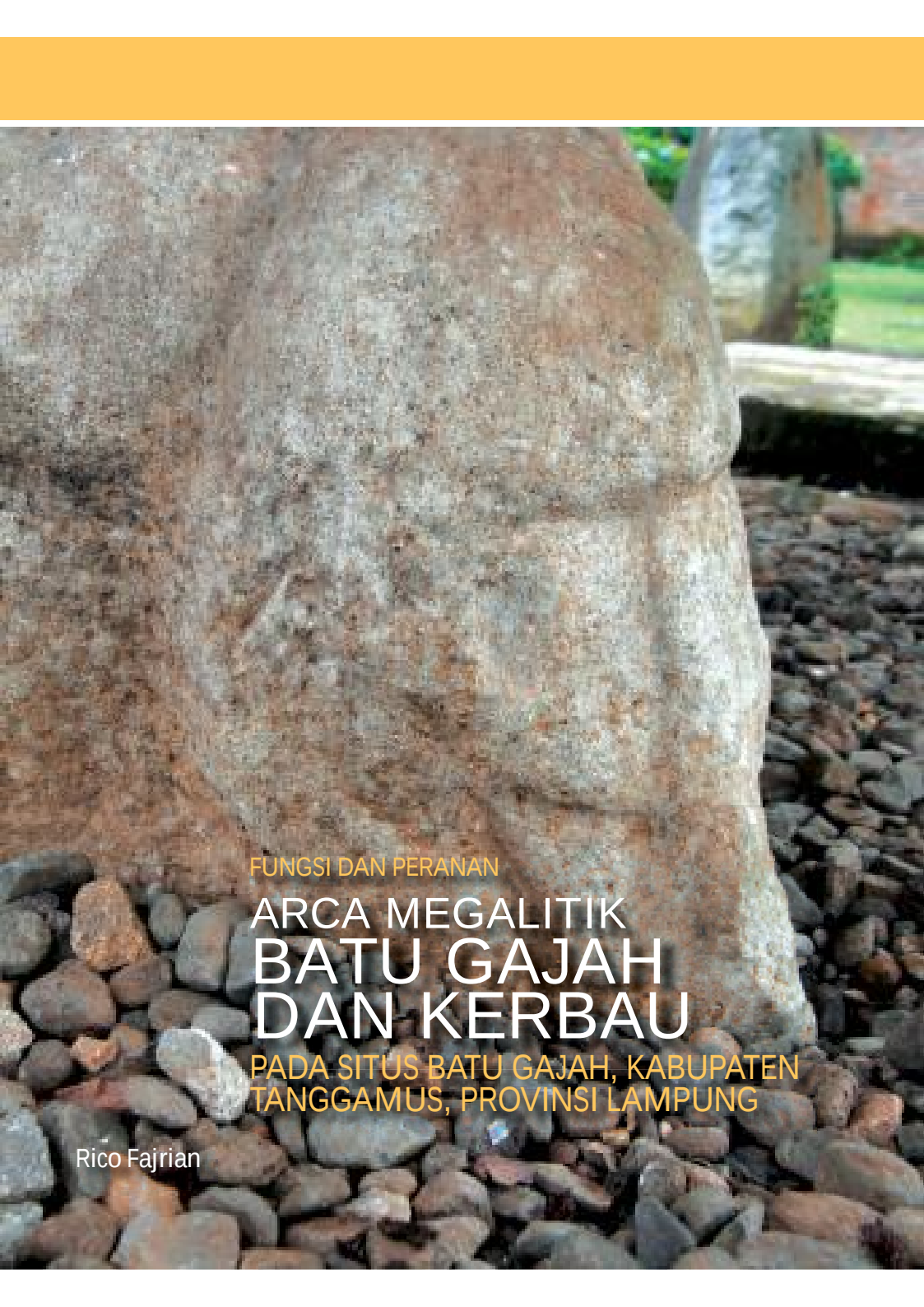
di Gorontalo" dalam Buletin Umulolo Vol. 1 No.1. Gorontalo: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala.

Rachman, Maman. 2012. "Konservasi Nilai dan Warisan Budaya". Indonesian Journal of Conservation Vol.1 No.1 – June 2012.

Siswanto. 2007. "Pariwisata dan Pelestarian Budaya". Berkala Arkeologi Tahun XXVII Edisi No.1 Mei 2007.

Yogaswara, Herry. 2014. "Perspektif Politik-Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Kebudayaan: Pengalaman Banten Lama" dalam Buletin Kalatirta Vol. 2. Serang: Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang.

Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.



FUNGSI DAN PERANAN

ARCA MEGALITIK BATU GAJAH DAN KERBAU

PADA SITUS BATU GAJAH, KABUPATEN
TANGGAMUS, PROVINSI LAMPUNG

Rico Fajrian

Tradisi megalitik adalah salah satu bentuk ciptaan manusia yang dicirikan oleh benda-benda megalit berupa bangunan dari batu. Istilah megalitik berasal dari kata *mega* yang berarti besar, dan *lithos* yang berarti batu. Pendirian bangunan megalitik selalu berdasarkan pada kepercayaan akan adanya hubungan antara yang hidup dan yang sudah meninggal. Kepercayaan ini menganggap bahwa roh seseorang tidak lenyap pada saat orang meninggal. Roh dianggap mempunyai kehidupan di alamnya tersendiri sesudah orang meninggal. Kemudian muncullah kepercayaan bahwa roh-roh tersebut masih selalu berhubungan dengan orang yang masih hidup, dan dianggap mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pengertian megalit sebagai batu besar dalam kenyataannya tidak selalu diterapkan sesuai dengan arti yang sebenarnya. Namun menurut F.A. Wagner dalam "Indonesia: The Art of an Island Group" menyatakan bahwa bangunan megalitik tidak hanya batu besar akan tetapi batu kecil dan bahkan tanpa monumen pun dapat dikatakan berciri megalitik apabila benda tersebut dimaksudkan untuk pemujaan arwah nenek moyang (Wagner, 1962).

Bangunan-bangunan megalitik tersebar hampir di seluruh Kepulauan Indonesia. Bentuk bangunan megalitik pun sangat beragam meskipun sebuah bentuk berdiri sendiri ataupun beberapa bentuk merupakan suatu kelompok, maksud utama dari pendirian bangunan tersebut tidak luput dari latar belakang pemujaan roh nenek moyang, dan pengharapan kesejahteraan bagi yang masih hidup, serta kesempurnaan bagi yang sudah meninggal.

Banyaknya temuan bangunan-bangunan megalitik di Indonesia mengundang banyak pendapat dari para ahli mengenai asal masuknya budaya

megalitik ke Indonesia. Pada tahun 1913 muncullah W.H.R. River dan G. Elliot Smith (dalam Perry, 1918) yang telah melakukan penelitian tidak hanya di Eropa dan di daerah Mediterania saja, tetapi juga sampai ke kawasan Oceania. Pendapat G. Elliot Smith yang berdasarkan persebaran bangunan-bangunan megalitik, mengungkapkan bahwa kawasan Mediterania mendapat pengaruh tradisi megalitik dari Mesir. Lebih jauh dikatakannya, bahwa ada hubungan langsung antara bangunan-bangunan megalitik di Eropa dan Mediterania dengan penyembah matahari. Ia juga mengatakan bahwa bangunan-bangunan megalitik di kawasan Oceania adalah ciptaan para pendatang penyembah matahari.

Sementara pendapat lain datang dari W.H.R. River yang mengungkapkan bahwa telah terjalin hubungan budaya antara Indonesia dengan Mediterania, dan Polinesia. Dalam persebaran budaya ini, Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting, karena merupakan mata rantai penghubung migrasi dari barat ke kawasan Pasifik yang tidak lain adalah pendiri bangunan megalitik penyembah surya/matahari (Sutaba, 2001).

Selain itu, muncullah spekulasi mengenai asal-usul tradisi megalitik yang dipengaruhi oleh paham hyperdifusionisme dari MacMillan Brown (1907) yang berpendapat, bahwa tradisi megalit ini dibawa oleh orang Kaukasia yang datang melalui Mediterania dan Asia Selatan. Peneliti lainnya W.J. Perry (1918) beranggapan, bahwa bangunan-bangunan megalitik di Indonesia berasal dari Mesir Kuna yang dibawa oleh para keturunan Dewa Matahari (Perry, 1918 dalam Sutaba, 2001). Ditambahkannya, bahwa para pendatang dari Mesir ini adalah pencari emas yang memperkenalkan pengerjaan batu dan pemujaan kepada matahari kepada penduduk Indonesia. Ternyata pendapat ini tidak dapat diterima oleh para ahli prasejarah, karena tidak adanya bukti-bukti yang mendukung pendapat itu (Mulia, 1981 dalam Sutaba, 2001).

Tersebar tradisi megalitik hampir di seluruh Indonesia, H.R.von Heine Geldern berpendapat, bahwa tradisi ini dibawa oleh pemakai Bahasa Austronesia yang datang ke

Indonesia melalui India dan Malaka. Diduga, bahwa Indonesia yang menerima tradisi megalitik dalam dua gelombang, yaitu sebagai berikut:

Megalitik Tua yang diwakili antara lain oleh menhir, undak batu, dan patung-patung simbolis-monumental bersamasama dengan pendukung kebudayaan beliung yang diperkirakan berusia 2500 – 1500 Sebelum Masehi dan dimasukkannya dalam masa Neolitik. Megalitik tua ini dibawa oleh para imigran melalui Tonkin menuju Malaysia Barat dan masuk ke Indonesia melalui Sumatera. Dari Sumatera, sebagian berlanjut ke Jawa dan terus ke Nusa Tenggara, sedangkan sebagian lagi menyebar ke Kalimantan terus ke utara.

Megalitik Muda yang diwakili antara lain oleh peti kubur batu, dolmen semu, sarkofagus, yang berkembang dalam masa yang telah mengenal perunggu dan berusia sekitar awal millenium pertama Sebelum Masehi hingga abad-abad pertama Masehi (Soejono, ed, 1984). Megalitik muda ini diperkirakan datang bersama-sama dengan kebudayaan Dongson.

Di Indonesia, keberadaan bangunan-bangunan megalitik sangatlah umum. Sampai saat ini belum dapat dihitung secara pasti jumlahnya. Namun demikian hasil penelitian telah menunjukkan sebaran yang sangat luas, baik yang dimulai dari ujung barat (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung), kemudian di Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur), Sulawesi (Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan), sampai ke daerah di wilayah timur (Bali, Sumba, Sumbawa, Flores, Timor, Sabu, Maluku, dan Papua).

Terdapatnya temuan bangunan-bangunan megalitik tentunya tidak terlepas dari latar belakang kepercayaan pendukungnya. Pada hakekatnya bangunan-bangunan megalitik ini dibuat karena adanya konsep kepercayaan adanya kehidupan setelah kematian. Berdasarkan konsep tersebut para pendukung tradisi megalitik melakukan pemujaan kepada nenek moyang.

Pada umumnya dalam melaksanakan pemujaan terhadap nenek moyang, pendukung tradisi megalitik menggunakan suatu media, baik yang berupa bangunan besar maupun tanpa bangunan sama sekali. Bangunan-bangunan megalitik tersebut dapat berupa punden berundak, dolmen, kursi batu, altar batu, menhir, dan arca megalitik.

Arca megalitik dalam hubungannya dengan keperluan manusia, tampaknya hanya mengacu kepada aspek religius. Eratnya arca megalitik dalam aspek religius, dalam hal ini berkaitan dengan pemujaan terhadap arwah. Maka ada beberapa tokoh yang menyebutnya sebagai arca nenek moyang, arca pemujaan, dan arca leluhur. Arca megalitik pada dasarnya dapat terdiri atas arca manusia dan arca binatang. Maka dari

itu perlu ditinjau tentang konsep arca tersebut, karena saat ini terdapat temuan arca megalitik yang berbentuk binatang seperti harimau, kera, gajah dan lain-lain yang secara langsung berkaitan erat dengan tinggalkan megalitik lainnya.

Di Provinsi Lampung terdapat arca megalitik berupa arca gajah dan arca kerbau yang tepatnya berada di Jl. Air Bakoman, Dusun Batu Bedil, Desa Batu Bedil Hilir, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus. Temuan arca gajah dan arca kerbau ini berdekatan dengan temuan-temuan batu tegak yang berada di sekitarnya.

Pembahasan

Kabupaten Tanggamus adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Kota Agung Pusat. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.731,61 km² dan berpenduduk sebanyak 536.613 jiwa dengan kepadatan penduduk 178 jiwa/km². Nama Kabupaten Tanggamus diambil dari nama Gunung Tanggamus yang berdiri tegak tepat di jantung Kabupaten Tanggamus.

Secara geografis wilayah Kabupaten Tanggamus terletak pada posisi 104°18' – 105°12' Bujur Timur dan antara 05°05' – 05°56' Lintang Selatan. Topografi kabupaten Tanggamus bagian barat semakin ke utara condong mengikuti lereng Bukit Barisan. Sementara itu, bagian selatan meruncing dan mempunyai sebuah teluk yang besar, yaitu Teluk Semangka, yang memiliki panjang daerah pantai seluas ± 200 km dan sebagai tempat bermuaranya 2 (dua) sungai besar, yaitu Way Sekampung dan Way Semaka. Selain itu wilayah kabupaten Tanggamus dipengaruhi oleh udara tropikal pantai dan dataran pegunungan dengan temperatur udara yang sejuk dengan rata-rata 28°C.

Kecamatan Pulau Panggung yang merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Tanggamus terdiri dari beberapa desa. Jarak antara satu desa dengan desa lainnya relatif jauh. Secara umum dapat dikatakan merupakan daerah yang berpenduduk jarang. Pemukiman penduduk hanya berada di sepanjang tepi jalan.

Bentang alam daerah berupa pedataran bergelombang. Secara umum, ketinggian berkisar antara 300 – 400 meter dari permukaan laut. Lahan yang ada di wilayah ini selain dimanfaatkan untuk pemukiman, sebagian besar berupa kebun, ladang, dan sawah. Sungai yang mengalir di daerah ini antara lain adalah Sungai Ulok Ngaherong beserta anak-anak sungainya dan Sungai Ilahan. Sungai Ulok Ngaherong menyatu dengan Sungai Ilahan. Sungai Ilahan menyatu dengan Way Sekampung.

Di kecamatan Pulau Panggung terdapat beberapa situs yang antara lain berada di desa Gunung Meraksa dan desa Batu



Batu Bedil

Bedil Hilir. Di desa Gunung Meraksa terdapat tinggalkan bangunan megalitik, yaitu adanya sebuah kompleks megalitik yang memiliki sebuah menhir berukuran besar dan tinggi yang oleh masyarakat setempat dinamakan dengan "Batu Bedil". Dinamakan demikian dikarenakan dahulunya sering terdengar adanya bunyi letusan. Menhir Batu Bedil ini memiliki ukuran lebar ± 109 cm dan tinggi ± 220 cm, selain "Batu Bedil" pada lokasi tersebut juga banyak ditemukan batu-batu tegak, lumpang batu, altar batu/dolmen, dan batu bergores.

Tidak jauh dari kompleks megalitik Batu Bedil, ± 100 meter di sebelah barat, terdapat sebuah prasasti yang dinamakan dengan Prasasti Batu Bedil. Prasasti dituliskan pada seongkah batu berukuran tinggi ± 157 cm dan lebar 72 cm. Prasasti terdiri 10 baris dengan tinggi

huruf sekitar ± 5 cm. Tulisan tersebut berada dalam satu bingkai. Pada bagian bawah bingkai terdapat goresan membentuk padma atau bunga teratai. Kondisi huruf sudah aus namun di beberapa bagian masih bisa terbaca. Pada baris pertama terbaca *Namo Bhagawate* dan pada baris kesepuluh terbaca *Swāhā*. *Namo Bhagawate* sebagai permulaan dan *Swāhā* sebagai penutup memberi dugaan bahwa prasasti itu berkaitan dengan mantra. Bahasa yang digunakan adalah Sansekerta. Prasasti ini tidak berangka tahun. Ditinjau dari paleografisnya, prasasti ini menunjukkan berasal dari akhir abad ke-9 atau awal abad ke-10 (Soekmono, 1985). Selain temuan prasasti, pada Kompleks Prasasti Batu Bedil juga terdapat beberapa batu-batu tegak dan batu altar.

Prasasti Batu Bedil





Batu Kerbau



Batu Gajah

Sedangkan pada desa Batu Bedil Hilir yang berjarak $\pm$ 2 km ke arah barat dari lokasi kompleks megalitik dan Prasasti Batu Bedil, terdapat lokasi situs yang oleh masyarakat sekitar dinamakan dengan situs Batu Gajah. Situs ini berada di tengah pemukiman penduduk yang cukup padat dan berada pada lahan datar seluas $\pm$ 750 m². Di situs ini terdapat dua arca batu yang berbentuk seperti gajah dan kerbau. Selain kedua arca tersebut, pada lahan situs ini juga terdapat 13 buah batu tegak.

Arca Batu Gajah merupakan sebuah batu monolit

yang berukuran tinggi $\pm$ 94 cm, lebar $\pm$ 201 cm, tebal $\pm$ 164 cm, dan berbahan tufa. Pada sisi batu yang menghadap ke selatan terdapat goresan yang membentuk kepala gajah. Kepala gajah digambarkan secara lengkap dengan belalai, gading, mata, dan kuping. Belalai digambarkan menjuntai ke bawah. Pada sisi kiri dan kanan batu tersebut terdapat goresan-goresan yang membentuk badan serta kaki. Arca Batu Gajah secara astronomis berada pada titik koordinat 05° 18' 07,3" Lintang Selatan dan 104° 40' 59,0" Bujur Timur.

Sedangkan arca Batu Kerbau berada di sebelah barat Batu Gajah. Batu Kerbau berukuran tinggi $\pm$ 100 cm, lebar $\pm$ 140 cm, dan tebal $\pm$ 135 cm. Arca Batu Kerbau ini juga berbahan tufa. Batu Kerbau menghadap ke selatan. Muka arca digambarkan secara lengkap dengan mulut, hidung dan mata. Goresan pada sisi selatan membentuk kepala kerbau dengan tanduk yang melingkar. Di belakang kepala terdapat tonjolan. Pada bagian ini terdapat dua cekungan yang masing-masing berdiameter sekitar $\pm$ 5 cm, dengan kedalaman sekitar $\pm$ 5 cm. Arca Batu Kerbau secara astronomis berada pada titik koordinat 05° 18' 07,2" Lintang Selatan dan 104° 40' 58,8" Bujur Timur.



Temuan arca megalitik yang berbentuk binatang dapat juga ditemukan di daerah lain misalnya di Palembang (Soekmono, 1985) dan di Dataran Tinggi Pasemah (Kusumawati dan Haris Sukendar, 2003).

Selain Batu Gajah dan Batu Kerbau, di lahan situs ini juga terdapat sejumlah batu tegak yang tidak menunjukkan adanya pengerjaan. Batu tegak yang terdapat di lokasi situs Batu Gajah berjumlah ± 13 batu.

Temuan arca megalitik yang berbentuk binatang dapat juga ditemukan di daerah lain misalnya di Palembang (Soekmono, 1985) dan di Dataran Tinggi Pasemah (Kusumawati dan Haris Sukendar, 2003). Bentuk-bentuk arca binatang yang ditemukan ada yang hanya bentuk binatang saja dan ada juga disandingkan dengan manusia.

Munculnya pembuatan arca-arca berbentuk binatang dan juga adanya arca binatang yang dipahatkan bersama dengan manusia, kemungkinan dimaksudkan sebagai suatu simbol penguasaan manusia terhadap alam lingkungan yang ganas atau liar, serta merupakan suatu kontak magis. Hal ini seperti yang dikatakan oleh E. A. Kosasih (1995), bahwa penggambaran binatang-binatang pada dinding gua-gua merupakan simbol agar binatang tersebut mudah diburu. Sesuai dengan hal tersebut, maka pembuatan arca-arca binatang dimaksudkan agar binatang tersebut saat berkeliaran di sekitar pemukiman

tidak mengganggu manusia baik saat mengerjakan kegiatan sehari-hari ataupun saat melakukan perjalanan (Kusumawati dan Haris Sukendar, 2003).

Pengarcean dalam bentuk binatang-binatang yang ganas atau satwa-satwa liar mengandung dua aspek. Aspek yang pertama mengacu kepada suatu permohonan untuk memperoleh perlindungan. Adapun aspek yang kedua merupakan suatu cetusan cipta, rasa, dan karsa di bidang seni yang berintikan pada aspek lingkungan. Munculnya pahatan-pahatan satwa liar dan satwa hutan lainnya secara langsung atau tidak langsung, mencerminkan suatu kehidupan alam lingkungan yang dihadapi oleh nenek moyang pada masa purba tersebut (Kusumawati dan Haris Sukendar, 2003). Berdasarkan penjelasan di atas, maka dengan ditemukannya arca Gajah dan arca Kerbau di desa Batu Bedil Hilir, kecamatan Pulau Panggung, kabupaten Tanggamus ini, jelas pada saat itu masyarakat desa Batu Bedil Hilir ini telah mengenal binatang-binatang seperti gajah dan kerbau. Selain itu, fungsi dan peranan dari pengarcean binatang tersebut dimaksudkan agar binatang-binatang tersebut dapat dikuasai dan tidak mengganggu masyarakat sekitar.

Penutup

Arca megalitik berbentuk binatang yang terdapat di desa Batu Bedil Hilir, kecamatan Pulau Panggung, kabupaten Tanggamus adalah arca gajah dan arca kerbau. Selain arca gajah dan arca kerbau, di lokasi ini juga banyak ditemukan bangunan megalitik berupa batu tegak, baik yang berada di lahan situs maupun yang berada di luar lahan situs.

Maksud dari pengarcean dalam bentuk binatang-binatang yang ganas atau satwa-satwa liar secara langsung atau tidak langsung, mencerminkan suatu kehidupan alam lingkungan yang dihadapi oleh nenek moyang pada masa purba. Selain itu, pengarcean gajah dan kerbau dibuat bertujuan agar binatang tersebut dapat dikuasai dan saat binatang tersebut berkeliaran di sekitar pemukiman tidak mengganggu aktivitas manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Djafar, Hasan dan W. Anwar Falah. 1995. "Prasasti Batu dari Sumberhadi Daerah Lampung Tengah (Suatu Informasi)". Dalam *Jurnal Penelitian Balai Arkeologi Bandung No. 1/ April/1995*. Bandung: Balai Arkeologi Bandung. Hlm. 1 – 3.
- Kusumawati, Ayu dan Haris Sukendar. 2003. *Megalitik Bumi Pasemah Peranan Serta Fungsinya*. Jakarta: Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata,

Pusat Penelitian Arkeologi.

Soejono, R. P (ed). 1984. "Jaman Prasejarah". *Sejarah Nasional Indonesia I edisi ke-4*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka: Jakarta.

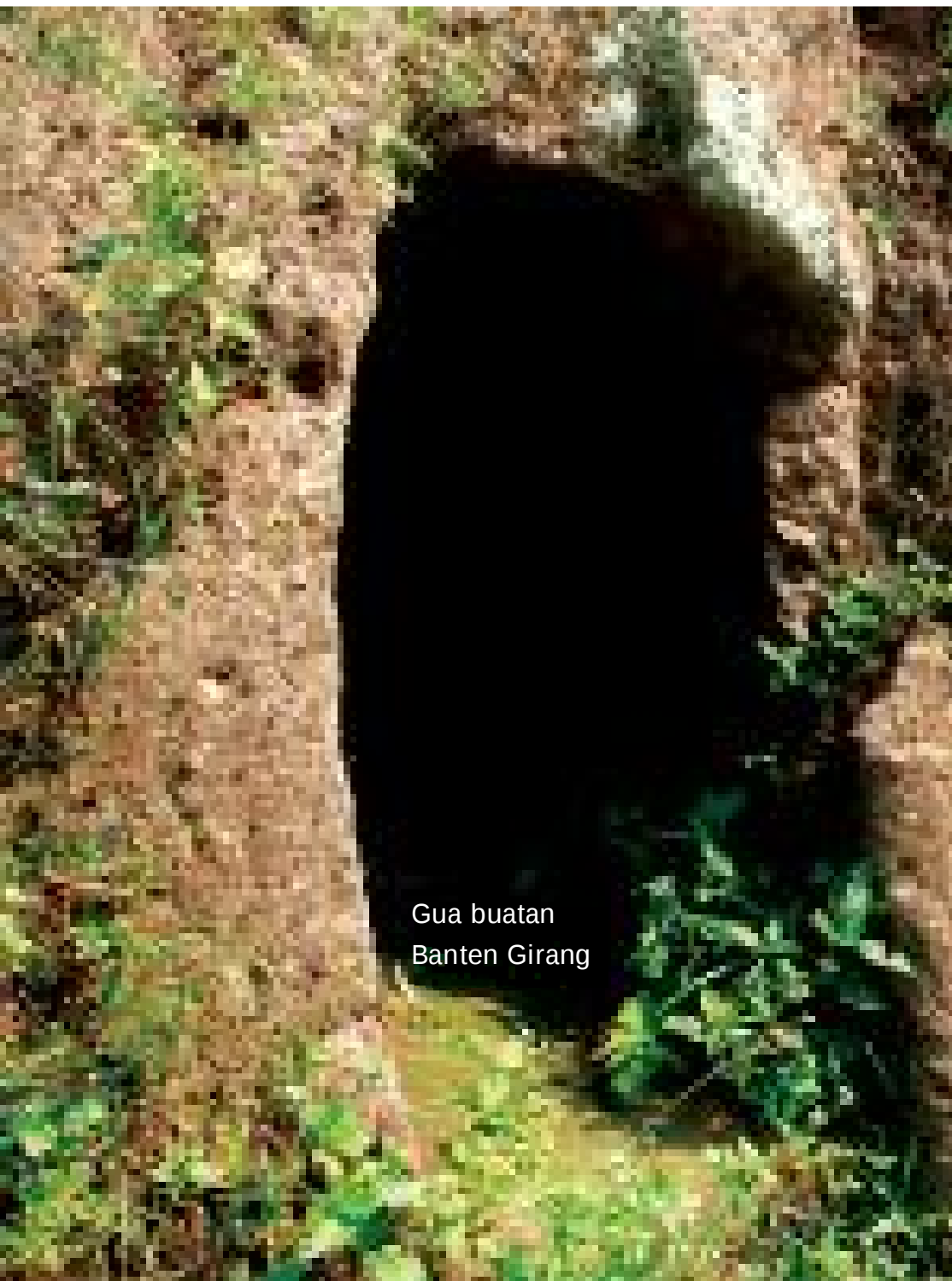
Soekmono, R. 1985. "Kisah Perjalanan ke Sumatra Selatan dan Jambi". Dalam Satyawati Suleiman et al. *Amerta 3*. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.



BAGAIMANAKAH STRUKTUR PEMERINTAHAN DI KERAJAAN BANTEN GIRANG



Dewi Puspito Rini



Gua buatan
Banten Girang

Siapa yang tidak mengenal Kesultanan Banten, yang terletak di ujung pesisir utara Pulau Jawa, yang selama abad ke-16 dan ke-17 memegang peran utama dalam perniagaan lada di Asia? Tetapi tahukah kita, bahwa sebelum Kesultanan Banten, ada kerajaan di daerah ini yang terlebih dahulu berdiri? Banten Girang, demikian nama kerajaan tersebut, yang berarti "Banten Hulu". Banten Girang terletak di pinggiran kota Serang, sekitar tiga kilometer di selatan Kaujon, pusat kota lama Serang. Kota Serang berkembang mulai paropertama abad ke-19, setelah orang Belanda menjadikannya sebagai pusat pemerintahan daerah tersebut, dengan maksud melenyapkan arti politik Kesultanan Banten (Guillot dkk., 1996).

Sajarah Banten menyebutkan bahwa Sunan Gunung Jati dan putranya, Hasanudin, meninggalkan Demak menuju Pelabuhan Banten pergi ke kota Banten Girang, yang merupakan pusat pemerintahan daerah tersebut. Kemudian mereka mengunjungi Gunung Pulasari yang terletak di pedalaman. Hasanudin lama tinggal di daerah ini, berada di tengah-tengah kaum *ajar* yang bermukim di gunung tersebut. Setelah Hasanudin berhasil mengislamkan kaum *ajar*, dan menjadi pemimpin rohani mereka, kemudian ia menyerang Banten Girang dan berhasil merebut kotanya. Berkat kemenangannya, Kesultanan Demak menobatkan Hasanudin sebagai raja baru di daerah Banten. Mengacu pada sumber tersebut, terbukti bahwa Banten Girang tidak dapat hanya dipandang sebelah mata. Seberapa pentingkah Banten Girang, hingga membuat Sunan Gunung Jati dan putranya jauh-jauh datang dari Demak untuk menaklukkannya?

Saat ditaklukkan Demak, pada waktu itu Banten Girang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda. Jawa bagian barat di masa lalu dikuasai oleh dua kerajaan besar, yakni Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Sunda. Kerajaan Tarumanegara dan Sunda Kuna merupakan kerajaan yang bercorak budaya India.

Keduanya berkembang di wilayah Jawa bagian barat dalam kurun waktu yang berbeda. Berdasarkan tinggalan arkeologinya, dapat ditafsirkan bahwa wilayah perkembangan kedua kerajaan tersebut berbeda. Kerajaan Tarumanegara berkembang di wilayah Jawa bagian barat sisi utara, meninggalkan prasastinya di wilayah Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Sementara itu, Kerajaan Sunda berkembang di wilayah pedalaman, terutama di pedalaman selatan-timur Jawa Barat (Munandar, 2013).

Kerajaan Sunda mempunyai wilayah yang relatif luas, meliputi seluruh Jawa bagian barat dan wilayah barat Jawa bagian tengah. Masa pemerintahan Kerajaan Sunda, atau yang disebut dengan Pajajaran oleh orang Jawa, dimulai dari abad ke-8 hingga abad ke-16 M. Banten Girang, yang mencapai masa keemasan pada abad ke-13 hingga abad ke-14, menjadi vassal Kerajaan Sunda pada abad ke-16.

Pertumbuhan dan perkembangan kerajaan masa klasik (pengaruh Hindu-Buddha) di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh India. Hal ini dapat diketahui dari beberapa aspek pranata kerajaan yang ada. Hampir seluruh pranata kerajaan yang berlaku di India, seperti kedudukan raja yang turun-temurun, kedudukan prameswari, kedudukan pejabat pusat dan daerah, masalah agama, peradilan dan segala urusan sipil lainnya, sedikit banyak ditiru oleh kerajaan-kerajaan masa klasik di Indonesia (Boechari, 1986).

Kekuasaan yang mutlak di tangan seorang raja dilegitimasi dengan dianutnya kepercayaan yang bersifat kosmologi. Dalam konsep kosmologi, terdapat suatu keyakinan bahwa keselarasan antara kerajaan dan jagat raya dapat dicapai dengan menyusun kerajaan sebagai gambaran jagat raya dalam bentuk kecil (Nurhadi, 1980). Hal ini membawa implikasi bahwa kekuasaan seorang raja didapatkan dari restu para dewa dan hyang.

Posisi seorang raja merupakan representasi dari

wakil dewa dan hyang di dunia, yang mendapat mandat untuk berkuasa di dunia. Hal tersebut termuat dalam naskah Sanghyang Siksakanda ng Karesian. Naskah yang dibuat tahun 1440 Saka (1518 Masehi) ini menjelaskan tentang kedudukan raja yang berada di bawah para dewa dan hyang.

"... mangkubumi bakti di ratu, ratu bakti di dewata, dewata bakti di hyang..."

Kalimat tersebut berarti: mangkubumi berbakti kepada raja, raja berbakti kepada dewata, dewata berbakti kepada hyang..." (Atja dan Saleh, 1981).

Hingga dewasa ini, kajian tentang sejarah Tatar Sunda secara umum memang telah dilakukan oleh para ahli. Namun jika dibandingkan dengan studi sejarah Jawa Kuna masih belum memadai. Artinya, kajian tentang sejarah Sunda Kuna jauh tertinggal dari telaah Jawa Kuna (Munandar, 2013).

Kerajaan Banten Girang yang bercorak Hindu, yang pada akhir masa pemerintahannya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda, besar kemungkinan pranata pemerintahan di kerajaan ini juga merujuk pada pranata kerajaan di India. Namun demikian, hal tersebut baru sebatas praduga, belum diketahui kebenarannya, karena belum ada kajian yang membahas tentang struktur pemerintahan di Kerajaan Banten Girang. Pada awal abad XVI, yang berkuasa di Banten adalah Prabu Pucuk Umun dengan pusat pemerintahan berlokasi di Banten Girang. Adapun Banten Ilir atau Banten Lama pada masa itu berfungsi sebagai pelabuhan.

Ciri pokok gugusan perkotaan Kerajaan Banten Girang terbagi atas dua bagian yang tak terpisahkan, yaitu kota Banten Girang dan pelabuhan Banten, meskipun keduanya berjarak 10 km. Hal ini sesuai dengan konsepsi tentang kerajaan yang berasal dari India, yakni sang raja yang diangkat menjadi dewa hidup atau bakal dewa, secara fisik memisahkan diri dari rakyatnya dan pedagang asing, yang dari segi hukum dan agama merupakan kelompok terasing dalam kerajaan (Guillot dkk, 1996). Pranata tersebut masih terus dipertahankan hingga masa Kesultanan Banten. Pada masa Kesultanan Banten masih ditemukan pemisahan-pemisahan tempat tinggal berdasarkan patokan bangsa maupun profesi yang mengingatkan pada struktur pemerintahan masa sebelumnya.

Tidak banyak yang tertinggal dari sisa-sisa kejayaan Banten Girang. Salah satu tinggalan Kerajaan Banten Girang dapat dilihat di situs Banten Girang. Situs ini terletak di Kampung Telaya, Desa Sempu, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Claude Guillot pada tahun 1988 - 1992, situs Banten Girang merupakan situs pemukiman/perkotaan. Penafsiran tersebut berdasarkan pada temuan struktur pertahanan yang berbentuk parit dan dinding

tanah dengan pola yang tidak teratur. Diperkirakan situs ini berasal dari abad ke-10 dan mencapai puncaknya pada abad ke-13 hingga 14 Masehi. Periodisasi tersebut mengacu pada temuan keramik asing, keramik lokal, fragmen prasasti, benda-benda logam, mata uang, fosil hewan, batu-batuan, dan manik-manik dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Guillot.

Struktur Pemerintahan Kerajaan Masa Jawa Kuna dan Sunda Kuna

Dikarenakan hingga kini belum ditemukan sumber tertulis yang memberikan informasi tentang struktur pemerintahan di Kerajaan Banten Girang, perlu kiranya melihat struktur pemerintahan pada masa Jawa Kuna dan Sunda Kuna. Sebagai gambaran dan perbandingan, struktur pemerintahan masa Jawa Kuna yang terdapat pada sumber prasasti patut dijadikan acuan. Beberapa prasasti yang menyebutkan tentang struktur pemerintahan pada masa Jawa Kuna antara lain adalah Prasasti Mulak I tahun 878 M, Prasasti Pañgumulan tahun 902 M, dan Prasasti Sugih Manek tahun 915 M. Kerajaan masa Jawa Kuna merujuk pada Kerajaan Mataram Hindu yang berpusat di Jawa Tengah hingga keindahannya ke Jawa Timur. Dalam birokrasi pemerintahan kerajaan Jawa Kuna, raja didampingi oleh para pangeran, di antaranya putra mahkota. Para pendamping raja tersebut adalah *rakarayan mapatih I hino*, *rakarayan I halu*, *rakarayan I sirikan*, *rakai wka*, dan *pamgat tiruan*. Di bawah mereka terdapat sejumlah pejabat, di antaranya pejabat kehakiman, pejabat pajak, dan pejabat keagamaan. Golongan kedua ini mungkin merupakan para pelaksana pemerintahan (Poesponegoro dkk., 1992).

Pada struktur pemerintahan Kerajaan masa Jawa Kuna telah ada ketentuan mengenai hak waris atas tahta kerajaan, yakni yang berhak untuk menggantikan duduk di atas tahta kerajaan adalah anak-anak raja yang lahir dari *parameswari*. Sampai pada jaman raja kula Rajasa, putra mahkota bergelar *rakarayan mapatih I hino*. Perlu diketahui bahwa *rakarayan mapatih i hino* tidak harus putra raja yang sedang memerintah. Ia dapat juga adik, kemenakan, paman atau kerabat dekat lain asalkan masih seketurunan secara langsung. Dua orang lagi yang berhak menggantikan duduk di atas tahta kerajaan dan memperoleh tempat di dalam hirarki pemerintahan yaitu *rakarayan i halu* dan *rakarayan i sirikan*.

Berdasarkan berita Cina dari Dinasti Sung, dikatakan bahwa di kerajaan Mataram terdapat tiga orang putra raja bertindak sebagai raja muda, ada pejabat yang bergelar *samgat* dan empat *rakarayan*, yang bersama-sama menyelenggarakan Negara sebagaimana para menteri di Cina. Mereka tidak memperoleh gaji tetap, tetapi pada saat-saat tertentu memperoleh hasil bumi dan barang-barang lain. Kemudian

menyusul 300 pegawai sipil, yang dipandang setingkat dengan *siu-tsai* di Cina, yakni pejabat yang lulus ujian jabatan tingkat terendah. Mereka bertugas mencatat dan mengelola pajak-pajak masuk. Di bawah mereka terdapat 1000 pejabat rendahan yang mengurus tembok dan parit kota, perbendaharaan kerajaan, lumbung-lumbung padi, dan para prajurit (Poesponegoro dkk., 1992).

Biasanya gelar *rakai* dan *pamgat* diikuti oleh nama tempat, yaitu nama wilayah kekuasaannya atau "lungguh"nya, yang disebut *watak*. Pejabat-pejabat di bawah para pangeran, pejabat tinggi kerajaan dan para penguasa daerah yang harus menyelenggarakan pemerintahan di wilayah *watak*, tidak digaji tetap berupa mata uang melainkan memperoleh daerah lungguh.

Prasasti-prasasti dari masa Jawa Kuna tidak hanya memberikan informasi tentang struktur pemerintahan di tingkat pusat, beberapa prasasti bahkan memberikan keterangan yang terperinci tentang pejabat di tingkat *wanua* (desa). Keterangan mengenai struktur pemerintahan tingkat desa dijumpai dalam prasasti-prasasti dari masa pemerintahan Rakai Kayuwangi dan Rakai Watukura. Terdapat 30 macam jabatan pada struktur pemerintahan desa, namun hanya sepuluh macam jabatan yang sering disebut di beberapa prasasti, yaitu *gusti*, *kalang* dan/atau *tuha kalang*, *winēkas*, *tuha wanua*, *parujar*, *hulair*, *wariga*, *tuhōlas*, *tuhā wērēh*, dan *hulu wras*. Sayang sekali hingga kini belum ada sumber yang dapat menjelaskan apa fungsi masing-masing pejabat desa tersebut. Ada beberapa jabatan yang dapat diperkirakan arti katanya, seperti misalnya *tuha wanua* yang berarti kepala desa, *hulair* (hulu air) yakni orang yang mengurus masalah pengairan di desa, *tuhōlas* yakni pejabat desa yang mengurus hutan yang ada di wilayah desa, *wariga* adalah pejabat yang dapat menghitung kapan hari baik bulan baik bagi suatu pekerjaan, *tuhā wērēh* yakni pemimpin muda-mudi desa, *parujar* adalah juru bicara, *winēkas* adalah pejabat desa yang bertugas menyampaikan berita kepada penduduk atau desa tetangga, *hulu wras* adalah pejabat yang mengurus persediaan beras di desa (mengurus lumbung padi), *mapkan* adalah pejabat yang mengurus pasar, *matamān* adalah pejabat yang mengurus taman, *tuha buru* adalah pejabat yang mengurus masalah perburuan binatang di hutan, *hulu wuatan* adalah pejabat yang mengurus jembatan, serta *hulu turus* adalah pejabat yang mengurus perbatasan antara desa satu dengan desa lain (Poesponegoro dkk., 1992).

Berbeda dengan Kerajaan Jawa Kuna, tidak banyak sumber tertulis yang dapat memberikan keterangan tentang struktur pemerintahan Kerajaan Sunda Kuna. Di dalam catatan perjalanannya, Tomé Pires menyebutkan bahwa raja Sunda bertahta di ibukota Dayo, yang letaknya agak di pedalaman.

Ibukota itu dapat dicapai dalam dua hari perjalanan dari (Sunda) Kalapa, kota pelabuhan Kerajaan Sunda yang terbesar dan terpenting. Mengenai sistem pemerintahan di Kerajaan Sunda, Tomé Pires menyebutkan bahwa Kerajaan Sunda diperintah oleh seorang raja. Selain raja pusat, di daerah-daerah tertentu terdapat raja-raja yang berkuasa di daerah masing-masing. Hak waris tahta diturunkan kepada anaknya, tetapi jika raja tidak mempunyai anak, maka yang akan menggantikannya dipilih dari raja-raja daerah yang terbesar. Kerajaan Sunda memiliki enam pelabuhan penting, yang masing-masing dikepalai oleh seorang syahbandar. Mereka bertanggung jawab kepada raja, dan bertindak sebagai wakil raja di bandar-bandar yang mereka kuasai. Keenam Bandar tersebut adalah Banten, Pontang, Cigede, Tamgara, Kalapa, dan Cimanuk (Poesponegoro dkk, 1992).

Naskah Sanghyang Siksakanda ng Karesian yang ditulis pada tahun 1518 memberikan sedikit keterangan yang dapat dipergunakan untuk mengisi kekosongan tentang struktur pemerintahan Kerajaan Sunda Kuna. Di dalam naskah tersebut dituliskan:

"... *nihan sinangguh dasa prēbakti ngaranya: anak bakti di bapa, ewe bakti di laki, hulun bakti di pacandaan, sisya bakti di guru, wong tani bakti di wado, wado bakti di mantra, mantra bakti di nu nanggan, nu nanggan bakti di mangkubumi, mangkubumi bakti di ratu, ratu bakti di dewata, dewata bakti di hyang...*"

Yang berarti:

"... inilah peringatan yang disebut sepuluh kebaktian: anak bakti kepada bapa, istri bakti kepada suami, rakyat bakti kepada majikan (*pacandaan* = tempat bersandar), murid bakti kepada guru, petani bakti kepada pejabat rendahan, pejabat rendahan bakti kepada pegawai, pegawai bakti kepada *nu nanggan*, *nu nanggan* bakti kepada mangkubumi, mangkubumi bakti kepada raja, raja bakti kepada dewata, dewata bakti kepada hyang..."

Dari kutipan di atas jelas bahwa pejabat yang paling dekat hubungannya di bawah raja adalah mangkubumi. Ia bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi atau yang dilakukan oleh bawahannya. Dengan mengacu pada sumber-sumber di atas, kemungkinan struktur pemerintahan Kerajaan Sunda Kuna pada masa itu adalah sebagai berikut: di tingkat pemerintah pusat, kekuasaan tertinggi berada di tangan raja. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, raja dibantu oleh mangkubumi yang membawahi beberapa *nu nanggan*. Selain itu, terdapat pula putra mahkota yang akan menggantikan kedudukan sang raja, jika raja meninggal atau mengundurkan diri. Untuk mengurus daerah kekuasaannya, raja dibantu oleh



Doleksi Rumah penyelamatan
Situs Banten Girang

beberapa raja daerah. Apabila raja tidak meninggalkan pewaris tahta, maka salah seorang raja dari raja-raja daerah dapat dipilih untuk menggantikan kedudukan sang raja sebagai raja terbesar.

Toponimi Kerajaan Banten Girang

Toponimi adalah pengetahuan yang mengkaji riwayat atau asal usul nama suatu tempat. Telah terbukti bahwa toponimi banyak memberikan sumbangan dalam upaya menjelaskan berbagai data dan temuan arkeologi (Juliadi dkk., 2014). Untuk mengetahui bagaimana struktur pemerintahan di kerajaan Banten Girang, akan dicoba menelusuri toponimi tempat-tempat yang diduga berkaitan dengan kerajaan Banten Girang.

Eksistensi Banten Girang disebutkan dalam beberapa sumber seperti naskah kuna dan babad. Wahanten Girang pernah disebutkan dalam Carita Parahyangan yang menyatakan bahwa Wahanten Girang dikalahkan oleh Arya Bubrah, yakni tokoh yang ditafsirkan sebagai Fatahillah Khan, panglima kerajaan Demak yang mengalahkan Kalapa (Atja, 1981). Selain dari Carita Parahyangan, nama dan keberadaan Banten Girang juga ditafsirkan dari isi prasasti yang ditemukan di desa Kebantenan, Bekasi. Dari lima lempeng prasasti yang ditemukan, terdapat dua lempeng prasasti yang menyebutkan kata "banten". Diduga kuat kata "banten" tersebut adalah Banten Girang. Kata banten berasal dari bahasa Jawa Kuna yang berarti selamatan atau sesaji. Dengan demikian, kampung Banten berarti kampung tempat mengadakan persembahan. Pengertian tersebut mungkin merujuk pada suatu lokasi pusat mandala yang sering didatangi oleh masyarakat untuk mempersembahkan sesuatu kepada raja yang sekaligus sebagai wakil dewa yang ditugaskan untuk mengatur kehidupan manusia di muka bumi (Juliadi dkk, 2014).

Saat ini yang tersisa dari Banten Girang hanyalah satu bukit kecil di sisi barat Sungai Cibanten di Kampung Sempu. Tinggalan arkeologi yang terdapat di bukit ini antara lain berupa makam kuna, gua buatan, serta watu gilang, yakni tahta Pucuk Umun, raja terakhir di Banten Girang. Sebagian besar area di kawasan Banten Girang kini telah menjadi permukiman. Beberapa nama tempat di kawasan ini cukup menarik dan perlu dikaji lebih lanjut, seperti Pandaringan, Dalung, Banusri, dan Jagarahayu. Pandaringan atau padaringan berarti tempat menyimpan makanan. Menurut cerita turun-temurun, dahulu Pandaringan merupakan kolam ikan di kerajaan Banten Girang. Banusri, menurut penduduk setempat dahulu merupakan pasar Banten Girang. Sementara itu, Dalung, merupakan

permukiman tua yang diperkirakan dihuni sejak masa kerajaan Banten Girang. Dalung berasal dari kata daluang, yakni kertas yang terbuat dari kulit kayu yang banyak dipakai sebagai media untuk menulis di masa lalu. Kampung Dalung diperkirakan sebagai tempat untuk menyusun peraturan pemerintah atau penguasa, yang dituliskan di atas daluang (Juliadi dkk, 2014). Adapun Jagarahayu berarti penjaga keamanan. Kemungkinan dahulu petugas penjaga keamanan wilayah kerajaan bermukim di kampung Jagarahayu.

Dikarenakan hingga saat ini belum ditemukannya prasasti atau naskah kuna yang berkaitan dengan struktur pemerintahan di kerajaan Banten Girang, mungkin dapat dilakukan kajian toponimi untuk mengetahui tentang struktur pemerintahan di Banten Girang. Nama-nama tempat di kawasan Banten Girang sebagian besar belum banyak berubah. Nama-nama tempat tersebut besar kemungkinan berhubungan dengan tempat tinggal pejabat kerajaan, tempat tinggal pegawai pemerintah, ataupun profesi tertentu. Wacana yang berkembang saat ini, Pemerintah Provinsi Banten ingin menggali kearifan lokal budaya Banten sebagai jatidiri warga Banten. Momentum ini perlu dimanfaatkan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk memperkaya khazanah budaya Banten.

Daftar Pustaka

- Atja. 1981. Carita Parahyangan. Bandung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat.
- Atja dan Saleh Danasasmita. 1981. Sanghyang Siksakanda Ng Karesian. Bandung: Pusat Pengembangan Permuseuman Jawa Barat.
- Boechari. 1986. "Local Genius dalam Pranata Sosial di Indonesia pada Zaman Klasik" dalam Ayat Rohaedi (ed.) Kepribadian Budaya Bangsa. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Guillot, Claude dkk. 1996/1997. Banten Sebelum Zaman Islam Kajian Arkeologi di Banten Girang (932? – 1526). Jakarta: Proyek Penelitian Arkeologi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Juliadi dan Neli Wachyudin. 2014. Toponimi/Sejarah Nama-nama Tempat Berdasarkan Cerita Rakyat. Banten: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten.
- Magetsari, Nurhadi. 1980. "Masalah Agama dan Kebudayaan dalam Arkeologi Klasik di Indonesia" dalam PIA III. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1992. Sejarah Nasional Indonesia II. Jakarta: Balai Pustaka.



Bunker Sangiang



Prasasti Sangiang

PULAU SANGIANG

Pulau Melintang Di Tengah Jalan
Pangkalan Angkatan Laut Jepang
di Selat Sunda

Juliadi

Dalam catatan sejarah mengenai peristiwa yang pernah terjadi di Selat Sunda, perairan yang memisahkan Pulau Sumatra dengan Pulau Jawa sebagian besar membahas peristiwa meletusnya Gunung Krakatau, terutama letusan yang terjadi pada tanggal 27 Agustus 1883. Diberitakan akibat dari letusan itu Pelabuhan Anyer dan desa-desa yang berada di tepi pantai Selat Sunda hancur disapu habis oleh gelombang pasang.

Cerita lainnya adalah cerita tentang Pelabuhan Anyer, pelabuhan yang sering kali disebut dalam catatan sejarah sebagai pelabuhan di Selat Sunda di masa lalu yang ramai disandari oleh kapal-kapal dari luar termasuk kapal-kapal dari Eropa dengan tujuan Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Cina, Jepang, dan Filipina. Di pelabuhan ini Deandels salah seorang Gubernur Jenderal Hindia Belanda pertama kali menginjakkan kakinya di Indonesia pada tanggal 5 Januari 1808. Dan dari Anyer pulalah Deandels menempatkan titik nol kilometer sewaktu melakukan pembangunan jalan raya oleh yang melintasi daerah-daerah di Pulau Jawa mulai dari Anyer sampai Panarukan di Jawa Timur.

Cerita mengenai Selat Sunda di masa lalu ternyata bukan hanya milik Gunung Krakatau dan Anyer saja, tetapi ada satu pulau yang berada sekitar 15 km di sebelah barat dari Pelabuhan Merak juga memiliki cerita dan sejarahnya tersendiri. Pulau tersebut adalah Pulau Sangiang, pulau terbesar di Selat Sunda dengan luas sekitar 700,35 ha.

Salah satu ceritera atau kalau boleh dikatakan sejarah yang berkaitan dengan Pulau Sangiang disampaikan Pramoedya Ananta Toer dalam bukunya "Jalan Raya Pos, Jalan Daendels", menceritakan bahwa pada masa Kesultanan Banten, Anyer yang terletak di sebelah barat pusat pemerintahan kesultanan pada masa itu (pusat pemerintahan tersebut sekarang dikenal dengan Banten Lama, 10 km di sebelah utara kota Serang) menjadi basis perlawanan pasukan kesultanan melawan kompeni Belanda. Diceritakan bahwa bila pejuang-pejuang Banten terpukul mundur dalam perang di daerah ini, mereka menyeberang ke pulau kecil di Selat Sunda untuk menghindari bombardir meriam kompeni. Pejuang-pejuang Banten menyeberang dengan menggunakan perahu-perahu kecil hingga selamatlah mereka untuk sementara dari kejaran dan serangan kompeni. Pulau yang menjadi tempat pelarian dan sementara menjadi markas melawan kompeni sebelum melanjutkan perlawanan di Lampung adalah Pulau Sangiang. Pulau yang terletak di tengah-tengah selat Sunda itu oleh Belanda dinamai *Dwars in den Weg Eiland*, yang artinya Pulau Melintang di Tengah Jalan.

Penamaan Pulau Sangiang oleh Belanda dengan sebutan Pulau Melintang di Tengah Jalan diberikan karena letak pulau ini secara geografi tepat di tengah-tengah Selat Sunda, antara Pulau Sumatra dengan Pulau Jawa dan menghubungkan Lautan Hindia di selatan dengan Laut Cina Selatan di utara. Posisinya tepat di tengah-tengah selat di bagian utara, memblokir atau menghalangi pintu masuk utara Selat Sunda sehingga semua kapal yang akan memasuki selat ini dari utara ke selatan harus mengitari Pulau Sangiang.

Karena posisinya yang strategis itu pula di tengah-tengah Selat Sunda di antara Pulau Sumatra dan Pulau Jawa, maka ketika Jepang menduduki Indonesia menjadikan pulau ini sebagai basis pertahanan di wilayah barat Pulau Jawa dan pintu masuk menuju dari dan ke Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.

Dalam buku "Catatan Masa Lalu Banten" karangan Halwany Michrob dan Mudjahid Chudari diceritakan bahwa semasa pendudukan Jepang, Banten yang secara geografis terletak di ujung barat Pulau Jawa merupakan pintu masuk yang sangat strategis. Oleh karena pertimbangan ideologi, politik, sosial, ekonomi dan strategi militer, Pemerintah Jepang di Indonesia menjadikan Banten sebagai benteng pertahanan wilayah pendudukan Jepang di Pulau Jawa bagian barat. Basis-basis pertahanan yang terpenting dengan kesatuan tempur

cukup besar ditempatkan di Pulau Sangiang sebagai Pangkalan Angkatan Laut Pulau (*Kaigun*) di Selat Sunda dengan markas komando di Anyer. Kekuatan angkatan udaranya ditempatkan di Gorda (Serang), menghadap ke Pantai Laut Jawa, angkatan daratnya (*Rikugun*) ditempatkan di Sajira (Rangkasbitung). Sedangkan di Serang ditempatkan satu sub Detasemen *Kempetai* (Polisi Militer) untuk meliputi seluruh daerah Banten.

Jika pada masa Kesultanan Banten (abad XVI-XIX) Selat Sunda menjadi pemicu kejayaan Banten, sebaliknya pada masa pendudukan Jepang, Selat Sunda adalah daerah rawan bagi masuknya kekuatan militer musuh bagi Jepang. Oleh karena itu Jepang berkonsentrasi terhadap pertahanannya di Selat ini dengan menempatkan pangkalan-pangkalan seperti halnya Anyer sebagai pangkalan angkatan Laut dengan Pulau Sangiang sebagai pertahanan laut terdepan.

Bekas-bekas Pulau Sangiang sebagai benteng pertahanan laut terdepan di ujung barat Pulau Jawa masih dapat dijumpai hingga saat ini. Hasil penelitian Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang (BP3 Serang) menunjukkan bukti peninggalan tersebut antara lain berupa bunker yang berjumlah sebanyak delapan bangunan. Bunker-bunker tersebut dibuat di bawah permukaan tanah dan letaknya dekat pantai mengarah ke Selat Sunda. Penempatan dalam posisi tersebut berkaitan dengan fungsinya sebagai bangunan perlindungan dan pertahanan.

Dari delapan bunker yang ada, empat bunker sebagai pertahanan, tiga bunker sebagai perlindungan, dan satu bunker sebagai bangunan pengintaian. Bunker pertahanan dibuat dari beton bertulang dengan campuran kerakal dan semen. Bunker jenis ini terdiri dari lorong dan ruang tembak, dibangun pada tebing yang curam. Ruang tembak merupakan ruang berbentuk segi empat dengan dinding dan atap serta bidang terbuka yang berfungsi sebagai tempat meriam dan pengintaian. Di belakang ruang tembak terdapat lorong sepanjang 10 m yang menghubungkan ruang tembak dengan pintu yang berfungsi sebagai jalan masuk dan keluar tentara. Beberapa meriam ditempatkan di ruang tembak yang moncongnya diarahkan ke laut.

Jenis bunker lainnya adalah bunker perlindungan sebanyak 3 bangunan berupa bangunan ber dinding dan beratap, mempunyai pintu dan lubang angin. Seperti bunker pertahanan, bunker perlindungan juga dibuat di bawah tanah, namun sedikit berbeda bunker perlindungan dibuat bukan dari beton tetapi dibuat dari batu bata yang diplester mulai dari dinding hingga atapnya.

Sebuah tinggalan lain cukup penting di Pulau Sangiang adalah tinggalan berupa prasasti berhuruf Kanji yang dipahatkan pada sebuah batu berbunyi *genjumin romusha no hi*, yang

artinya kurang lebih peringatan untuk pekerja kasar pribumi. Prasasti ini jika dikaitkan dengan fakta sejarah penjajahan Jepang di Indonesia pada tahun 1942-1945 ini menjadi bukti bahwa pekerja paksa atau *romusha* didatangkan oleh Jepang ke Pulau Sangiang dalam rangka pembuatan bunker-bunker tersebut.

Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1985 Pulau Sangiang yang pada saat ini secara administratif masuk wilayah Desa Cikoneng, Kec. Anyar, Kab. Serang, Provinsi Banten dengan batas-batas sebelah utara Laut Jawa, sebelah barat Pulau Rakata, sebelah selatan Pulau Ular dan Pulau Jawa, dan sebelah timur Pulau Tempurung merupakan kawasan cagar alam berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan pada tahun 1991 statusnya berubah menjadi taman wisata alam dengan luas 1.420,35 ha, terdiri dari 700,35 ha daratan dan perairan pantainya merupakan taman laut seluas 720 ha. Statusnya sebagai taman wisata alam menjadikan pulau ini oleh Provinsi Banten sebagai *Seven Wonders of Banten*.

Cerita dan latar sejarah mengenai Pulau Sangiang sebagaimana dilukiskan di atas nampaknya tidak berbanding lurus dengan statusnya sebagai salah satu pulau besar di Selat Sunda. Pramoedya Ananta Toer memberi catatan khusus tentang pulau ini dengan menyayangkan bahwa Pulau Sangiang meskipun memiliki status sebagai pulau terbesar di antara pulau-pulau yang ada di Selat Sunda, namun jarang dibicarakan, bahkan dalam catatannya Pramoedya Ananta Toer menyebutkan pulau ini tidak pernah hidup dalam bahasa maupun geografi Indonesia.

Sekiranya benar yang disampaikan Pramoedya Ananta Toer tersebut, maka jika rencana pembangunan jembatan Selat Sunda yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatra nantinya terwujud dan melewati Pulau Sangiang yang memiliki panjang daratan dari ujung timur sampai ujung barat pulau sekitar 5 km tentu pulau ini akan hidup dan banyak dibicarakan orang. Dan jika Jembatan Selat Sunda terealisasi, maka status Pulau Sangiang pun akan ikut berubah bukan lagi hanya sebagai Pulau Melintang di Tengah Jalan tetapi menjadi Pulau Penghubung dari dua Pulau besar, Pulau Jawa dengan Pulau Sumatra. Implikasi dari itu, maka perlu dipikirkan dengan matang posisi dan keberadaan pulau ini seperti konservasi lingkungan dan sumber daya budayanya yakni tinggalan sisa benteng pertahanan Jepang ketika menduduki Indonesia, termasuk pengembangan pulau sebagai destinasi wisata. Dan satu lagi yang tidak boleh dilupakan adalah penduduk yang tinggal di Pulau Sangiang harus mendapat porsi perhatian yang lebih baik dalam pengembangan pulau ini ke depan. Mudah-mudahan.

Daftar Bacaan

- Juliadi, dkk. 2005. Ragam Pusaka Budaya Banten. Serang: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang.
- Michrob, Halwany dan Mudjahid Chudari. 1993 Catatan Masa Lalu Banten. Serang: Saudara.
- Tim Pemetaan. 2001. Laporan Pemetaan dan Penggambaran Situs Pulau Sanghyang. Serang: Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Serang.
- Toer, Pramoedya Ananta. 2006. Jalan Raya Pos, Jalan Daendels. Jakarta: Lentera Dipantara.



Sumber: Tropen Museum

TATA KOTA PANDEGLANG: Warisan Kolonial Rasa Lokal

Adita Nofiandi

Kebesaran Banten menjelang abad XVII banyak dipresentasikan dengan kemajuan ekonomi perdagangan. Keletakan Banten di pesisir utara sebelah barat pulau Jawa dan berada di teluk yang bersebelahan dengan selat Sunda merupakan faktor utama kemajuan kerajaan ini. Namun demikian, apakah arti sebuah letak strategis tanpa komoditi yang diperdagangkan? Banten memiliki komoditi perdagangan berupa hasil agraria yang melimpah dan pada saat itu merupakan hasil bumi yang sangat berharga disamping emas dan lada.

Lada seolah-olah menjadi magnet bagi para pedagang di penjuru dunia untuk datang ke Banten dan melakukan transaksi perdagangan. Salah satu negara yang sukses melakukan perdagangan yaitu Belanda. Lebih dari sukses, Belanda bahkan memonopoli perdagangan lada dunia dengan mendirikan VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*), sebuah Kongsi Dagang Hindia Timur tahun 1602. Tidak hanya lada, VOC

memonopoli semua jenis hasil pangan dan rempah-rempah Asia.

Setelah kebangkrutan VOC tahun 1798 karena korupsi, pemerintah Belanda mengambil alih perdagangan dan membuat pemerintahan kolonial di Nusantara, yakni Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dengan Gubernur Jendral sebagai kepala pemerintahannya. Berdasarkan *Regeering Reglements* pasal 71 tahun 1854, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menyelenggarakan sistem pemerintahan secara sentralistik (Suriadiningrat, 1981). Wilayah Nusantara dibagi menjadi beberapa keresidenan, keresidenan dibagi lagi menjadi kabupaten-kabupaten, dan di bawah kabupaten dibagi menjadi distrik-distrik.

Pandeglang berada di bawah keresidenan Banten, sebagai ibukota dari wilayah Banten Tengah. Meskipun begitu, Pandeglang bukan merupakan sebuah kabupaten, tapi memiliki posisi sebagai daerah administratif yang menentukan dalam perpolitikan pemerintah Kolonial Hindia Belanda pada saat itu (Dahlan dan Lasmiyati, 2007). Penetapan Pandeglang sebagai sebuah kabupaten terdapat dalam *Staatblad* Nomor 73 Tahun 1874, tentang pembagian daerah, dalam Ordonansi tanggal 1 April 1874. Dengan demikian, berdasarkan surat keputusan tersebut, Pandeglang merupakan kota yang didirikan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Hal tersebut diperkuat dengan bukti tinggalan bangunan kolonial yang ada di Kota Pandeglang, yang mengindikasikan bahwa kota ini memiliki tata kota kolonial bentukan pemerintah Hindia Belanda pada masa lalu.

Artikel ini mencoba untuk menjabarkan keadaan kota Pandeglang saat ini berdasarkan tinggalan bangunan kolonial yang tersisa di sekitar Kecamatan Pandeglang, khususnya di sekitar alun-alun kota. Lebih lanjut, berusaha untuk mengetahui bagaimana konsep tata kota yang digunakan pada saat kota ini telah disahkan menjadi ibukota Kabupaten Banten Tengah.

Sejarah Terbentuknya Kabupaten Pandeglang

Pada tahun 1618, terjadi perselisihan antara Kesultanan Banten dengan VOC, dikarenakan VOC menginginkan monopoli perdagangan namun Sultan menginginkan perdagangan bebas. Perselisihan tersebut berimbas dengan ditangkap dan dipenjarakannya Sultan Ageng Tirtayasa di Batavia pada tahun 1680. Selanjutnya, VOC melakukan campur tangan dalam pengangkatan Sultan, sehingga pemerintahan Kesultanan Banten mengalami kekacauan.

Pada akhir abad XVIII, VOC dibubarkan yang kemudian diambil alih oleh Kerajaan Belanda melalui Pemerintah Hindia Belanda, yang dibentuk untuk mengurus pemerintahan

kolonial di Hindia Timur. Pada tahun 1809, Sultan Muhammad memindahkan ibukota Kesultanan Banten ke Pandeglang karena kekacauan yang terus-menerus mendera Banten. Meskipun demikian, pemindahan ibukota tersebut masih belum dapat meredakan ketegangan bahkan memuncak pada tahun 1888, pasca meletusnya Gunung Krakatau di tahun 1883.

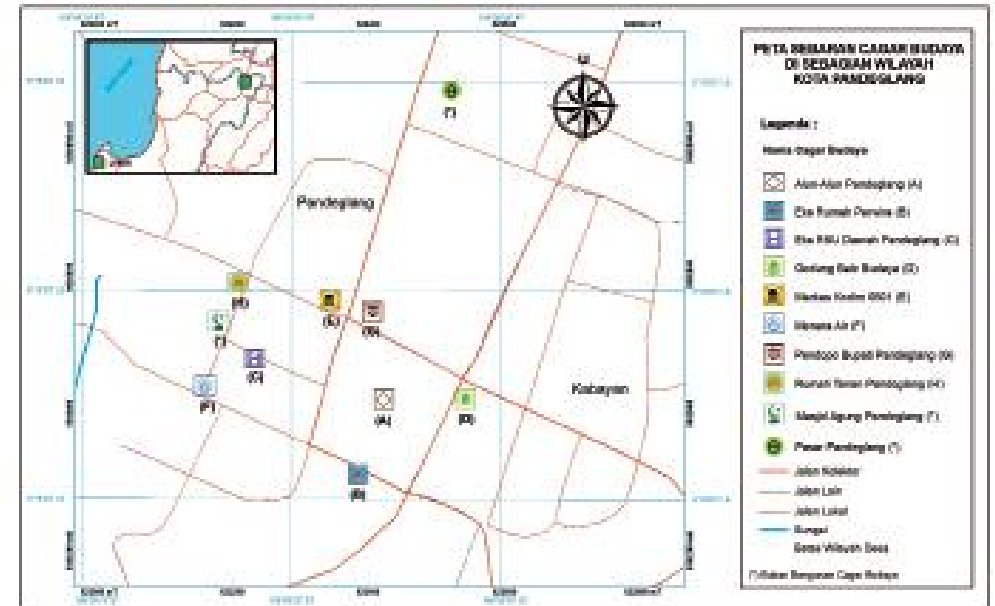
Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dibentuk berdasarkan *Gronwet* pasal 232 tahun 1798, yang mengangkat Daendels menjadi Gubernur Jenderal pertama (1808-1811). Pada masa pemerintahan Daendels, terjadi beberapa perubahan yang cukup merugikan penguasa lokal. Beberapa di antaranya adalah berubahnya status kerajaan lokal yang telah ditaklukkan VOC tidak lagi bersifat otonom, melainkan berada di bawah kendali pemerintah kolonial. Kerajaan-kerajaan yang dianggap masih berpengaruh terhadap rakyat, dibagi lagi menjadi beberapa daerah. Banten yang merupakan salah satu bekas kerajaan besar di Jawa bagian barat, rajanya dijadikan pegawai pemerintah dengan tunjangan jabatan sebesar 15.000 ringgit (Dahlan & Lasmiyati, 2007).

Pada awalnya, Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon dijadikan bagian dari *Gouvernement* atau Gubernemen, yaitu wilayah yang langsung diperintah oleh pejabat-pejabat gubernemen. Gubernemen adalah jabatan di bawah Gubernur Jenderal yang memiliki kekuasaan pada wilayah yang telah dianeksasi oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1809, terjadi perubahan dengan ditunjuknya Serang sebagai ibukota Banten. Sementara itu Caringin, yang terletak di pesisir barat Jawa (di Kecamatan Labuan saat ini), ditetapkan sebagai kabupaten, setelah Istana Surosowan dibumihanguskan. Banten dipecah menjadi tiga kabupaten, yakni Banten Hulu, Banten Hilir, dan Anyer. Hingga pada akhirnya Kesultanan Banten sudah tidak diizinkan lagi keberadaannya di tahun 1813, dan Sultan terakhir diasingkan ke Surabaya.

Pada tahun 1819, pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van der Capellen, Banten diubah menjadi dua kabupaten, yakni Banten Utara dan Banten Selatan. Perubahan terjadi lagi pada tahun 1828, Banten menjadi tiga kabupaten, yakni Banten Utara dengan ibukota Serang, Banten Barat beribukota di Caringin, dan Banten Selatan beribukota di Lebak. Tahun 1854, Banten dibagi menjadi empat kabupaten dengan menambah satu kabupaten baru, yakni Banten Tengah yang beribukota di Pandeglang. Ketetapan hukum Kabupaten Pandeglang sebagai kabupaten berdasarkan Ordonansi tanggal 1 Maret 1874, yang mulai diberlakukan tanggal 1 April 1874, yang membawahi sembilan distrik.

Tinggalan Bangunan Kuna di Pandeglang

Kota Pandeglang yang merupakan kota bentukan



Pemerintah Hindia Belanda, sudah tentu dilengkapi dengan bangunan-bangunan untuk mendukung kegiatan pemerintahan pada masa itu. Hingga kini beberapa bangunan tersebut masih dapat kita temui. Untuk mempersempit area, penulis membatasi untuk mengumpulkan data bangunan-bangunan yang terdapat di sekitar Alun-alun Kota Pandeglang, tidak meluas hingga ke desa-desa maupun kecamatan-kecamatan yang masuk ke

daerah administrasi Kabupaten Pandeglang.

Hingga tahun 2015 terdapat sekitar lima bangunan tinggalan masa kolonial di Kota Pandeglang. Bangunan tersebut antara lain:

1. Pendopo Kabupaten Pandeglang

Pendapa ini terletak di sebelah utara alun-alun, tepatnya di Jalan Asnawi No. 1 Pandeglang. Fungsinya masih



Pendopo Kabupaten Pandeglang



Eks RSUD Padegelang
Sumber : Tropen Museum



Rumah Tahanan



Gedung Kodim 0601



Eks RSUD Padegelang sekarang

sama seperti sejak pertama kali dibangun, yaitu sebagai rumah dinas Bupati Pandeglang. Menurut catatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang, bangunan ini didirikan sekitar tahun 1847-1848. Di sebelah timur pendapa, masih di dalam area rumah dinas bupati, terdapat bangunan yang dulu berfungsi sebagai kediaman para pembantu bupati.

Secara umum, rumah dinas bupati yang terdapat di belakang pendapa memiliki langgam arsitektur klasik Eropa dengan ciri tiang-tiang bergaya *doria* di bagian teras utama, jendela - pintu yang tinggi dan lebar, serta didukung ornamen lain dengan ciri khas eropa. Namun begitu, terlihat adanya arsitektural tradisional pada bangunan ini, yaitu adanya atap bertumpuk seperti pada bangunan Jawa.

2. Gedung Kodim 0601

Gedung Kodim 0601 terletak di barat laut alun-alun, tepatnya di Jalan Letnan Mulcita, Pandeglang. Gedung ini didirikan pada tahun 1918 sebagai rumah Asisten Residen Banten untuk Distrik Pandeglang. Alih fungsi bangunan menjadi markas Kodim 0601 dilakukan pada tahun 1962.

Bangunan ini bergaya arsitektur Neo-Klasik dengan adanya pilar-pilar di bagian teras depan dan beratap limasan. Ciri khas bangunan kolonial juga tampak pada jendela-jendela yang tinggi dan besar, sebuah pintu masuk depan dan komposisi vertikal.

3. Rumah Tahanan

Rumah Tahanan Pandeglang didirikan pada tahun 1819, menurut data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang. Hingga saat ini bangunan masih berfungsi seperti sedia kala. Lokasinya terletak sekitar 300 m di sebelah barat alun-alun, tepatnya di Jalan Masjid Agung No. 3, Pandeglang. Sangat disayangkan, sudah banyak perubahan pada bangunan ini tanpa memperhatikan konsep pelestarian cagar budaya.

4. Eks Rumah Sakit Umum Daerah Pandeglang

Bangunan ini terletak di sisi barat alun-alun, tepatnya di Jalan Kesehatan No. 2, Pandeglang. Kini bekas rumah sakit ini dialihfungsikan sebagai kantor Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Pandeglang. Kondisi bangunan saat ini masih utuh dengan penambahan-penambahan bangunan di sisi timur dan barat, serta tambahan teras di pintu masuk.

Bangunan Eks Rumah Sakit ini memiliki gaya arsitektur Neo-Klasik, dengan ciri yang menonjol berupa elemen dekorasi geometris pada bagian atas pintu gerbang. Bangunan ini dipermanis oleh pilar-pilar kecil dekoratif di pintu depan. Bentuk façade bangunan simetris, memiliki lubang udara di atap bangunan, serta jendela-jendela yang besar dan tinggi.

Menara
Air



5. Menara Air

Menara air terletak di sebelah barat daya eks rumah sakit, tepatnya di Jalan Masjid Agung. Menara air dengan tinggi sekitar 25 m ini dibangun pada tahun 1884, terdiri dari dua bagian. Bangunan bagian bawah terbuat dari batu kali yang disusun sedemikian rupa, terdapat pintu masuk yang memiliki lengkung sempurna. Bagian atas berbentuk *silindrik* terbuat dari semen, yang digunakan sebagai penampungan air.

6. Eks Mess Perwira

Bangunan ini terletak di selatan alun-alun, tepatnya di Jalan KH. M. Idrus, Pandeglang. Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang, Mess Perwira ini pernah difungsikan sebagai rumah dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 1999, bangunan ini beralih kepemilikan menjadi milik pribadi H. Kumasi dengan mengangsur selama 20 tahun.

Kondisi bangunan saat ini masih utuh, namun façade bangunan sudah tertutup bangunan café yang kini mulai marak bermunculan di area selatan alun-alun. Arsitektur bangunan eks mess perwira mengacu pada gaya Indis yang ditandai dengan adanya teras, jendela yang besar dan tinggi, serta atap limasan.

7. Eks Gedung Pendapa Kewedanan Pandeglang

Bangunan ini terletak di sisi timur alun-alun, tepatnya di Jalan KH. Abdul Halim, Pandeglang. Bangunan ini diperkirakan dibangun pada tahun 1848, dan kini dialihfungsikan sebagai Gedung Bale Budaya Kabupaten Pandeglang. Ciri kolonial yang tampak pada bangunan ini yakni atap yang berbentuk limasan, memiliki selasar yang diberi atap tambahan, jendela dan pintu yang berukuran besar dan tinggi dengan engsel dorong.



Eks Gedung Pendapa
Kewedanan Pandeglang

Tata Kota Pandeglang

Pada bagian ini penulis akan menguraikan kawasan di sekitar Alun-alun kota Pandeglang. Alun-alun difungsikan sebagai bagian pusat kota maupun pusat dari pemerintahan. Kehadiran alun-alun tidak lepas dari perkembangan tata kota di Nusantara dari masa pra kolonial hingga masa kemerdekaan. Alun-alun merupakan lahan terbuka, tempat masyarakat berkumpul untuk mendengar titah raja atau kebijakan pemerintah setempat. Selain itu, alun-alun juga difungsikan sebagai tempat diadakannya acara hiburan rakyat. Di sekitar Alun-alun Pandeglang tersebar bangunan tinggalan masa kolonial, meskipun keberadaannya kini makin terancam dengan pembangunan modern.

Tata ruang kota adalah ekspresi sistem keagamaan, sosial dan budaya, serta interaksi manusia dengan lingkungannya (Sujana, 2012). Oleh karena itu, untuk menemukan gambaran fisik kota dan mengenal morfologinya, perlu dipelajari tata kota pada masanya guna merekam organisasi dan topografinya (Ellisschef, 1980). Tinjauan terhadap morfologi kota ditekankan pada bentuk-bentuk fisik dan lingkungan kekotaan, yang dapat diamati dari kenampakan kota secara fisik yang tercermin pada sistem jaringan jalan, blok-blok bangunan hunian maupun non-hunian, serta bangunan individual (Yunus, 1994). Berdasarkan hal tersebut, keberadaan bangunan-bangunan tinggalan masa kolonial seperti yang telah dijabarkan sebelumnya dapat menjelaskan pola perkembangan tata kota Pandeglang.

Alun-alun yang menjadi pusat dari kota Pandeglang, dikelilingi oleh sebaran bangunan kolonial, yang sebagian besar berfungsi sebagai kantor pemerintahan. Pendapa Bupati sebagai bangunan pemerintahan utama berada di utara alun-alun, rumah sakit di sebelah barat, kantor wedana di sebelah timur, dan sebuah rumah bekas perwira di selatan alun-alun. Masjid Agung Pandeglang berada di barat alun-alun, namun bangunan ini bukan merupakan tinggalan era kolonial. Tata kota Pandeglang ini memiliki perbedaan dengan tata kota Islam pra kolonial di Jawa. Tata kota Islam pra kolonial di Jawa memusatkan area pemerintahan, yakni keraton, di selatan alun-alun, masjid di barat, dan pasar di utara alun-alun.

Alun-alun tidak hanya berperan sebagai pusat dari sebuah kota, namun lebih dari itu, alun-alun melambangkan konsep ketuhanan, atau dalam ruang yang kosong terdapat kehidupan. Selain itu, alun-alun pra kolonial berperan sebagai lambang berdirinya sistem kekuasaan raja kepada rakyatnya, serta tempat berlangsungnya semua acara keagamaan yang erat kaitannya dengan konsep keraton-masjid-alun-alun (Santoso, 1984).

Pada saat ini, pusat pemerintahan kota Pandeglang juga masih berada di utara alun-alun, yakni pendapa Bupati dan bangunan Kodim yang dahulu merupakan kantor asisten residen. Kantor pemerintahan daerah yang dahulu merupakan kedewanaan Pandeglang berada di timur alun-alun. Di sebelah barat terdapat bangunan eks rumah sakit, rumah tahanan, dan menara air. Sulit menemukan bangunan tinggalan kolonial di selatan alun-alun, karena sudah banyak yang berubah. Yang tersisa hanya satu bangunan eks rumah perwira. Pasar terdapat di utara pendapa Bupati, yang berjarak agak jauh dari alun-alun. Masjid Agung yang berada di barat eks rumah sakit dan selatan rumah tahanan, disinyalir merupakan bangunan yang didirikan tidak sejaman dengan pendirian Kabupaten Pandeglang ataupun era sebelumnya.

Meskipun kota Pandeglang merupakan kota bentukan pemerintah Hindia Belanda, namun tidak serta merta mengadopsi 100% tata kota kolonial bentukan pemerintahan Hindia Belanda. Keberadaan alun-alun merupakan hal penting dalam akulturasi kebudayaan, khususnya pembangunan dan perkembangan tata kota. Tidak hanya itu, posisi pasar dan Masjid Agung yang meskipun tidak sejaman, menjadi pertimbangan bahwa kota ini juga dibangun dengan memperhatikan aspek tata kota tradisional di Jawa.

Pandeglang merupakan kabupaten yang dibentuk dengan berbagai peraturan dan birokrasi oleh Pemerintah Hindia Belanda. Untuk berinteraksi dengan rakyat, pemerintah dibantu oleh pejabat pribumi, yaitu seorang bupati yang membawahi sebuah kabupaten, serta wedana yang membawahi sebuah distrik atau kecamatan. Bupati merupakan penguasa lokal keturunan sultan, yang oleh pemerintah kolonial dijadikan sebagai pegawai negeri dan diberi gaji. Dapat dikatakan bahwa dalam mendirikan sebuah kota, khususnya Pandeglang, adaptasi dan akulturasi tata kota lokal dengan tata kota kolonial diberlakukan karena masyarakat pribumi kala itu masih memegang teguh tradisi pra kolonial. Peran alun-alun lebih dari sekedar bagian dari pusat kota, yaitu sebagai lambang dari konsep ketuhanan. Para bupati biasanya mengumpulkan rakyatnya di alun-alun, dengan demikian informasi dan kebijakan pemerintah dapat tersalurkan.

Kesimpulan

Kota Pandeglang merupakan ibukota dari Kabupaten Banten Tengah yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda, berdasarkan Ordonansi tanggal 1 Maret 1874. Pusat kota Pandeglang adalah alun-alun dengan pendapa Bupati di utaranya. Di sekitar alun-alun terdapat bangunan-bangunan

kolonial seperti Markas Kodim 0601, Rumah Tahanan, Gedung Eks Rumah Sakit, Menara Air, Rumah Eks Perwira, dan Gedung Eks Kawedanaan yang kini menjadi Gedung Bale Budaya.

Tata kota Pandeglang merupakan bentuk akulturasi dan adaptasi dari tata kota lokal di Jawa dengan tata kota kolonial. Tata kota lokal ditunjukkan dengan adanya alun-alun dan pendapa. Sementara itu, tata kota kolonial ditunjukkan dari langgam dan arsitektural bangunan yang bergaya Eropa, serta keletakan bangunan pemerintah di utara, timur dan barat alun-alun. Tata letak tersebut berbeda dengan tata kota lokal Jawa yang memusatkan pemerintah di selatan alun-alun.

Keberadaan bangunan tinggalan era kolonial di sekitar alun-alun kota Pandeglang sangat penting kedudukannya dalam sejarah perkembangan kota Pandeglang. Bangunan-bangunan tersebut merupakan bukti sejarah dan harus dilestarikan keberadaannya. Tata letak dengan alun-alun sebagai pusat, dapat dijadikan *landmark* kota Pandeglang yang erat kaitannya dengan sejarah Banten khususnya, serta sejarah Nusantara secara umum.

Daftar Pustaka

- Dahlan, Halwi dan Lasmiyati. 2007. *Sejarah Kabupaten Pandeglang*. Jurnal Penelitian Edisi 38/September 2007. Bandung: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung.
- Elisscheff, Nikita. 1980. *Physcal Lay-Out*. Dalam Oleg Grabag, The Islamic City. Paris: UNESCO.
- Mundardjito (ed.) dkk. 2005. *Ragam Pusaka Budaya Banten*. Serang: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang.
- Pemerintah Provinsi Banten. 2008. *Dokumentasi Benda Cagar Budaya dan Kepurbakalaan Provinsi Banten*. Serang: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten.
- Santoso, Jo. 1984. *Konsep Struktur & Bentuk Kota Di Jawa s/d Abad XVIII*. Disertasi, tidak dipublikasi.
- Sujana, Ujon. 2012. *Perkembangan Kota Serang tahun 1809-1942 Kajian Arkeologi Spasial Berdasarkan Peta Kuno*. Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Skripsi, tidak diterbitkan.
- Suriadiningrat, Bayu. 1981. *Sejarah Pemerintahan di Indonesia*. Babak Hindia Belanda dan Jepang. Jakarta: Dewaruci Press.
- Tim Kelompok Dokumentasi. 2004. *Laporan Pendokumentasian Bangunan Kolonial di Kabupaten Pandeglang*. Laporan Kegiatan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang, tidak dipublikasi.
- Yunus, Hadi Sabari. 1994. *Teori dan Model Struktur Keruangan Kota*. Yogyakarta: Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.

<http://serbasejarah.blogspot.com/2011/07/alun-alun-sebagai-identitas-dan-tata.html>
sumber foto lama: <http://www.tropenmuseum.nl> foto lainnya dok. Pribadi kecuali alun-alun dan gedung kodim 0601 disadur dari website humas kab. Pandeglang dan dinas pariwisata provinsi banten

KAWASAN
SANGKULIRANG
MANGKALIHAT
MENUJU WARISAN BUDAYA DUNIA

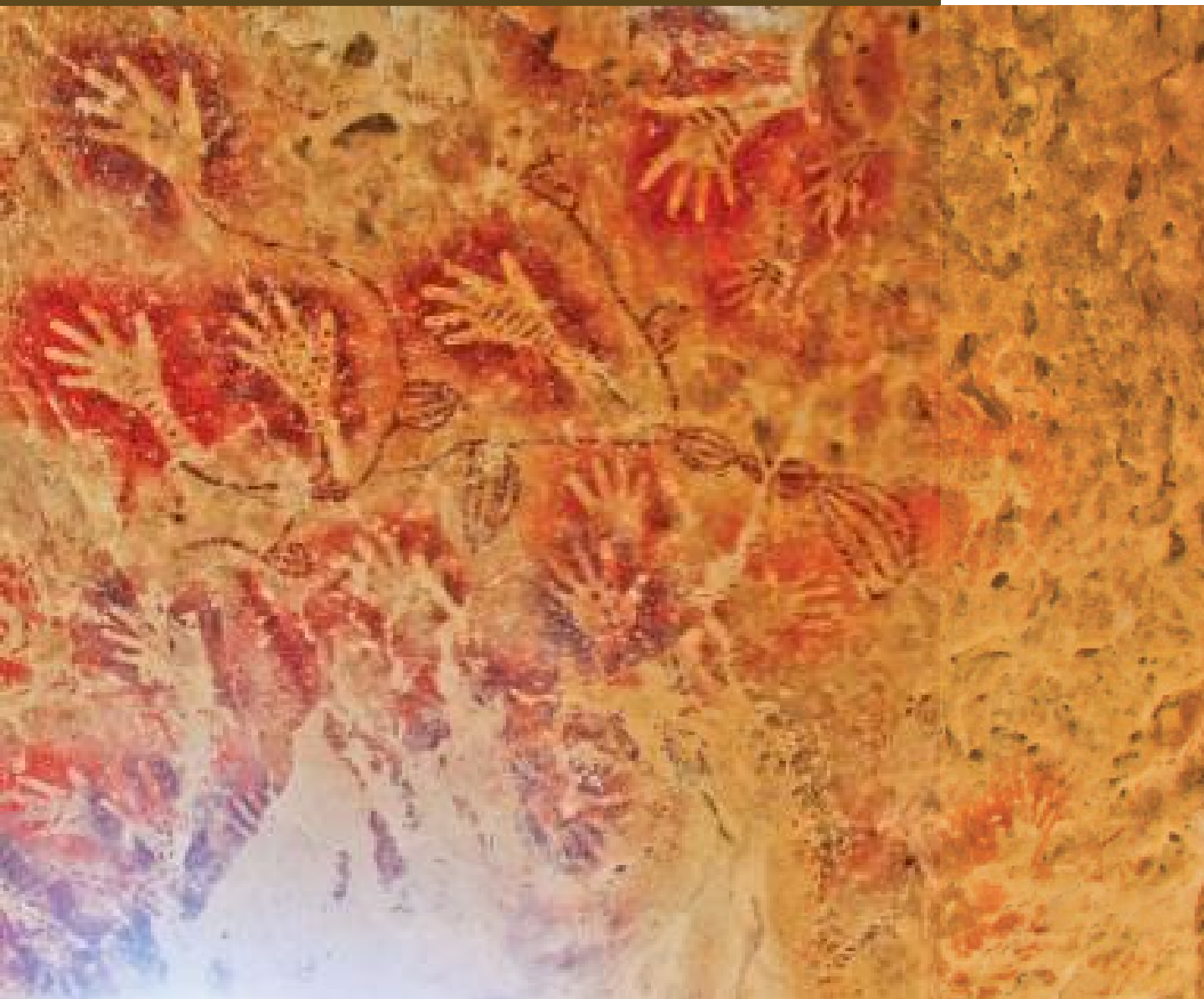
Hendri Prasetyo

Kegiatan pelestarian Cagar Budaya (CB) merupakan upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya beserta nilai yang terkandung di dalamnya, dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Cagar Budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui. Pelestarian dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka memperpanjang usia Cagar Budaya.

Pada bulan Agustus 2015, tepatnya pada tanggal 3 – 24 Agustus, Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Samarinda mengundang beberapa tenaga ahli dari BPCB se-Indonesia dan instansi terkait lainnya untuk mengikuti kegiatan Deliniasi Cagar Budaya di Kawasan Sangkulirang Mangkalihat di Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pendukung pengusulan kawasan Sangkulirang Mangkalihat sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional dan Warisan Budaya Dunia (World Heritage).

Sangkulirang Mangkalihat adalah kawasan karst raksasa di Provinsi Kalimantan Timur, yang di dalamnya terdapat berbagai gua-gua yang bergambar lukisan cadas (*rock art*). Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan, diketahui bahwa selain lukisan cadas, di gua-gua tersebut juga ditemukan berbagai artefak dan ekofak, yang diperkirakan berasal dari 4000 tahun yang lalu. Hasil temuan arkeologis tersebut tersebar di berbagai gua di pegunungan karst, baik di Gunung Gergaji, Tondoyan (kabupaten Kutai Timur), maupun Merabu-Mapulu (kabupaten Berau).





Persebaran gua-gua yang memiliki berbagai ragam temuan arkeologis tersebut, membentang pada ketiga pegunungan karst, yang diperkirakan mencapai 1,8 juta hektar. Kawasan Karst Sangkulirang Mangklihat berada di daerah perbatasan antara 2 (dua) kabupaten, yaitu kabupaten Kutai Timur dan kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

Ada tiga pegunungan karst yang menjadi fokus perhatian pada kegiatan ini, yaitu kawasan karst Kompleks Gunung Gergaji, Kompleks Batu Raya dan Kompleks Merabu-Mepulu. Ketiga kawasan karst tersebut memiliki sumber daya alam dan budaya yang sangat berlimpah. Terkait dengan aspek budaya, di kawasan ini terdapat gua-gua prasejarah yang memiliki tinggalan arkeologis berupa lukisan cadas (*rock art*), alat batu, gerabah, dan sisa-sisa penguburan. Hal ini mengindikasikan bahwa kawasan ini pernah dihuni oleh manusia prasejarah. Dari hasil pertanggalan pada penelitian sebelumnya, diketahui bahwa kehadiran manusia sudah ada sejak 4000 tahun yang lalu di daerah ini. Berikut penjabaran ketiga kawasan karst tersebut.

1. Kompleks Gunung Gergaji

Kompleks Gunung Gergaji berada di desa Tepian Langsat, kecamatan Bengalon, kabupaten Kutai Timur. Kompleks Gunung Gergaji merupakan gunung karst yang memiliki gua-gua prasejarah paling banyak di antara gunung karst yang ada. Temuan arkeologis berupa gambar cadas hingga situs penguburan ada di kawasan. Situs-situs tersebut antara lain:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| a. Situs Ceruk Tewet | d. Situs Gua Te'et |
| b. Situs Ceruk Karim | e. Situs Gua Ujan |
| c. Situs Gua Pindi | |

2. Kompleks Marang

Kompleks Marang relatif berada di tengah kawasan Gunung Gergaji. Kawasan ini terdiri dari beberapa gua prasejarah, yaitu:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| a. Situs Gua Tengkorak | g. Situs Gua Fosil |
| b. Situs Gua Mentis | h. Situs Ceruk Lungun |
| c. Situs Gua Keboboh | i. Situs Ceruk John |
| d. Situs Gua Kayu Sapung | j. Situs Ceruk Kurang Tahu |
| e. Situs Gua Ilas Kecil | k. Situs Gua Tebo |
| f. Situs Gua Tamrin | |

3. Kompleks Gunung Merabu - Mapulu

Kompleks Gunung Merabu Mapulu berada di desa Merabu, kecamatan Kelay, kabupaten Berau. Situs prasejarah yang ada di daerah ini yaitu:

- | | |
|---------------------|----------------------|
| a. Situs Gua Bloyot | d. Situs Gua Pindi 2 |
| b. Situs Gua Caipar | e. Situs Ceruk Abu |
| c. Situs Gua Senen | |

Untuk menuju kawasan karst Komplek Gunung Gergaji dan Kompleks Marang dari Samarinda dapat melalui perjalanan darat sejauh ± 250 km, dengan jarak tempuh sekitar 8 jam hingga ke kampung terdekat dengan situs yaitu kampung Hambur Batu. Kemudian dilanjutkan dengan menelusuri sungai Bengalon - sungai Jele' menggunakan "ketinting" (sebutan perahu di Kalimantan) sejauh 31,7 km yang ditempuh 2 - 3 jam. Adapun Kompleks Gunung Merabu - Mapulu melalui perjalanan darat dari kampung Hambur Batu ditempuh dalam waktu ± 6 jam.

Secara khusus, tulisan ini akan menjabarkan situs-situs yang berada di kawasan Tewet. Fasilitas yang tersedia di *basecamp* Tewet berupa rumah informasi atau rumah jaga yang baru selesai dibuat untuk kepentingan koordinasi



Perjalanan sungai menuju basecamp Tewet



Pemandangan hutan dilihat dari ceruk karim

Transportasi yang digunakan untuk menuju kawasan Tewet



dan pengamanan situs gua di kawasan Tewet. Sekarang ini terdapat penempatan juru pelihara untuk beberapa situs di sekitar Tewet. Akses jaringan selular masih dapat terjangkau hingga di kawasan ini, terutama di ketinggian seperti di mulut gua dengan akses full signal untuk beberapa provider.

Kawasan Tewet terdiri atas 5 situs gua yakni, ceruk Tewet, ceruk Karim, gua Pindi, gua Te'et dan ceruk Ujan. Namun untuk ceruk Ujan, observasi tidak terlaksana karena tidak ada personil yang bisa menjadi penunjuk jalan. Pada kegiatan ini, tim deliniasi mendapat temuan gua baru yakni ceruk Kayuara (nama lokal dari pemburu sarang walet). Dengan demikian, terdapat 6 (enam) gua yang menjadi objek kegiatan deliniasi, yakni ceruk Tewet 1 dan ceruk Tewet 2, ceruk Karim, gua Pindi, gua Te'et dan ceruk Kayuara.

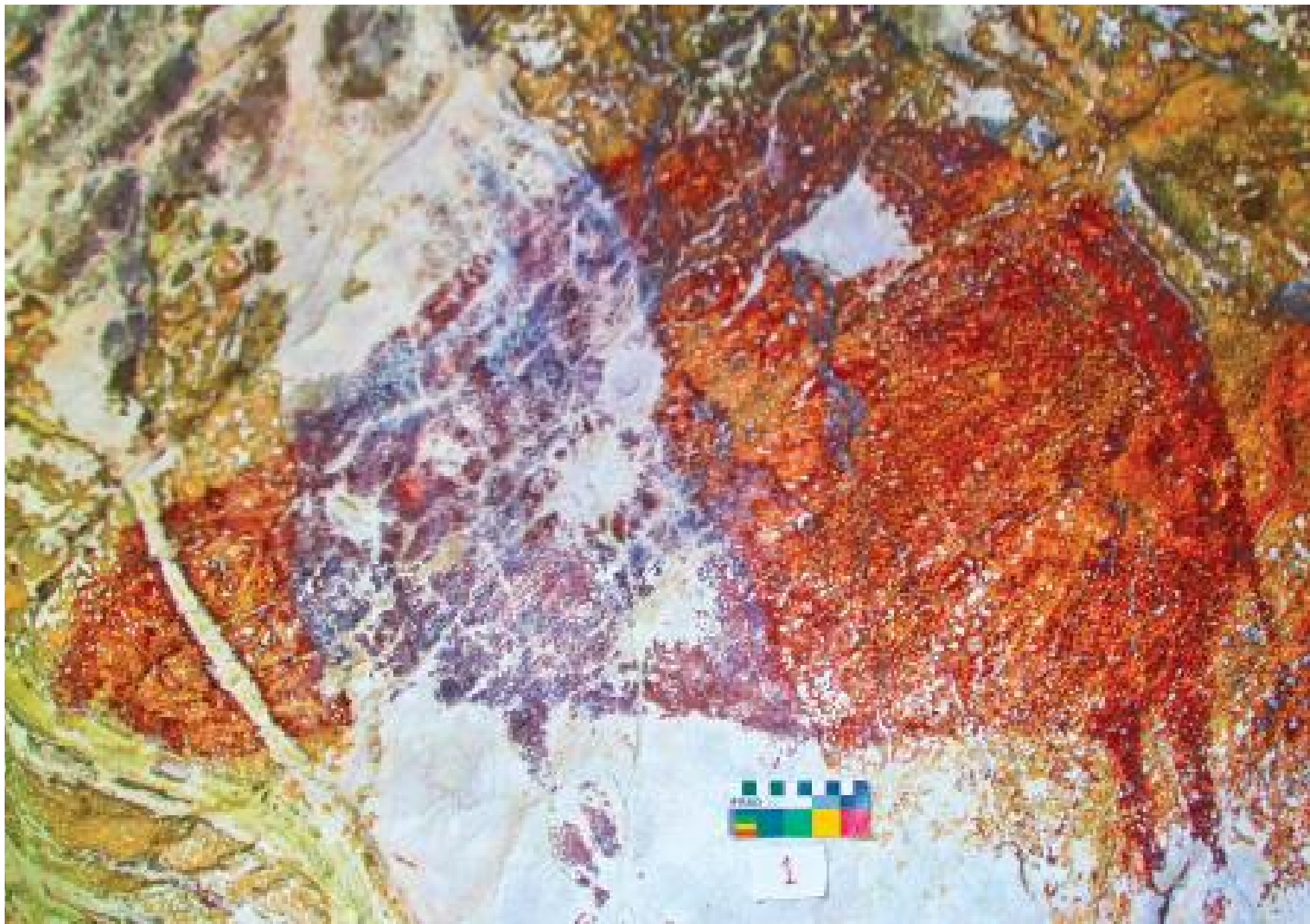
1. Ceruk Karim

Ceruk Karim berada pada ketinggian 208 meter dan berjarak 430 meter dari *basecamp* Tewet ke arah timur, dengan waktu tempuh sekitar satu jam berjalan kaki. Kondisi medan dari pinggir sungai Jele berupa lahan tanah datar sekitar 30 meter, kemudian mendaki lereng karst ke arah timur dengan kemiringan 30-45° hingga ke mulut gua.

Sepanjang perjalanan menuju gua, lingkungan yang ditemui berupa hutan yang cukup rindang sehingga permukaan tanah di bawahnya terlindung dari cahaya matahari secara langsung. Menurut penuturan Pak Kusmin, Juru Pelihara Liang Karim, bahwa telah terjadi 2 kali kebakaran besar di hutan ini, yakni di tahun 1982 dan tahun 1997. Hal tersebut dibuktikan

dengan adanya sebuah pohon Meranti besar yang masih berdiri tegak dengan kondisi hangus bekas terbakar, tepat di sisi kiri depan gua Karim. Tutupan lahan di kawasan Tewet berupa pohon besar berdiameter hingga 50 cm yang berada di lahan datar setelah sungai hingga ke lereng karst. Adapun bagian lereng hingga di ketinggian karst hanya berupa pohon dengan diameter maksimal 10 cm.

Ceruk Karim tidak lebih dari sebuah ceruk tanpa lorong, dengan lebar mulut gua 45 meter dan kedalamannya sejauh 19 meter. Lantai gua tidak rata, beberapa di antaranya berupa bongkahan batu berukuran besar maupun batu lepasan berukuran kecil. Di bagian tengah lantai gua terdapat gundukan tanah bercampur bebatuan lepasan, rimbunan alang dan



Temuan
lukisan hewan
seperti Tapir



Tampak Depan
Ceruk Karim



Temuan lukisan
hewan seperti
sarang lebah

sebuah stalagmite yang hampir mencapai langit-langit mulut gua. Gua ini termasuk gua semi aktif karena terlihat bekas-bekas tetesan dan aliran travertine pada bagian dinding, meski pada saat kegiatan berlangsung (Agustus 2015) terjadi musim kemarau. Beberapa lelehan travertine telah menutup lukisan di dinding gua.

Ceruk Karim pada masa sebelumnya hanya dipergunakan sebagai gua peristirahatan oleh pencari sarang walet. Oleh penduduk setempat ceruk ini disebut sebagai liang tiduran di Kairim. Kairim adalah lokasi yang merujuk ke kawasan Tewet saat ini, yakni mulai dari sungai Jele hingga ke gua-gua di kawasan Tewet. Gua ini tidak dapat menjadi sarang walet karena kondisi gua yang cenderung terbuka dan terlalu terang oleh pencahayaan matahari. Demikian halnya dengan burung

Sriti, hanya burung Mentis yang banyak membuat sarang di celah dinding gua, dan sarang tersebut banyak berjatuhan di lantai gua. Kalelawar juga ditemukan dengan bukti berupa kotoran warna hitam berbintik pada dinding gua.

Di gua inii terdapat temuan lukisan yang menarik, di antaranya lukisan hewan berkaki 4 (empat), berekor pendek yang disebut sebagai lukisan tapir berwarna merah. Di bagian lengan terlihat bekas lelehan/aliran air dari celah karst, serta terdapat bekas cungkulan berbentuk segi empat. Lukisan masih terlindungi dari paparan matahari langsung karena adanya pilar kecil pada rongga panel ini. Selain itu, terdapat lukisan berukuran cukup besar berbentuk lonjong dengan bintik-bintik warna merah di bagian tengah. Masyarakat setempat menyebutnya sebagai lukisan sarang lebah. Kondisi lukisan di bagian tengah

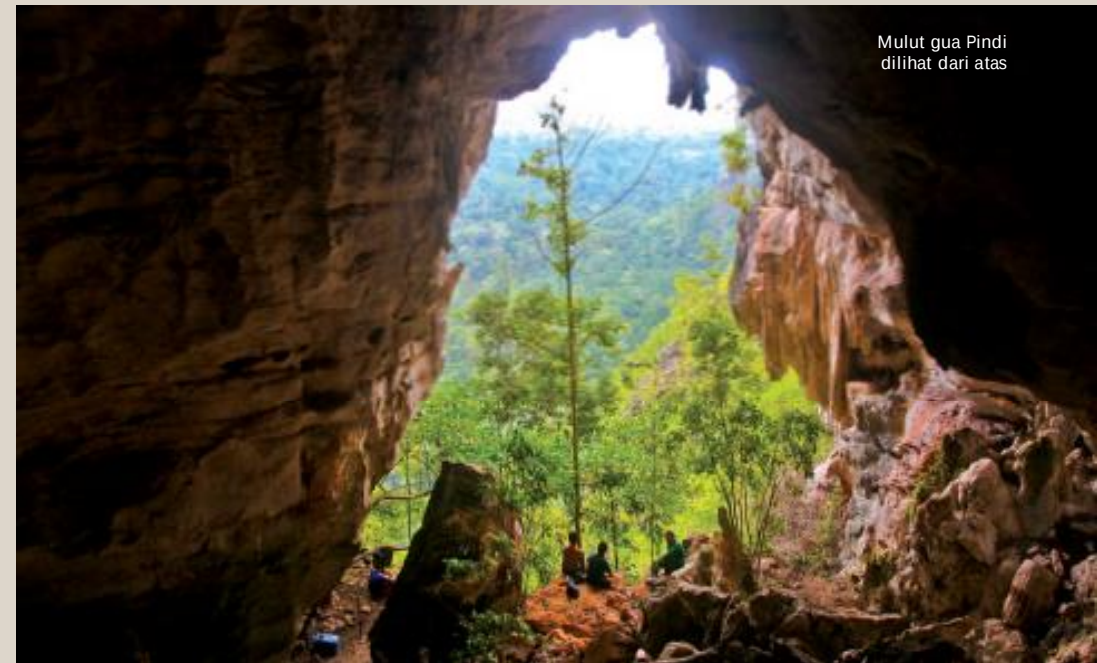
terlihat adanya bekas lelehan karst dari celah di atasnya. Di bagian bawah mulai terkelupas akibat terpaan cahaya matahari.

2. Gua Pindi

Terdapat dua akses pilihan menuju gua Pindi, yakni lewat jalur ceruk Karim dengan kemiringan 30-45° dengan waktu tempuh sekitar 1 (satu) jam, jarak yang ditempuh sejauh 425 meter antara Karim – Pindi. Adapun jalur kedua melewati depan ceruk Tewet dengan kemiringan pendakian 45-90° yang ditempuh sekitar satu jam, sejauh 350 meter. Dengan kemiringan seperti itu, dibutuhkan akar pohon atau tali pengaman untuk melewati jalur tebing 90° tersebut. Gua Pindi terletak pada ketinggian 197 mdpl di tebing karst. Gua ini cenderung menghadap ke

utara dengan terpaan cahaya matahari pagi pada dinding kiri gua. Ruang depan gua yang merupakan lereng terjal 85-90° berupa pepohonan setinggi 3-4 meter, berdiameter 10-15 cm. Tidak ditemukan pohon yang berdiameter lebih besar. Dari sini terlihat gunung Tondoyan yang merupakan dinding batu kapur dengan ketinggian 1071 meter.

Gua Pindi sepiintas mirip terowongan karena tembus ke bagian belakang pada ruang terbuka datar hingga ke lereng karst tebing tinggi. Permukaan lantai dipenuhi dengan bongkah-bongkah batu yang merupakan jatuhan dari bagian belakang rongga gua. Lantai permukaan gua miring sekitar 30° dengan bagian mulut gua lebih rendah 16,2 meter dibandingkan rongga belakang. Dengan kondisi demikian, bongkah batu dari belakang



Mulut gua Pindi
dilihat dari atas



Temuan lukisan yang berada pada Gua Pindi

akan mengelinding ke daerah mulut gua. Selain batu dan bongkahan, terdapat juga kayu yang berserakan dan bercampur dengan an batu.

Sekitar 30 meter, tepatnya pada dinding kanan gua, terdapat rongga gelap dengan kedalaman sekitar 12 meter. Gua Pindi merupakan bukit karst tunggal. Bagian belakang gua yang merupakan lahan datar dipenuhi dengan semak belukar, denhan pepohonan terbesar berdiameter 10 cm. Jarangnya pohon besar di sekitar lereng dikarenakan dari lereng hingga puncak karst merupakan bebatuan karst. Hanya pohon yang berukuran kecil yang dapat beradaptasi dengan lingkungan batuan karst. Pohon berdiameter besar hanya dapat ditemukan di sekitar *basecamp* Tewet pada area datar yang mengandung tanah pada permukaannya.

Temuan arkeologis di gua ini berupa lukisan pada langit-langit rendah di dinding sisi kiri depan, tepatnya di bagian lereng dinding gua yang hampir menyentuh permukaan tanah gua, sekitar 40 cm dari permukaan tanah. Jenis lukisan yang ada di dinding gua tidak dapat diidentifikasi karena faktor kerusakan

akibat pengelupasan pada dinding. Pada area lukisan, terlihat adanya bercak-bercak merah di sepanjang dinding rendah, yang kemungkinan merupakan bekas lukisan. Di sepanjang dinding rendah tersebut terlihat kelupasan dinding gua yang kemudian ditumbuhi dengan ganggang, lumut, dan lelehan travertine di beberapa titik, serta lelehan air dari lubang berbentuk dome di atas posisi keletakan lukisan.

Gua Pindi merupakan tempat istirahat para pemburu wallet. Kondisi ceruk Pindi tidak memungkinkan untuk keberadaan burung walet karena merupakan ruang terbuka. Di beberapa tempat, terdapat lubang-lubang yang dimanfaatkan sebagai tempat hunian kelelawar. Selain itu, juga terdapat sarang rayap yang terletak pada rongga di langit-langit gua, berwarna hitam. Tetesan air dari rembesan di langit-langit di sisi kanan gua masih aktif bahkan hingga saat musim kemarau berlangsung.

3. Ceruk Tewet

Ceruk Tewet yang berada pada ketinggian 150 meter, berjarak 160 meter dari *basecamp* Tewet ke arah tenggara. Waktu tempuh menuju lokasi sekitar 30 menit berjalan kaki, dengan kondisi medan yang cukup ekstrim. Untuk mencapai mulut gua, diperlukan peralatan yang menunjang dan aman untuk melakukan pemanjatan. Dengan posisi gua berada di tebing vertikal, sehingga menyulitkan saat akses ke mulut gua. Gua ini menghadap ke arah barat dengan pemandangan luas terbuka di depan mulut gua. Di sekitar lereng terlihat beberapa jenis pohon dengan diameter di bawah 10 cm, jenis alang, jenis rumput, serta jenis paku yang tumbuh di lahan sempit dan lereng gua.

Gua Tewet termasuk dalam kategori ceruk tanpa adanya ruang, atau lorong yang gelap abadi. Akses masuk gua



Ceruk Tewet



Lukisan cap tangan dengan lukisan seperti tokek di tengahnya



Tampak lukisan berbentuk spiral seperti ular warna merah

Kondisi Medan menuju Tewet 2

lewat sisi kiri gua hingga ke mulut gua di sisi kiri. Lantai gua hingga bagian pertengahan berupa tanah lempung halus, dan setelah itu berupa trap batuan karst hingga mencapai ujung kanan yang lebih tinggi. Di bagian tengah mulut gua terdapat pilar dengan ukuran yang cukup besar dan terkesan menutup mulut gua. Pilar-pilar kecil dengan diameter ± 50 cm terdapat di sisi kiri lantai, di bagian tengah, serta bongkah-bongkah batu lepasan dari tebing atas yang tergeletak di sisi depan kanan-mulut gua.

Terdapat pohon ukuran kecil di bagian mulut gua sebelah kiri pilar sehingga menutup akses cahaya matahari secara langsung pada dinding gua sisi kiri. Terlihat jenis rerumputan di lantai tanah di sisi ini. Jenis paku terlihat menempel di dinding-dinding dan di langit-langit gua serta pada pilar. Temuan lukisan di sini lebih padat dibandingkan gua atau ceruk yang lain. Lukisan tersebut hampir memenuhi permukaan dinding gua, dari bagian yang rendah hingga langit-langit gua. Asumsi ini berdasarkan sebaran bercak-bercak merah sebagai bekas lukisan pada bagian dinding hingga dasar di dekat permukaan lantai tanah. Pada bidang langit-langit terlihat cap tangan yang berukuran cukup besar dengan berbagai motif di bagian telapak tangan, baik berupa titik atau garis-garis putus, dan garis yang menghubungkan antar cap tangan. Untuk lukisan yang berukuran lebih kecil terlihat pada langit rendah di sisi kanan dan kemungkinan lukisan cap tangan anak-anak hingga remaja. Di gua ini juga terdapat lukisan hewan yang kemungkinan adalah kura-kura.

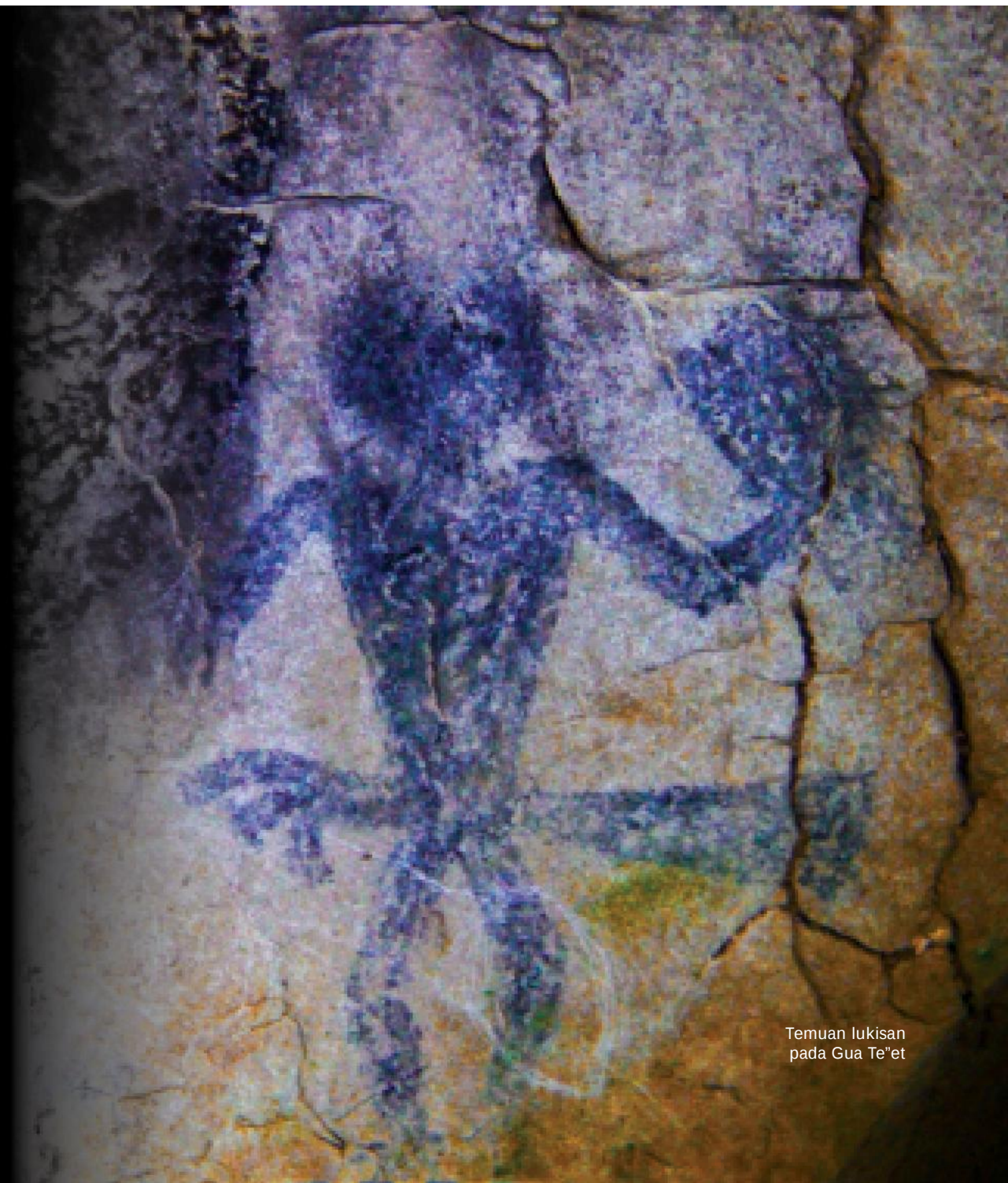
Di atas ceruk Tewet terdapat ceruk yang dinamakan dengan ceruk Tewet 2. Untuk menuju ceruk Tewet 2 harus menggunakan tali dan segala macam pengamanan dengan melewati tebing vertikal. Ceruk Tewet 2 diakses melalui ceruk Tewet dengan ketinggian vertikal 7,27m. Kondisi langit-langit gua miring ke arah lantai dengan lebar mulut gua 12,3 meter, dan tinggi mulut gua 6,2 meter. Permukaan lantai gua cenderung datar. Tanah di bagian

pertengahan dan di bagian pinggir pada dinding hingga ke arah mulut gua merupakan bagian inti karst gunung. Di bagian tengah mulut gua terdapat tonjolan batu besar yang merupakan bagian dari struktur karst. Pilar terdapat di sisi kiri mulut gua dan 2 (dua) buah stalaktit. Di bagian tengah gua tumbuh satu pohon berdiameter 10 cm yang rebah ke arah mulut gua karena terbentur langit-langit gua. Arah hadap gua ke barat, sehingga cahaya matahari dapat terpapar secara langsung pada langit-langit gua yang miring ke arah lantai. Terlihat warna langit-langit gua 90% telah berwarna putih akibat terkelupas. Terdapat 4 lubang di langit-langit, berwarna hijau karena ditumbuhi lumut dan ganggang, yang merupakan sarang kelelawar. Terdapat empat lukisan cap tangan berukuran jari anak-anak dan lukisan berbentuk spiral (disebut sebagai ular). Untuk melihat lukisan tersebut, posisi badan harus rebah di lantai gua, sehingga posisi mata vertikal 90° di bawah lukisan. Lukisan yang berukuran cukup besar berwarna merah dengan garis merah tebal, kondisi mulai terkelupas, panjang sekitar 2 meter. Terdapat 2 (dua) garis merah yang memotong pada pertengahan garis tebal tersebut.

4. Gua Te'et

Gua ini berada pada ketinggian 106 meter. Dapat dijangkau dengan akses perahu dari *basecamp* Tewet ke arah selatan ± 10 menit, kemudian dilanjutkan dengan jalan kaki menuju lereng gunung Gergaji. Waktu yang dibutuhkan untuk sampai di gua Te'et sekitar 1 jam. Lebar mulut gua 6,35 meter dan tinggi 4,50 meter. Gua ini merupakan rongga di tebing vertikal, ketinggian lereng ± 60 meter. Gua ini tidak terlalu luas dengan bagian terdalam sejauh 14,89 meter dari mulut gua. Namun sisi kanan belakang tembus hingga ke ruang gua yang sangat luas dan panjang, yang sekaligus sebagai akses menuju gua Te'et. Temuan berupa lukisan terletak di dinding sisi kiri gua. Gua ini banyak dimanfaatkan oleh para pemburu sarang walet hingga saat ini. Terlihat bekas tungku dapur serta bekas asap pada dinding gua yang meninggalkan lapisan berwarna hitam. Selain itu terdapat terpal coklat bekas perlengkapan untuk alas tidur yang terletak di rongga sisi kiri gua, dekat dengan lukisan. Keseluruhan rongga-rongga kecil yang ada di dalam gua ini dimanfaatkan sebagai ruang aktivitas memasak para pencari sarang walet.

Gua Te'et termasuk gua aktif, terlihat dari bentuk-bentuk stalaktit dan *flowstone* yang terbentuk dari aliran air di atap gua. Dinding gua bagian atas berwarna hijau akibat pertumbuhan lumut dan ganggang. Demikian halnya dengan rongga-rongga kecil yang tidak mendapat pencahayaan matahari terlihat lebih lembab. Berbeda dengan gua atau ceruk lainnya, gua Te'et memiliki tinggalan berupa lukisan manusia. Di bagian pinggang lukisan manusia tersebut, terdapat gambar yang kemungkinan berupa pedang atau parang (Mandau Dayak). Mandau digambarkan terselip di pinggang dengan bagian gagang membentuk lengkungan. Tangan kanan lukisan manusia tersebut digambarkan memegang tombak atau lembing. Teridentifikasi terdapat 5 (lima) lukisan seperti yang tersebut di atas. Sangat disayangkan sebagian besar lukisan tersebut telah dihapus karena perilaku vandalisme, berupa coretan hitam, tulisan dan gambar-gambar. Perilaku vandalisme ini kemungkinan dilakukan oleh para pemburu sarang walet karena hingga sekarang ceruk ini masih dimanfaatkan untuk tempat istirahat para pencari sarang walet. Kemungkinan beberapa lukisan hitam lain telah dihapus atau ditimpa kemudian diganti dengan gambar tulisan vandalisme.



Temuan lukisan
pada Gua Te'et



Ceruk Kayuara

5. Ceruk Kayuara

Ceruk yang berada pada ketinggian 75 meter ini terletak di jalur menuju ke gua Te'et, tepatnya sekitar 180 meter sebelum mencapai gua Te'et. Akses menuju Kayuara sama dengan akses menuju gua Te'et, yakni dengan menggunakan perahu kemudian berjalan kaki menelusuri sisi tebing dengan perkiraan waktu 40 menit. Lebar mulut gua 6,12 meter dan tinggi antara 2,30 – 5,20 meter. Gua ini berupa ceruk dengan rongga sempit pada dinding tebing dan menjadi pintu masuk ke rongga-rongga gua di belakangnya. Pada bagian depan atau sisi barat merupakan tebing vertikal hingga ke dasar, dengan ketinggian dari permukaan datar sekitar 15 meter. Bagian depan mulut gua banyak ditumbuhi pohon-pohon dengan diameter maksimal 10 cm, sehingga tampak terbuka dari dalam gua. Sebagai sebuah ceruk sempit, gua ini dijadikan akses keluar masuk bagi para pencari sarang walet, karena di bagian belakang masih banyak rongga dengan tipe gua yang saling berkesinambungan. Temuan arkeologis berupa lukisan warna hitam dengan kondisi terkelupas dan tertutup oleh ganggang. Lukisan warna hitam

tersebut berbentuk manusia yang digambarkan secara samar. Pada bidang dinding lain terdapat lukisan manusia memegang tombak dengan mata tombak berbentuk daun di tangan kanan, sedangkan tangan kiri memegang tameng. Di samping kirinya terdapat lukisan manusia yang juga digambarkan secara samar. Di bagian bawah lukisan tersebut terdapat gambar berbentuk bulat serta gambar segi empat. Secara keseluruhan, terdapat 8 lukisan dengan warna hitam yang sangat samar-samar karena telah terkelupas dan tertutup ganggang.

Kawasan karst Sangkulirang-Mangkalihat, khususnya gunung Gergaji, mengandung berbagai potensi yang dapat dikembangkan untuk beberapa sektor dengan tetap mengedepankan aspek keselarasan pelestarian alam dan budayanya. Potensi yang terlihat jelas adalah bidang kehutanan dimana ekosistem karst merupakan suatu ekosistem yang memadukan vegetasi dan fauna yang terdapat di dalamnya. Diketahui bersama bahwa hutan Kalimantan menyimpan berbagai jenis flora fauna yang khas dan endemik. Bidang lain yang sangat menjanjikan sebetulnya adalah pertambangan



Tim deliniasi kawasan Gunung Gergaji dan Gunung Marang bertoto di basecamp

dan industri. Menara-menara Karst yang mengandung batuan gamping merupakan bahan baku untuk pembuatan semen dan marmer. Bidang lain yang patut dikembangkan adalah minat wisata, baik minat wisata alam maupun minat wisata budaya. Untuk sektor bidang kehutanan dan pertambangan, jika tidak dikelola secara baik maka sinergitas sistem kehidupan di dalamnya akan mati secara perlahan. Salam Lestari!!!

Daftar Pustaka

- BPCB Samarinda. 2015. Buku Saku : Kegiatan Deliniasi Kawasan Sangkulirang Mangkalihat, Kutai Timur dan Berau.
- Tang, Muhammad. 2015. Laporan Kegiatan Kelompok 1, Kawasan Tewet.



LOMBA KARYA TULIS ILMIAH

Tema: Pelestarian Cagar
Budaya di Provinsi
Banten

Tingkat SMA
Se-Kota Serang
Tahun 2014



Kegiatannya
ama foto
barengnya Nih...

Next dihalaman berikutnya
dimuat dua pemenang karya
tulis terbaik....



UPAYA PENINGKATAN KUALITAS CAGAR BUDAYA

MELALUI KONSERVASI MENUJU KEJAYAAN BANTEN DI MASA YANG AKAN DATANG

Alvia Quronita A.S. (MAN 1 Kota Serang)

Juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah

Mengenai Potensi Dan Permasalahan Cagar Budaya

Tingkat SMA Se-Kota Serang Tahun 2014

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banten merupakan provinsi ke-13 yang berada di Negara Republik Indonesia, berdasarkan UU RI nomor 23 tahun 2000 tentang pembentukan provinsi Banten. Wilayah Banten meliputi Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon dan Kota Serang. Banten merupakan salah satu etnis (suku) yang berada di wilayah Jawa Barat, karena memiliki nilai-nilai budaya yang dapat diterima oleh masyarakat lain (Koentjoroningrat, 1969).

Penamaan Banten dimulai dari sebuah penamaan tentang Banten Girang, yang didasarkan pada lokasi hulu sungai di Banten, yang pada saat itu merupakan kerajaan Hindu Banten Girang. Sejarah penulisan Banten dimulai pada abad V, ketika ditemukannya sebuah prasasti di daerah Munjul,

yang menerangkan bahwa raja yang berkuasa di kerajaan Tarumanegara bernama Purnawarman.

Berita tentang Banten muncul kembali pada abad XIV dengan ditemukannya prasasti di Bogor, yang menceritakan tentang berdirinya Pakuan Padjajaran. Pada saat itu Banten merupakan kerajaan bawahan Pakuan Padjajaran sampai abad XVI. Menurut sejarah, pemimpin terakhir kerajaan Banten Hindu adalah seorang raja yang bernama Prabu Jaya Bupati, yang juga dikenal sebagai Prabu Pucuk Umum. Setelah kerajaan Banten Hindu berakhir, masuklah agama Islam yang dibawa oleh Syarif Hidayatullah dari Cirebon. Islam masuk ke Banten melalui jalur damai. Pada saat itu, dua punggawa kerajaan Banten Hindu yang bernama Ki Ajar dan Ki Uju masuk Islam. Setelah memeluk Islam, kedua tokoh tersebut berganti nama menjadi Ki Mas Jong

dan Ki Agus Ju. Mereka dikenal sebagai pemeluk Islam pertama di Banten.

Mulai saat itulah Islam menyebar di Banten. Kerajaan Islam di Banten berdiri sejak abad XVI, tepatnya tahun 1526, dengan rajanya bernama Syarif Hidayatullah. Selanjutnya pemerintahan diserahkan kepada putranya yang bernama Sultan Maulana Hasanuddin. Kerajaan Banten dipindahkan dari Banten Girang ke Surosowan pada tanggal 8 Oktober 1526, yang kemudian dikenal sebagai hari jadi kota Serang.

Zaman keemasan kerajaan Banten Islam terjadi pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, yang wilayahnya meliputi Lampung dan Sunda Kelapa. Pada masa itu, di Banten terdapat potensi budaya seperti debus, pusat studi Islam yang terbesar se-Asia Tenggara, dan kesenian yang alat-alatnya sekarang tersimpan di Kesultanan Cirebon.

Perkembangan Kesultanan Banten yang begitu pesat menyebabkan kolonial Belanda ingin menguasai Banten. Hal ini dibuktikan oleh pernyataan Ir. Soekarno: "Biarlah bintang dari ufuk timur tenggelam dari permukaan, yang terpenting bintang terang muncul dari ufuk barat. Dialah Banten dengan kejayaannya sebagai pusat pemerintahan pada masa itu." Dari pernyataan Ir. Soekarno tersebut, kita dapat mengetahui bahwa pada saat itu Banten merupakan kerajaan yang sangat maju dalam segala bidang.

B. Fokus Penelitian

Bagaimanakah cara untuk meningkatkan dan memajukan potensi cagar budaya Banten?

C. Tujuan Penelitian

Menjadikan potensi cagar budaya Banten seperti pada masa kejayaannya dulu atau bahkan lebih maju.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi masyarakat Banten, warisan budaya Banten dapat dimanfaatkan untuk generasi sekarang dan yang akan datang, agar mereka mengetahui tentang sejarah budaya Banten.
2. Bagi seluruh masyarakat Indonesia maupun masyarakat mancanegara yang mendukung tentang potensi cagar budaya Banten.

BAB II ISI

A. POTENSI CAGAR BUDAYA DI BANTEN LAMA

Banten Lama merupakan wilayah yang kaya akan situs budaya, antara lain:

1. Keraton Kaibon

Keraton Kaibon didirikan pada tahun 1815 M. Bagunan keraton terbuat dari batu karang, bata yang berukuran lebih besar dari ukuran bata sekarang, serta lantai-lantai yang berwarna coklat dan tebal yang dibuat menggunakan tanah merah. Selain itu, bangunan ini mempunyai banyak keindahan, antara lain pintu besar yang dikenal dengan sebutan "pintu dalam", bangunan masjid, pintu paduraksa, dan lain-lain. Karena keindahannya, Keraton Kaibon sering digunakan untuk pembuatan film, foto pernikahan, dan lain-lain.

2. Keraton Surosowan

Diperkirakan Keraton Surosowan didirikan pada tahun 1552 M hingga 1570 M. Perbentengan ini seluruhnya dibuat dari bata. Bata-bata tersebut memiliki tipe yang berbeda berdasarkan ukuran, bahan dan teknik pembuatannya. Beberapa tipe adonan juga digunakan, seperti tanah liat dengan campuran pasir dan kapur. Dinding benteng Keraton Surosowan tidak kokoh, di bagian dalam dinding diisi dengan tanah (Ambarry, 1988). Bangunan ini juga memiliki banyak keindahan, antara lain kolam pemandian Rara Dhenok dan Pancuran Emas, sudut-sudut keraton yang berbentuk seperti relung gua, dan lain-lain.

3. Vihara Avalokitesvara dan Rumah Pecinan Kuna

Vihara Avalokitesvara memiliki banyak keindahan, antara lain di gerbang masuk Vihara Avalokitesvara terdapat patung dua ekor naga yang diukir cantik, terlihat memamerkan giginya yang tajam layaknya sedang menjaga keleneng. Selain itu, juga terdapat patung-patung yang merupakan peninggalan masa lalu yang terawat dengan rapi. Pada masa keemasannya, rumah-rumah dengan arsitektur Cina berdiri di sepanjang jalan dengan gaya yang sama. Daerah ini memang dikenal dengan Pecinan, yang dikhususkan bagi para keturunan Cina untuk berdagang.

4. Masjid Agung Banten

Masjid yang dibangun oleh Sultan Banten I, Sultan Muhammad Hasanuddin, pada pertengahan abad ke-16 ini, merupakan salah satu masjid yang bercirikan arsitektur Jawa Kuna, dan memiliki menara setinggi 24 m. Masjid ini memiliki banyak keindahan, antara lain tiang-tiang yang sampai sekarang masih berdiri tegak, kolam keputren, serta menara masjid

yang kokoh.

5. Benteng Speelwijk

Benteng ini didirikan pada tahun 1682 M. Benteng ini berfungsi untuk mengontrol segala kegiatan yang berkaitan dengan Kesultanan Banten, dan juga sebagai tempat berlindung serta bermukim orang Belanda. Benteng ini dibangun dengan tiga jenis material, yaitu batu kali, batu karang dan bata yang direkatkan menggunakan campuran semacam semen. Bagian bawah bangunan terbuat dari batu cadas atau karang, sedangkan atasnya terdiri dari bata. Di dalam lingkungan benteng, masih terdapat pondasi dari sisa-sisa bangunan yang mungkin digunakan sebagai perkantoran atau tempat tinggal. Di sisi barat benteng yang masih berdiri kokoh, terdapat bangunan yang berbentuk lorong-lorong.

6. Museum Purbakala Banten Lama

Museum ini diresmikan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 15 Juli 1985, yang pada waktu itu dijabat oleh Prof. Dr. Harjati Soebadio. Museum ini berfungsi untuk menyimpan benda-benda peninggalan Kesultanan Banten dan juga sebagai objek pembelajaran dan wisata.

7. Danau Tasik Ardi

Danau Tasik Ardi dibangun oleh Sultan Maulana Yusuf dengan tujuan utama untuk pengairan sawah penduduk di Kesultanan Banten pada saat itu. Selain untuk pengairan sawah, air dari Tasik Ardi juga sekaligus memasok kebutuhan air di Keraton Surosowan. Sekarang danau ini berfungsi sebagai salah satu objek wisata di Banten Lama.

8. Jembatan Rantai

Jembatan Rantai dibangun dari bata dan karang, serta diduga memakai tiang besi dan papan. Jembatan ini berfungsi sebagai jembatan penyeberangan. Adapun kerekan rantai yang terdapat di jembatan ini berfungsi ganda, yakni bila ada lalu lalang kapal kecil, jembatan bisa dibuka dan ditutup. Sekarang fungsi jembatan ini hanya sebagai objek wisata dan pembelajaran.

9. Masjid Pecinan Tinggi

Masjid Pecinan Tinggi terbuat dari bata dan

batu karang. Di bagian dalam menara, terdapat jejak bekas anak tangga berbentuk persegi. Masjid ini merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Syarif Hidayatullah, yang pembangunannya dilanjutkan pada masa Maulana Hasanuddin.

Masih banyak cagar budaya di Banten Lama yang memiliki potensi yang tinggi. Ditambah lagi, sejarah dari situs-situs tersebut semakin menambah potensi yang dimilikinya. Bila potensi cagar budaya di Banten Lama dijaga atau bahkan ditingkatkan, tidak menutup kemungkinan cagar budaya di Banten Lama bisa maju, bahkan lebih, seperti pada masa kejayaannya dahulu.

B. Permasalahan-Permasalahan Yang Ada Di Situs Banten Lama

Seiring dengan bertambahnya waktu dan usia situs-situs yang ada, berarti bertambah juga permasalahan-permasalahan yang terjadi. Berikut adalah permasalahan-permasalahan yang terjadi di situs Banten Lama:

- Dinding-dinding situs ditumbuhi lumut dan rumput. Di halaman situs peninggalan kejayaan masa lalu ini terdapat rumput-rumput yang tinggi, sehingga menyebabkan hewan masuk dan meninggalkan kotoran.
- Salah satu halaman situs dijadikan lapangan sepak bola, lengkap dengan tiang gawang oleh anak-anak yang tinggal di sekitar situs.
- Kolam pemandian putri dan keputren banyak tumbuh lumut serta banyak sampah berupa botol plastik dan sampah lain.
- Dinding-dinding rumah di Pecinan terdapat coretan tangan yang disebabkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
- Di halaman Masjid Agung terdapat banyak pedagang, dan di dalam masjid banyak terdapat orang yang tidur.
- Jembatan rantai terputus, dinding jembatan dipenuhi coretan. Sungai di bawah jembatan banyak tumbuh enceng gondok dan penuh sampah-sampah plastik.
- Fasilitas di tiap situs kurang mendapat perawatan sehingga pengunjung kurang mendapatkan kenyamanan.
- Papan informasi situs kurang terawat bahkan di beberapa situs tidak ada, sehingga pengunjung harus menyewa pemandu di setiap observasi atau kunjungan.
- Bangunan-bangunan situs ada yang lama-kelamaan tambah miring, seperti misalnya Masjid Pecinan Tinggi.

C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Menjaga Dan Meningkatkan Situs Banten Lama

Seharusnya upaya untuk menjaga dan melestarikan

cagar budaya tidak hanya kewajiban pihak pemerintah saja, tetapi seluruh lapisan masyarakat, seperti pengunjung, masyarakat sekitar, dan instansi yang terkait dengan cagar budaya. Berikut upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga situs Banten Lama:

- Seharusnya dinas kebersihan bekerja sama untuk membersihkan lumut-lumut yang menempel pada dinding-dinding bangunan serta memotong rumput-rumput, sehingga tidak ada hewan yang masuk ke halaman situs dan tidak ada lagi kotoran-kotoran hewan.
- Baik masyarakat sekitar maupun pengunjung hendaknya menjaga kebersihan dengan kesadaran sendiri untuk tidak membuang sampah sembarangan.
- Fasilitas-fasilitas yang tersedia di setiap situs hendaknya diperbaiki sehingga pengunjung merasa nyaman, dan hendaknya diadakan pemeliharaan. Dengan demikian fasilitas-fasilitas tersebut terpelihara dengan baik, dan masyarakat yang bersangkutan juga harus ikut berperan serta dalam pemeliharaan situs Banten Lama.
- Semua bangunan hendaknya direnovasi dan dipelihara dengan baik.
- Gapura-gapura yang sudah tidak layak dipandang mata serta pos penjagaan yang tidak terpakai hendaknya diadakan pembaharuan.
- Kolam pemandian putri dan keputren dibersihkan dan dijaga jangan sampai ada sampah dan lumut.
- Jembatan rantai diperbaiki dan sungainya dibersihkan jangan sampai ada sampah dan coret-coretan.
- Disediakan pusat pertokoan khusus supaya para pedagang tidak mengganggu kawasan situs.
- Hendaknya di Masjid Agung dipasang papan informasi tentang ketertiban di lingkungan masjid agar pengunjung dapat beribadah dengan tenang.

BAB III SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Banten yang dahulu jaya bisa menjadi jaya lagi bahkan lebih bila kita, seluruh masyarakat Banten dan non-Banten, memiliki kesadaran dalam pelestarian cagar budaya yang ada di daerah Banten.

B. Saran

Untuk seluruh *stakeholder* yang terkait dalam pengelolaan cagar budaya di Banten hendaknya berupaya melakukan peningkatan dan melakukan rehabilitasi cagar budaya, sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat, generasi sekarang, dan masa yang akan datang.

Setiap masyarakat hendaknya mempunyai kesadaran untuk membantu meningkatkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, agar cagar budaya Banten menjadi maju seperti pada masa kejayaannya dulu, atau bahkan lebih maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, Herman. 2001. Banten Dalam Peralihan. Yasfi.
- Jayadiningrat, Hoesen. 1983. Tinjauan Kritis Tentang Sejarah Banten.
- Michrob, Halwany dan A. Mujahid Chudari. 1993. Catatan Masa Lalu Banten – Serang (Edisi III).
- Sulendraningrat, P.S. Babat Tanah Sunda, Babat Cirebon. <http://doniapriyanto11.blogspot.com/2011/01/keraton-kaibon-yang-mempesona.html>
- <http://variety-indonesia.blogspot.com/2011/06/vihara-avalokitesvara-serang-banten.html>
- <http://ceritayanti.wordpress.com/2014/03/26/banten-lama-menguak-peradaban-empat-abad-silam/>
- <http://www.backpackerkoprol.com/2012/11/situs-sejarah-banten-lama.html>
- <http://www.raddien.com/2010/10/fakta-benteng-spielwijk-di-serang.html>
- <http://lestarikanwisatabanten.blogspot.com/2010/10/danau-tasikardi-sayang-jika-tidak.html>
- <http://doniapriyanto11.blogspot.com/2011/01/jembatan-rantai-yang-artistik.html>
- <http://jejaklangkakhkami.blogspot.com/2013/12/gerbang-lengkung-watu-gilang.html>
- <http://matabuderbfly.blogspot.com/2010/07/masjid-pecinan-tinggi.html>
- <http://www.antaranews.com/berita/394087/istana-kaibon-kejayaan-banten-yang-kini-terbengkalai>
- <http://www.1001wisata.com/situs-keraton-kaibon-kesultanan-banten/>
- <http://www.kidnesia.com/Kidnesia2014/Dari-Nesi/Sekitar-Kita/Pengetahuan-Umum/Kota-Tua-Banten>

REVITALISASI SITUS PURBAKALA

Sebagai Upaya Pengembangan Modal Sosial Masyarakat Di Banten Lama

Siti Rohmah (SMAN 6 Kota Serang)
Juara 2 Lomba Karya Tulis Ilmiah
Mengenai Potensi Dan Permasalahan Cagar Budaya
Tingkat SMA Se-Kota Serang Tahun 2014

BAB I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Kawasan Banten Lama merupakan kawasan pusat peradaban pada zamannya. Kawasan ini pernah mengalami puncak kejayaan lima abad silam, tepatnya pada abad XVI. Kejayaan kawasan Banten Lama pada masa itu ditandai dengan kuatnya hubungan masyarakat Banten dengan masyarakat internasional, sehingga kawasan Banten Lama menjadi pusat perdagangan internasional. Pada masa itu, para pedagang dari Persia, Tiongkok, India, Filipina, Vietnam, Jepang, Goa, Jazirah Arab hingga bangsa-bangsa Eropa, bahkan kolonial Belanda yang menjajah bangsa ini, pernah mendarat di pelabuhan di sekitar kawasan Banten Lama. Kuatnya hubungan tersebut membawa dampak perubahan yang signifikan pada kehidupan masyarakat Banten Lama. Seperti adanya pengaruh keyakinan atau religi, gaya arsitektur atau bangunan, kerajinan, pengelolaan sumber

daya air, pengelolaan pelabuhan sebagai pusat perdagangan, persenjataan, bentuk makam dan masih banyak lagi pengaruh-pengaruh yang kemudian melekat pada kehidupan masyarakat di Banten Lama pada saat itu.

Pengaruh-pengaruh masyarakat internasional terhadap budaya masyarakat Banten Lama, tentu saja dapat berakibat adanya akulturasi budaya, sehingga menambah keunikan peradaban pada masa itu, yang menjadi sebuah kenyataan dari kejayaan masyarakat Banten. Bentuk kejayaan masyarakat Banten pada masa itu memang tidak bisa kita lihat secara utuh, namun kita dapat menafsirkannya melalui peninggalan-peninggalan yang masih tersisa pada saat ini. Peninggalan-peninggalan yang masih ada saat ini berada di dalam situs keurbakalaan. Situs keurbakalaan merupakan tempat atau

lokasi dimana terdapat benda cagar budaya. Di kawasan Banten Lama terdapat banyak sekali situs purbakala seperti di antaranya kompleks Keraton Surosowan, kompleks Masjid Agung, Meriam Ki Amuk, Masjid Pacinan Tinggi, kompleks Keraton Kaibon, Masjid Kojas, Kerkhof, Benteng Speelwijk, Klenteng Cina, Watu Gilang, makam kerabat Sultan, Masjid Agung Kenari, dan benda-benda cagar budaya yang ada di Museum Banten Lama.

Situs-situs keurbakalaan di kawasan Banten Lama, pada dasarnya menjadi modal yang sangat berharga bagi perkembangan paradigma masyarakat Banten dalam menghadapi era modernisasi dan globalisasi dengan tidak melupakan budaya aslinya. Dengan demikian, situs keurbakalaan dapat menjadi salah satu sumber modal sosial yang sangat potensial dikembangkan. Situs keurbakalaan dapat memberikan referensi kehidupan masa silam yang terikat oleh nilai dan norma budaya, yang dapat menjadi pegangan dalam kehidupan masa kini.

Keadaan situs keurbakalaan di kawasan Banten Lama tidak begitu terawat karena banyak situs keurbakalaan yang terbengkalai dan tidak diperhatikan. Apabila dilihat di lapangan, situs keurbakalaan sekarang ini seakan hanya bongkahan reruntuhan yang tidak ada nilainya. Diperparah lagi banyak orang yang memanfaatkan situs tersebut sebagai pusat kegiatan warga sekitar yang tidak terarah, sehingga menyebabkan kerusakan dimana-mana.

Melihat keadaan situs keurbakalaan di kawasan Banten Lama saat ini yang kurang terpelihara, maka harus segera dilaksanakan revitalisasi. Revitalisasi di sini merupakan usaha-usaha untuk menjadikan situs keurbakalaan menjadi penting dan perlu sekali. Revitalisasi situs keurbakalaan tidak hanya sekedar hal-hal yang berkaitan dengan fisik situs keurbakalaan saja namun juga harus mencakup aspek ekonomi dan aspek sosial masyarakat. Pada akhirnya pelestarian situs keurbakalaan dapat terjaga dan masyarakat memiliki kekuatan dalam aspek sosial dan budayanya.

II. Rumusan masalah

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah revitalisasi situs keurbakalaan yang perlu dilakukan untuk pengembangan modal sosial masyarakat di Banten Lama?

III. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah:

Untuk mengetahui bentuk revitalisasi situs keurbakalaan yang perlu dilakukan untuk pengembangan modal sosial masyarakat di Banten Lama.

BAB II PEMBAHASAN

Perkembangan sejarah bangsa Indonesia telah memperlihatkan kepada kita semua bahwa di kawasan Banten Lama terdapat sumber daya kultural keurbakalaan cukup tinggi dalam kurun waktu sejarah kerajaan Banten. Selanjutnya data sejarah membuktikan bahwa Situs Banten Lama pernah mengalami masa kejayaan dan keruntuhan di sekitar abad XVI sampai dengan abad XIX. Namun kondisi sekarang ini yang tersisa hanyalah puing-puing sisa dari sistem kerajaan Banten.

I. Gambaran Umum Masyarakat Banten Lama

Pada pertengahan abad XVI sampai awal abad XIX, Banten merupakan pusat kerajaan yang bercorak Islam dan juga merupakan pusat perdagangan yang penting di kawasan Asia Tenggara. Saat ini, Banten termasuk dalam wilayah administratif kecamatan Kasemen, pemerintahan kota Serang, provinsi Banten. Letaknya kira-kira sepuluh kilometer di sebelah utara kota Serang, empat meter di sebelah selatan Teluk Banten (Agus Widodo: <http://budaya-indonesia-sekarang.blogspot.com>).

Masyarakat yang tinggal di daerah Banten Lama mempunyai latar belakang keadaan sosial ekonomi yang secara umum dapat dikatakan masih sederhana, ditinjau dari sikap hidup, keadaan perumahan dan suasana lingkungannya. Mata pencaharian utama masyarakat adalah bertani dan menangkap ikan. Masyarakat asli Banten umumnya menjadi petani. Masyarakat Banten berpola hubungan kekeluargaan dan berfalsafah hidup gotong royong serta sangat kuat mempertahankan adat. Sebagian besar masyarakatnya merupakan kaum pendatang, umumnya dari daerah Sulawesi Selatan, Indramayu, Cirebon, Sumedang, Garut dan sekitarnya. Masyarakat Banten umumnya memeluk agama Islam yang taat, mengembangkan kesenian tradisional yang umumnya juga bernapaskan/bercorak ke-Islaman, seperti debus, rudat, mawalan dan lain-lain (Hasan Muarif Ambary dan Halwany Michrob:).

II. Potensi Situs Keurbakalaan Di Banten Lama

Sebagai pusat kerajaan Banten pada abad XVI dan sebagai pusat perdagangan internasional pada masa itu, tentu saja banyak peninggalan-peninggalan bersejarah di wilayah Banten Lama. Peninggalan-peninggalan bersejarah tersebut menjadi catatan hidup manusia yang melakukan proses sosial budaya pada masa lampau. Catatan manusia ini sangat penting sebagai referensi perjalanan hidup dalam menghadapi masa depan. Di sisi lain, apabila dimanfaatkan secara optimal mungkin akan mendatangkan keuntungan bagi masyarakat dalam bidang materiil maupun non materiil. Adapun potensi peninggalan-peninggalan bersejarah yang ada di Banten Lama di antaranya

yaitu:

1. Keraton Surosowan

Keraton Surosowan adalah tempat kediaman Sultan Banten, yang oleh orang Belanda disebut Fort Diamont atau Kota Intan, yang dikelilingi oleh tembok perbentengan seluas ± 4 hektar. Keadaan keraton itu kini sudah hancur, yang nampak hanyalah sisa bangunan saja yang berupa pondasi-pondasi serta tembok-tembok dinding yang sudah rusak.

2. Meriam Ki Amuk

Meriam yang dikeramatkan oleh sebagian penduduk ini, dulu ditempatkan di dekat kanal di bawah sebuah gubuk beratap tanpa tembok, yang diletakkan menghadap utara, seperti disiapkan untuk menembak kapal musuh yang hendak merapat ke pantai Karangantu. Di atas bagian moncongnya, terdapat prasasti bertuliskan huruf Arab yang berbunyi “aqikatul khoirislamatul imani” dengan bagian pangkal berbentuk tangan yang mengepal dengan ibu jari ke luar mengarah ke atas. Meriam Ki Amuk sekarang ditempatkan di sudut tenggara alun-alun, tidak jauh dari pintu gerbang bagian utara benteng Surosowan.

3. Kompleks Masjid Agung Banten

Bangunan Masjid Agung dilengkapi dengan serambi yang penuh dengan makam di kiri kanannya. Berdasarkan sejarah Banten, masjid ini didirikan pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin. Seperti juga masjid-masjid lain, bangunan masjid ini pun berdenah segi empat. Atapnya terbuat dari papan kayu bersusun berbentuk limas. Di dalam serambi kiri yang terletak di sebelah utara, terdapat makam beberapa Sultan Banten dan keluarganya. Di antaranya terdapat makam Maulana Hasanuddin dan istrinya, makam Sultan Ageng Tirtayasa, dan makam Sultan Abul Nasr' Abdul Qahar (Sultan Haji). Adapun di dalam serambi kanan yang terletak di sebelah selatan, terdapat makam Maulana Muhammad, makam Sultan Zainul Abidin, dan lain-lain.

Di samping potensi-potensi yang ada di atas, masih banyak lagi situs-situs yang sangat potensial untuk dikembangkan sehingga menghasilkan keuntungan bagi masyarakat. Adapun situs-situs tersebut adalah pasar dan pelabuhan Karangantu, Tasik Ardi, Jembatan Rante, Masjid Koja, Benteng Speelwijk, makam-makam kerabat Sultan, kelenteng Cina, Keraton Kaibon, dan lain-lain.

III. Permasalahan Di Situs Kepurbakalaan Banten Lama

Permasalahan yang dihadapi di situs kepurbakalaan Banten Lama tidak jauh berbeda dengan situs-situs lain di daerah yang berbeda. Banyak kesan yang terlintas apabila kita mengunjungi situs kepurbakalaan yang ada di Banten Lama. Seperti yang ada di kawasan Benteng Speelwijk dan kelenteng Cina, dimana kawasan ini terkesan tidak rapi dengan penataan ruang yang kurang tertata, terbengkalai, kumuh, bahkan terdapat lapangan sepak bola di dalam benteng, sehingga mengundang aktivitas lain yang merusak situs kepurbakalaan. Diperparah lagi dengan aktivitas beberapa pemuda yang menjadikan kawasan situs sebagai tempat yang nyaman untuk memadu kasih.

Permasalahan tersebut tidak lepas dari perilaku manusia itu sendiri. Hal ini didasari oleh faktor kesadaran dan paradigma masyarakat terhadap adanya situs purbakala yang ada di sekitar kehidupan mereka. Paradigma masyarakat Banten Lama, terlebih masyarakat di sekitar situs, sudah terpengaruh oleh modernisasi yang lebih mengedepankan orientasi materi daripada warisan budaya yang harus dipelihara. Paradigma semacam inilah yang membuat masyarakat acuh terhadap situs kepurbakalaan. Ditambah dengan pemerintah yang kurang menaruh perhatian terhadap pelestarian situs kepurbakalaan, karena hanya mementingkan segi pragmatis ekonomi yang didapat.

Selain berbagai permasalahan di atas, situs purbakala tebengkalai juga disebabkan oleh adanya banyaknya kepentingan politik yang dilakukan oleh elit politik daerah dan para tokoh kemasyarakatan. Permasalahan-permasalahan tersebut selama bertahun-tahun hingga sekarang tidak terselesaikan.

IV. Revitalisasi Situs Kepurbakalaan Di Banten Lama

Berbagai macam kompleksitas permasalahan di atas menggambarkan pandangan yang begitu kurang pentingnya situs kepurbakalaan sebagai modal dasar kehidupan. Padahal potensi-potensi yang ada di dalamnya dapat membuat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, di perlukan usaha untuk revitalisasi situs kepurbakalaan. Usaha revitalisasi ini berarti menjadikan penting kembali situs-situs yang terbengkalai yang ada di Banten Lama. Cakupan revitalisasi yang perlu dilakukan meliputi revitalisasi fisik situs, sosial dan ekonomi budaya.

Revitalisasi dalam aspek fisik situs kepurbakalaan hendaknya mencakup semua tata ruang yang ada di sekitar situs kepurbakalaan. Revitalisasi tata ruang diharapkan dapat memberikan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Dengan demikian, revitalisasi fisik harus menyuntikkan sesuatu yang baru guna memberikan nilai lebih dari situs tersebut, namun tidak mengubah secara

mendasar nilai aslinya. Revitalisasi fisik bisa saja dengan cara menambahkan atau menentukan beberapa zona di kawasan situs kepurbakalaan. Zona-zona tersebut misalnya zona untuk pencegahan dan perlindungan lingkungan fisik dari bangunan arkeologis, zona untuk fasilitas taman bagi kenyamanan pengunjung dan preservasi lingkungan bersejarah, zona pengaturan penggunaan lahan dan pelestarian lingkungan dengan pengendalian pembangunan daerah sekitar taman, zona pengelolaan pemandangan bersejarah dan perlindungan terhadap rusaknya pemandangan, zona yang diperuntukkan bagi usaha survei arkeologis di daerah yang luas dan pencegahan kerusakan benda arkeologis yang belum digali. Dengan penambahan zona tersebut diharapkan dapat menjaga kelestarian situs purbakala.

Selain aspek fisik, yang perlu ditekankan dalam revitalisasi adalah aspek sosial budaya. Apabila aspek fisik telah direvitalisasi namun kurang memperbaiki aspek sosial budaya masyarakat setempat, akan menjadi percuma. Dengan demikian, revitalisasi sosial budaya di sini sangat penting dilakukan. Revitalisasi sosial budaya hendaknya diarahkan sebagai usaha pengarah cara hidup masyarakat dengan menuju paradigma yang luas ke depan. Dengan paradigma yang luas ke depan, akan menuntun masyarakat dalam hal penghargaan terhadap peninggalan masa lampau. Penghargaan masyarakat terhadap masa lampau akan membawa tingkat partisipasi yang tinggi dalam hal pelestarian, yang pada akhirnya pengoptimalan potensi situs kepurbakalaan dapat terwujud karena didukung oleh semua *stakeholder* yang ada di dalam masyarakat.

V. Modal Sosial Masyarakat Banten Lama

Dengan merevitalisasi situs kepurbakalaan, maka proses penguatan modal sosial juga berlangsung di dalam masyarakat. Adapun wujud modal sosial yang semakin kuat adalah hubungan sosial. Hal ini terjadi karena adanya kepedulian, toleransi, kepercayaan, kebersamaan, tanggung jawab sosial dan partisipasi masyarakat, sehingga terbangun komunikasi dua arah antar setiap *stakeholder* dalam usaha menjaga peninggalan-peninggalan masa lampau. Hubungan sosial tersebut akan lebih maksimal apabila setiap *stakeholder* ataupun masyarakat setempat dilibatkan dalam usaha revitalisasi situs kepurbakalaan. Dengan memperkuat hubungan, maka dengan sendirinya akan membentuk jaringan sosial dan pola kepemimpinan yang baru. Selain itu, adat dan nilai budaya lokal juga semakin kuat karena revitalisasi situs kepurbakalaan juga mengandung maksud menghidupkan kembali adat dan nilai budaya lokal yang dapat menjadi pijakan di era sekarang ini.

Di sisi lain, kearifan lokal dan pengetahuan lokal juga akan menguat, dimana penghargaan terhadap potensi

lokal semakin dijunjung tinggi sebagai akibat penguasaan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh setiap komponen masyarakat. Pada akhirnya, modal sosial akan menumbuhkan kemandirian untuk mengembangkan efektivitas upaya bersama untuk mencapai tujuan bersama, sekaligus memelihara hasil-hasil yang diperoleh dari upaya-upaya bersama tersebut.

BAB III PENUTUP

I. Kesimpulan

Kawasan Banten Lama merupakan wilayah yang mempunyai latar belakang historis sebagai pusat kerajaan Banten dan mengalami kejayaan pada abad XVI. Kawasan Banten Lama terletak di wilayah kecamatan Kasemen, daerah pemerintah kota Serang, provinsi Banten. Sebagai pusat Kerajaan Banten, Banten Lama mempunyai banyak peninggalan-peninggalan historis yang berada di situs kepurbakalaan. Peninggalan-peninggalan tersebut mempunyai banyak potensi. Adapun peninggalan-peninggalan tersebut adalah Keraton Surosowan, Meriam Ki Amuk, Masjid Agung Banten, pasar dan pelabuhan Karangantu, Tasik Ardi, Jembatan Rante, Masjid Koja, Benteng Speelwijk, makam-makam kerabat Sultan, kelenteng Cina, Keraton Kaibon, dan lain-lain.

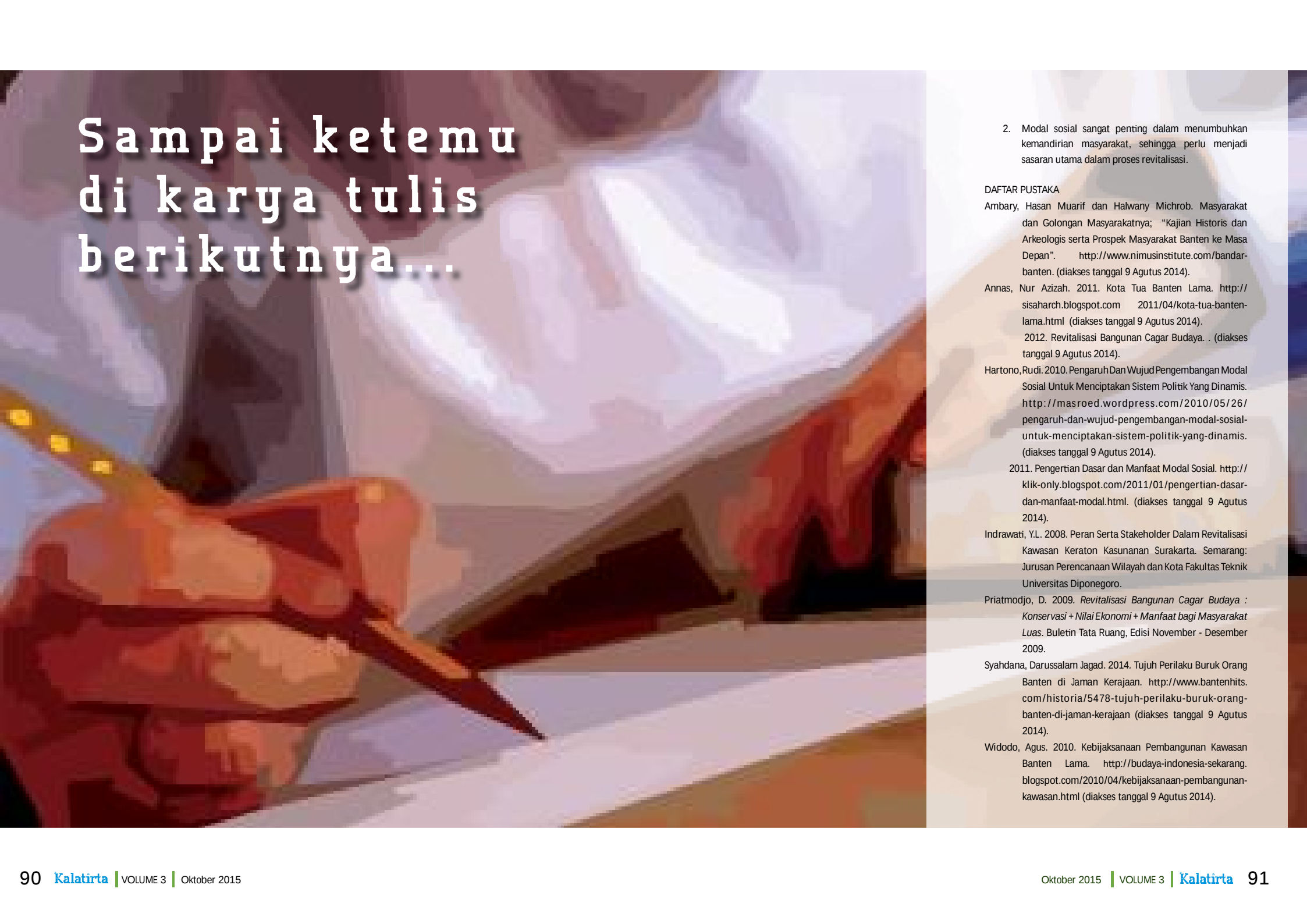
Keadaan dari peninggalan-peninggalan tersebut saat ini hanya tinggal puing-puing. Meskipun di dalam situs kepurbakalaan Banten Lama yang tertinggal hanyalah puing-puingnya saja, namun masih menyimpan kekayaan yang dapat menjadi modal dalam menghadapi tantangan masa depan. Akan tetapi, untuk memaksimalkan potensi situs kepurbakalaan, harus menghadapi berbagai macam permasalahan. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan revitalisasi situs kepurbakalaan. Revitalisasi situs kepurbakalaan hendaknya mencakup aspek fisik situs dan aspek sosial budaya masyarakat.

Dengan teratasinya berbagai permasalahan melalui dilakukannya revitalisasi situs kepurbakalaan, diharapkan dapat mengembangkan modal sosial masyarakat di Banten Lama. Adapun modal sosial yang semakin kuat bisa terjadi pada hubungan sosial yang menciptakan jaringan sosial, adat dan nilai budaya lokal, kearifan lokal, dan pengetahuan lokal, yang pada akhirnya dapat menciptakan kemandirian masyarakat.

II. Saran

Dari kesimpulan di atas maka dapat ditarik saran sebagai berikut:

1. Revitalisasi situs kepurbakalaan perlu segera dilakukan guna memaksimalkan potensi dan mengatasi berbagai macam permasalahan.



Sampai ketemu di karya tulis berikutnya....

2. Modal sosial sangat penting dalam menumbuhkan kemandirian masyarakat, sehingga perlu menjadi sasaran utama dalam proses revitalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambary, Hasan Muarif dan Halwany Michrob. Masyarakat dan Golongan Masyarakatnya; "Kajian Historis dan Arkeologis serta Prospek Masyarakat Banten ke Masa Depan". <http://www.nimusinstitute.com/bandar-banten>. (diakses tanggal 9 Agustus 2014).
- Annas, Nur Azizah. 2011. Kota Tua Banten Lama. <http://sisaharch.blogspot.com> 2011/04/kota-tua-banten-lama.html (diakses tanggal 9 Agustus 2014).
2012. Revitalisasi Bangunan Cagar Budaya. . (diakses tanggal 9 Agustus 2014).
- Hartono, Rudi. 2010. Pengaruh Dan Wujud Pengembangan Modal Sosial Untuk Menciptakan Sistem Politik Yang Dinamis. <http://masroed.wordpress.com/2010/05/26/pengaruh-dan-wujud-pengembangan-modal-sosial-untuk-menciptakan-sistem-politik-yang-dinamis>. (diakses tanggal 9 Agustus 2014).
2011. Pengertian Dasar dan Manfaat Modal Sosial. <http://klik-only.blogspot.com/2011/01/pengertian-dasar-dan-manfaat-modal.html>. (diakses tanggal 9 Agustus 2014).
- Indrawati, Y.L. 2008. Peran Serta Stakeholder Dalam Revitalisasi Kawasan Keraton Kasunanan Surakarta. Semarang: Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
- Priatmodjo, D. 2009. *Revitalisasi Bangunan Cagar Budaya : Konservasi + Nilai Ekonomi + Manfaat bagi Masyarakat Luas*. Buletin Tata Ruang, Edisi November - Desember 2009.
- Syahdana, Darussalam Jagad. 2014. Tujuh Perilaku Buruk Orang Banten di Jaman Kerajaan. <http://www.bantenhits.com/historia/5478-tujuh-perilaku-buruk-orang-banten-di-jaman-kerajaan> (diakses tanggal 9 Agustus 2014).
- Widodo, Agus. 2010. Kebijakan Pembangunan Kawasan Banten Lama. <http://budaya-indonesia-sekarang.blogspot.com/2010/04/kebijaksanaan-pembangunan-kawasan.html> (diakses tanggal 9 Agustus 2014).



GALERI FOTO



Kegiatan
Fun Bike,
memperingati
HUT Purbakala
ke 102 tahun 2015



Kegiatan
Volly ball dan
khitanan,
memperingati
HUT purbakala ke-102
tahun 2015

